



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BANJAR**

2025

# LKJIP DINAS PENDIDIKAN

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**



## **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No.3 RT.05 RW.03

Telp. (0511) 6749084

Martapura 70651

Website : [disdik.banjarkab.go.id](http://disdik.banjarkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2025. Dalam konteks perencanaan, LKjIP Tahun 2025 menggambarkan keterkaitan yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dan terukur.

LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini juga menyajikan informasi yang detail mengenai realisasi anggaran, termasuk perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai. Melalui penyajian yang sistematis, kami ingin memastikan bahwa setiap pos anggaran dapat dipahami dengan jelas, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik dikelola dan digunakan untuk kepentingan pendidikan di Kabupaten Banjar. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi internal, dasar perbaikan berkelanjutan, serta wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar serta mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST., MS  
Pembina TK I / IV b  
NIP. 19800712 200501 2 013



*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stemple basah.*



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan selama tahun anggaran 2025. Laporan ini memuat capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar melaksanakan berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan. Sasaran strategis yang ditetapkan antara lain peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan tata kelola pelayanan pendidikan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta dinamika kebutuhan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah merumuskan langkah-langkah perbaikan dan rekomendasi strategis sebagai dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2022-2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Adapun dari segi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 719.575.440.008,- realisasi sebesar Rp. 669.049.941.917,04,- atau 92,98%.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar secara berkelanjutan, serta menjadi sarana akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
A.1 Maksud Laporan .....	6
A.2 Tujuan Laporan .....	6
B. TUGAS DAN FUNGSI .....	6
B.1 Tugas Pokok .....	6
B.3 Dasar Hukum .....	7
B.4 Struktur Organisasi .....	10
B.5 Kepegawaian .....	12
C. ISU STRATEGIS .....	14
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	17
BAB II .....	18
PERENCANAAN KINERJA .....	18
A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH .....	18
C. PERJANJIAN KINERJA .....	23
BAB III .....	41
AKUNTABILITAS KINERJA .....	41
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	41
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tujuan .....	42
A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	43
A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	83
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir Renstra .....	102
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional .....	112
A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi Pelaksanaan Target Kinerja .....	121
A.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	227
A.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja .....	233
A.9 Rekomendasi dan Tindak lanjut .....	262
B. Realisasi Anggaran .....	264
B. 1 Realisasi Jenis Belanja .....	264
B. 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	265
B. 3 Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja .....	273
BAB IV .....	286
PENUTUP .....	286
A. Kesimpulan .....	286
B. Saran-Saran .....	286

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan .....	12
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.....	20
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah .....	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	42
Tabel 3.2 Realisasi Target Indikator Tujuan Perangkat Daerah .....	42
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 .....	84
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir Renstra.....	103
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi ..	112
Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	227
Tabel 3.8 Realisasi Jenis Belanja .....	264
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	265
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja.....	273

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 .. 11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A.1 Maksud Laporan**

1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar atas pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan selama Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
3. Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Mengukur dan menilai tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja program dan kegiatan.
3. Menyediakan informasi kinerja yang terukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan.
4. Menjadi dasar penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
5. Mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan daerah di bidang pendidikan.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

#### **B.1 Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah seperti.

1. Menyusun rencana kerja dinas dan program di bidang pendidikan.

2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan (PAUD, SD, SMP, Nonformal).
3. Melaksanakan kebijakan teknis, termasuk pembinaan guru, tenaga pendidik, dan pengelolaan sarana prasarana.
4. Memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Melaksanakan ketatausahaan, perencanaan program, anggaran, kepegawaian, dan kehumasan.

## **B.2 Fungsi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pendidikan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pendidikan;
- e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas; dan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B.3 Dasar Hukum**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berlandaskan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4).
16. Peraturan daerah kabupaten banjar nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

17. Peraturan Bupati Banjar nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 100.3.3 / 195 / DISDIK / 2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

#### **B.4 Struktur Organisasi**

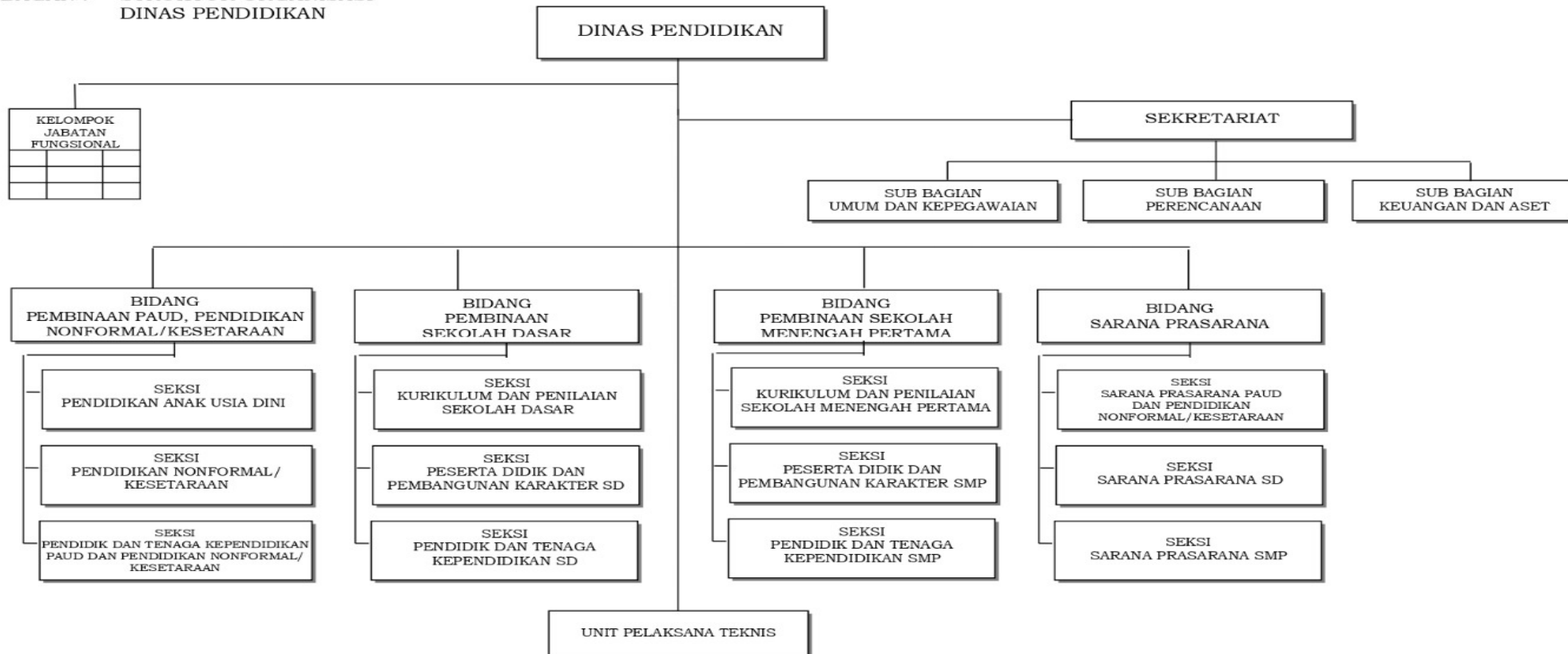
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan terdiri dari:
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; dan
  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- f. Bidang Sarana Prasarana terdiri dari:
  1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
  2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
  3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025

46

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN



## B.5 Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun pelaporan, Dinas Pendidikan didukung oleh pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN, dengan komposisi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Penataan dan pemanfaatan pegawai diarahkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sesuai kewenangan daerah. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, Dinas Pendidikan secara berkelanjutan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, manajemen sekolah, dan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan

No	Jabatan	Eselon			Golongan							Tingkat Pendidikan					Jlh	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	S3	S2	S1	D	SM		
1	Kepala Dinas		1		1								1					1
2	Sekretaris			1	1								1					1
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1		1							1					1
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar			1	1								1					1
5	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama			1	1								1					1
6	Kepala Bidang Sarana			1		1							1					1

No	Jabatan	Eselon				Golongan						Tingkat Pendidikan					Jlh
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	IX	V	III	S3	S2	S1	D 3	
	dan Prasarana																
7	Kasubbag Perencanaan				1	1									1		
8	Kasubbag Keuangan dan Aset				1	1									1		
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1	1									1		
10	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini				1	1									1		
11	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1	1								1			
12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1	1									1		
13	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar				1	1									1		
14	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar				1	1									1		
15	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar				1	1									1		
16	Kepala Seksi				1	1									1		

No	Jabatan	Eselon				Golongan						Tingkat Pendidikan					Jlh
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	IX	V	III	S3	S2	S1	D	
				I													
	Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama																
17	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama			1	1							1					1
18	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama																
19	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1	1								1				1
20	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar																
21	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama			1	1							1					1
22	Pelaksana				1	18	1		5	3	10	1	2	20	1	14	46
23	Fungsional				8	2	1		4				6	7	2		15

### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mencakup berbagai tantangan dan peluang yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah

sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah. Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

. Berikut adalah beberapa isu strategis yang diidentifikasi:

1. **Kurangnya minat Masyarakat untuk menempuh jalur Pendidikan formal dan cenderung memilih jalur Pendidikan keagamaan**

Dinas Pendidikan akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal yang seimbang dengan pendidikan keagamaan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan mutu dan daya tarik sekolah formal melalui pembelajaran yang inovatif, penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan kompetensi pendidik. Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap angka partisipasi sekolah sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program pendidikan.

2. **Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS)**

Dinas Pendidikan akan melakukan penguatan pendataan dan pemutakhiran data ATS secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, dan pemerintah desa/kelurahan. Upaya penanganan difokuskan pada penarikan kembali anak ke satuan pendidikan formal maupun nonformal melalui penyediaan layanan pendidikan yang fleksibel, program kesetaraan, serta dukungan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Dinas Pendidikan akan meningkatkan peran satuan pendidikan dan masyarakat dalam pencegahan putus sekolah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menurunkan angka ATS dan meningkatkan partisipasi sekolah.

3. **Masih terdapat wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan terutama di daerah terpencil**

Dinas Pendidikan akan melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pemenuhan dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan fasilitas pendidikan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran, serta mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, Dinas Pendidikan akan mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang ada, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah.

4. **Belum Meratanya Kompetensi Dan Kuantitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan secara lebih proporsional sesuai kondisi dan karakteristik wilayah. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, serta pengembangan profesional berkelanjutan, khususnya bagi pendidik di wilayah terpencil dan satuan pendidikan dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, Dinas Pendidikan akan mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan sumber daya manusia pendidikan serta memperkuat monitoring dan evaluasi untuk mendukung pemerataan mutu layanan pendidikan.

5. **Belum Optimalnya Kualitas Hasil Belajar Siswa**

Meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui penguatan kompetensi pendidik, penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Upaya ini didukung dengan penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kualitas asesmen pembelajaran, serta pendampingan berkelanjutan kepada satuan pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian hasil belajar sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan.

6. **Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidik**

Memperkuat tata kelola dan manajemen sekolah melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan, penguatan perencanaan berbasis data, serta pembinaan dan pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan. Upaya ini didukung dengan peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan, optimalisasi peran pengawas sekolah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna

mendorong satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis ini menjadi fokus utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menyusun rencana kerja dan program-program ke depan, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang lebih baik di daerah.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Ringkasan Eksekutif;

*Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.*

Daftar Isi;

Daftar Tabel;

Daftar Gambar;

Bab I Pendahuluan

*Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, tugas dan fungsi, dan isu strategis organisasi;*

Bab II Perencanaan Kinerja

*Menjelaskan tentang indikator kinerja utama dan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.*

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

*Menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun 2025 dan realisasi anggaran tahun 2025 beserta analisisnya*

Bab IV Penutup

*Menjelaskan kesimpulan dan saran*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar sebagai kontribusi nyata terhadap visi pembangunan daerah yang *Maju, Mandiri, dan Agamis*. Upaya ini mencakup peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam akses pendidikan formal maupun nonformal.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dinas Pendidikan bertujuan meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan melalui penguatan kurikulum, pembelajaran yang inovatif, dan penguatan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. Selain itu, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus utama melalui pelatihan, pembinaan profesional berkelanjutan, serta pengembangan karier yang sistematis untuk memastikan tenaga pendidikan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21.

Dinas Pendidikan juga bertujuan memperkuat kelembagaan satuan pendidikan agar memiliki manajemen yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan, dengan peningkatan kapasitas kepala sekolah, pengawas, dan tenaga teknis pendidikan. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas juga menjadi bagian integral dari tujuan Dinas Pendidikan, guna menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Dukungan terhadap penyusunan kebijakan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor merupakan landasan penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut sehingga pendidikan di Kabupaten Banjar dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasar urusan dan program yang diampu Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian salah satu dari 5 (lima) misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi ke-1 : *Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas*. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengemban tujuan, yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.12

	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.07
--	-------------------------------------	----------------------------	-------

## B. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa di seluruh jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan juga menargetkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan karier berkelanjutan, serta pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, Dinas Pendidikan berupaya memperkuat efektivitas kelembagaan satuan pendidikan agar lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan. Melalui sasaran-sasaran tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Banjar meningkat secara menyeluruh, mendukung tercapainya pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan berkelanjutan.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator Kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebanyak 11 (sebelas) indikator, 106 (tiga puluh tiga) indikator program, 39 (tiga puluh sembilan) indikator kegiatan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) indikator sub kegiatan.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	8	9
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 5-6 tahun) X 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.	(Jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) X 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-18 tahun) X 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik di jenjang PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada	(Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan

		Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	Usia Dini) X 100%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik di jenjang sekolah dasar dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar) X 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama) X 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik dan EMIS) dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi populasi (BPS).	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) x 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar) x 100%	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan

			sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan	Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) x 100%		
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Ukuran capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan yang merujuk pada jenis dan mutu pelayanan pendidikan minimal yang berhak diperoleh setiap peserta didik. Nilai yang di pakai adalah Nilai Indeks SPM Bidang Pendidikan yang merupakan nilai puncak dari Raport Pendidikan secara menyeluruh. Nilai ini telah mencakup semua aspek pengukuran kualitas Pendidikan di tiap-tiap satuan Pendidikan di seluruh Kabupaten Banjar.	$\frac{\text{Jumlah Pencapaian Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Total Indikator yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Kepala Dinas	Rapor Pendidikan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian diperoleh dari hasil penilaian tim evaluator AKIP atas implementasi SAKIP di perangkat daerah dengan instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25%	Kepala Dinas	LHE Perangkat Daerah

Sumber : Surat Keputusan IKU Dinas Pendidikan

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam tahun tertentu. Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2030.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 5-6 tahun) X 100%	86,5	Persen	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Rp. 530.155.630.247	Kepala Dinas
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	(Jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) X 100%	95,45	Persen			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-18 tahun) X 100%	58,74	Persen			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	(Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) X 100%	86,67	Persen	2. Program Pengelolaan Pendidikan	2. Rp. 189.317.073.761	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar) X 100%	100	Persen	3. Program Pengembangan Kurikulum	3. Rp. 36.296.000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama) X 100%	100	Persen	4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4. Rp. 66.440.000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk	63,02	Persen			

		Dini	Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) x 100%					
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar) x 100%	91,91	Persen			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) x 100%	74,37	Persen			
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	((Pilar Penilaian di Rapor Pendidikan dengan Nilai Baik)/(Total Pilar Penilaian) ) x 100%	81,26	Indeks			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat subkomponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50%	78,00	Nilai			Kepala Dinas
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	<b>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern =</b> $\sum ( \text{unsur kinerja utama} \times 40\% ) + ( \text{unsur kepatuhan} \times 30\% ) + ( \text{unsur pelayanan umum} \times 30\% )$	89,43	Persen	Program Penunjang Urusan	Rp. 530.155.630.247	Sekretaris

						Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang Tersusun	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 50.225.600	Kasubbag Perencanaan
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen SPIP	100	Persen			
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 516.204.145.647	Kasubbag Keuangan
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen			
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 289.105.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

	Ketentuan							
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.017.898.600	
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	$( (\text{Banyaknya Jenis Layanan yang telah Diberikan}) / (\text{Jumlah Total Layanan Yang Harus Diberikan}) ) \times 100\%$	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 10.294.219.000	
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	$(\text{Jumlah Laporan Pengadaan BMD yang Berhasil D}) / (\text{Jumlah Total Pengadaan BMD}) \times 100\%$	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 334.219.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	$( (\text{Total Jumlah Pemeliharaan BMD yang Dianggarkan}) / (\text{Total Realisasi Pemeliharaan BMD}) ) \times 100\%$	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 965.817.400	
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)- Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	$(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024} - \text{Jumlah ATS Tahun } N}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}}) \times 100\%$	1,65	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 19.988.528.700	

15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	<b>Indeks Pemerataan Guru (IPG)</b> $IPG = 1 - (\sum  G_i - G_i \text{ rata-rata}  / 2N)$ Dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G_i</math> = Jumlah guru di wilayah <math>i</math></li> <li>• <math>G_i \text{ rata-rata}</math> = Jumlah guru rata-rata per wilayah</li> <li>• <math>N</math> = Jumlah wilayah</li> </ul>	0,53	Indeks			dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	$(\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}) / (\text{Jumlah Total PTK Formal}) \times 100\%$	39,09	Persen			
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	73,11	Persen	2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.812.149.400	Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	$(\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}) / (\text{Total SP}) \times 100\%$	78,57	Persen			
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SP yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total SP}} \times 100\%$	100	Persen			
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah PNF/K yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total PNF/K}} \times 100\%$	100	Persen			
18	Meningkatnya Tata	Persentase Satuan	$\frac{\text{Jumlah PAUD dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total PAUD}}$	100	Persen	Pengelolaan	Rp.	Kasi

	Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.823.762.500	Pendidikan Anak Usia Dini
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	$(\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SD}}) \times 100\%$	11,78	Persen			
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	72,43	Nilai			
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Nilai Total Kebhinekaan dan Inklusivitas Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	69,20	Nilai			
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	$\Sigma$ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	1	Kurikulum			
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PNF/K dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total PNF/K}}$	100	Persen	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Rp. 16.758.552.400	Kasi Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
23	Meningkatnya	Persentase Peserta Didik	$(\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di PNF}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SD}}) \times 100\%$	4,58	Persen			

	kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	$K)/(Jumlah\ Seluruh\ Anak\ Tidak\ Mampu\ Usia\ PNF/K) \times 100\%$					
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	$\frac{Jlh\ masy.\ yang\ mendapatkan\ layanan\ pendidikan\ kesetaraan}{Jumlah\ total\ masy.\ sasaran\ pendidikan\ kesetaraan} \times 100\%$	59	Persen			
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	$\Sigma$ (Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan)	7	Satuan Pendidikan			
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Keamanan\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	73,42	Nilai			Kasi Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Kebhinekaan\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	60,5	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Inklusivitas\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	57,42	Nilai			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Keamanan\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	68,28	Nilai			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Kebhinekaan\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	65,27	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Inklusivitas\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	57,53	Nilai			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas	$\frac{Nilai\ Total\ Iklim\ Keamanan\ Peserta\ Didik}{Jumlah\ Peserta\ Didik\ yang\ Mengikuti\ ANBK} \times 100\%$	68,57	Nilai			

		Kesetaraan						
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	67,17	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	58,03	Nilai			
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) $\times 100\%$	40,22	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Rp. 7.067.626.200	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PNF/ K yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) $\times 100\%$	98,45	Persen	2. Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan 3. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan	2. Rp. 14.753.000 3. Rp. 19.000.000	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	$\frac{\text{Jumlah PTK PAUD dengan ijazah} \geq \text{S1/D4}}{\text{Total PTK PAUD}} \times 100\%$	66,04	Persen			
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$	1:1,12	Rasio			
		Rasio Pengawas Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$	1:16,04	Rasio			

	Kependidikan	terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini				Nonformal/Ke setaraan		
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)- Sekolah Dasar	$\left(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024} - \text{Jumlah ATS Tahun } N}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}}\right) \times 100\%$	7,11	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.Rp. 50.318.048.067	Kabid Pembinaan SD
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	$\left(\frac{\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}}{\text{Total SP}}\right) \times 100\%$	78,28	Persen			
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	64,18	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Numerasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	56,93	Nilai			
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Karakter Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	59,96	Nilai			
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SD yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total SD}} \times 100\%$	100	Persen	2.Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	2.Rp.19.150.000	
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	$\frac{\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total PTK Formal}} \times 100\%$	62,15	Persen			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	<p><b>Indeks Pemerataan Guru (IPG)</b></p> $\text{IPG} = 1 - \left(\frac{\sum  G_i - G_i \text{ rata-rata} }{2N}\right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G_i</math> = Jumlah guru di wilayah <math>i</math></li> <li>• <math>G_i \text{ rata-rata}</math> = Jumlah guru rata-rata per wilayah</li> <li>• <math>N</math> = Jumlah wilayah</li> </ul>	0,74	Indeks			

35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah SD dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total SD}}$	100	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Rp. 964.535.900	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	77,79	Nilai			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	72,40	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	61,98	Nilai			
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	$\Sigma$ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	2	Kurikulum			
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	$(\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di } (\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SD}) \times 100\%$	59,92	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Rp. 46.234.511.867	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Literasi Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang dinilai}} \times 100\%$	64,18	Persen			
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Numerasi Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang dinilai}} \times 100\%$	59,93	Persen			
		Persentase Peserta Didik	$\frac{\text{Jumlah PD Berprestasi Pada Semua Cabang Lomba}}{\text{Jumlah PD yang Mengikuti Ajang Lomba}} \times$	27,27	Persen			

		Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	100%						
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Karakter Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	79,62	Persen				
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) $\times$ 100%	20.10	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distriibusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$	1:1,05	Rasio	2. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	1.Rp. 3.119.000.300	Kasi PTK SD	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$ Dimana: • Jumlah Pengawas Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal	1:11,30	Rasio				2. Rp. 19.150.000
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Lihat hasil rapor pendidikan	0,69	Indeks				
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah PTK SD dengan ijazah} \geq \text{S1/D4}}{\text{Total PTK SD}} \times 100\%$	95,02	Persen				
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada		5,27	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan	1. Rp. 19.588.215.61	Kabid Pembinaan	

	Pendidikan	Jenjang Sekolah Menengah Pertama	$\left(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024}-\text{Jumlah ATS Tahun N}}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}}\right) \times 100\%$			Sekolah Menengah Pertama	0	SMP
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	$\left(\frac{\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}}{\text{Total SP}}\right) \times 100\%$	88,16	Persen			
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	74,32	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Numerasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	66,28	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Karakter Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	58,07	Nilai			
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SMP yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total SMP}} \times 100\%$	100	Persen	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2. Rp. 36.296.000	
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	$\frac{\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total PTK Formal}} \times 100\%$	62,08	Persen	3. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan	3. Rp. 28.290.000	
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	<p><b>Indeks Pemerataan Guru (IPG)</b></p> $\text{IPG} = 1 - \left(\frac{\sum  G_i - G_i \text{ rata-rata} }{2N}\right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G_i</math> = Jumlah guru di wilayah <math>i</math></li> <li>• <math>G_i \text{ rata-rata}</math> = Jumlah guru rata-rata per wilayah</li> <li>• <math>N</math> = Jumlah wilayah</li> </ul>	0,84				

						Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan		
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total SMP}}$	100	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Rp. 947.915.300	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	74,93	Nilai	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2. Rp. 36.296.000	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	72,20	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	63,41	Nilai			
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	$\Sigma$ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	1	Kurikulum			
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	$(\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di SMP}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SMP}}) \times 100\%$	38,90	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 17.149.600.910	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
53	Meningkatnya	Persentase satuan	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Literasi Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang dinilai}} \times 100\%$	74,32	Persen			Kasi Peserta

	Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik						Didik dan Pembangunan Karakter SMP
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Numerasi Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	66,28	Persen			
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	$\frac{\text{Jumlah PD Berprestasi Pada Semua Cabang Lomba}}{\text{Jumlah PD yang Mengikuti Ajang Lomba}} \times 100\%$	14,14	Persen			
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Karakter Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	69,51	Persen			Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) × 100%	51,53	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Rp. 1.490.699.400 0	Kasi PTK SMP
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$ Dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kepala Sekolah Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal</li> </ul>	1:1,03	Rasio	2. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan	2. Rp. 28.290.000	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$ Dimana:	1:7,6	Rasio			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pengawas Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal</li> </ul>			Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kese-taraan		
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Lihat hasil rapor pendidikan	0,86	Indeks			
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana SNP}}{\text{Jumlah Total Satuan Pendidikan yang Dinilai}} \times 100\%$	78,32	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Rp. 13.621.089.036	Kabid Sarana dan Prasarana
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar prasarana SN}}{\text{Jumlah Total Satuan Pendidikan yang Dinilai}} \times 100\%$	67,30	Persen	2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese-taraan 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Rp. 3.914.159.014 3. Rp. 47.297.545.966	
						4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Rp. 17.635.291.967	
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	60,37	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 47.297.545.966	
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	41,16	Persen			

		dengan kondisi lengkap dan baik						
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	76,99	Persen	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 13.621.089.036	Kasi Sarana Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	80,59	Persen			
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	100	Persen	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Rp. 3.914.159.014	Kasi Sarana Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	96,05	Persen			
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekola Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	75,94	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 17.635.291.967	Kasi Sarana dan Prasarana SMP
		Persentase satuan Pendidikan sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	51,39	Persen			

		menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
	76 % ≤ 90 %	Tinggi
	66 % ≤ 75 %	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50 %	Sangat Rendah

#### A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tujuan

Adapun realisasi tujuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Target Indikator Tujuan Perangkat Daerah

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.12	Tahun	8.15	100,37
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.07	Tahun	13.05	99,85

Berdasarkan pada tabel hasil di atas dapat di simpulkan bahwa pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), target yang ditetapkan sebesar 8,12 tahun, sementara realisasi mencapai 8,15 tahun, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,37%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan target yang direncanakan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas program perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, serta keberhasilan upaya pencegahan putus sekolah. Dengan melampaui target, indikator RLS memberikan sinyal positif terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu, pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), target yang ditetapkan sebesar 13,07 tahun, dengan realisasi sebesar 13,05 tahun, atau tingkat capaian 99,85%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, selisih yang sangat kecil (0,02 tahun) menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini tetap berada pada kategori sangat baik dan relatif stabil. Capaian ini menggambarkan bahwa peluang anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi tetap terjaga, meskipun masih terdapat tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tujuan Meningkatnya Kualitas Pendidikan telah terlaksana dengan sangat baik. Realisasi RLS yang melampaui target dan HLS yang hampir mencapai target mencerminkan konsistensi kebijakan pendidikan daerah dalam memperluas akses, meningkatkan keberlanjutan sekolah, serta memperkuat mutu layanan pendidikan. Ke depan, diperlukan penguatan intervensi pada jenjang pendidikan menengah untuk mendorong peningkatan HLS agar dapat melampaui target sebagaimana capaian pada indikator RLS.

## **A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	86,5	Persen	63,71	73,65	Sedang
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,45	Persen	94,13	98,62	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	58,74	Persen	66,03	112,41	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	86,67	Persen	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100	Persen	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100	Persen	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	63,02	Persen	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	91,91	Persen	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,37	Persen	N/A	N/A	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	81,26	Indeks	N/A	N/A	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00	Nilai	74,23	95,17	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	89,43	Persen	93,13	104,14	Sangat Tinggi
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)- Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,65	Persen	1,65	100	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0,53	Indeks	0,69	130,19	Sangat Tinggi
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	39,09	Persen	39,09	100	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	73,11	Persen	72,16	98,70	Sangat Tinggi
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	78,57	Persen	78,57	100	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal					
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	11,78	Persen	7,64	64,86	Rendah
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Din	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	72,43	Nilai	69,43	95,86	Sangat Tinggi
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	69,20	Nilai	68,20	98,55	Sangat Tinggi
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	1	Kurikulum	1	100	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,58	Persen	4,58	100	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	59	Persen	59	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	7	Satuan Pendidikan	7	100	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	73,42	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	60,5	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	57,42	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	68,28	Nilai	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	65,27	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	57,53	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	68,57	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	67,17	Nilai	N/A	N/A	
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	58,03	Nilai	N/A	N/A	
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	40,22	Persen	40,22	100	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	98,45	Persen	98,45	100	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	66,04	Persen	66,04	100	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	1:1,12	Rasio	1:1,09	102,74	Sangat Tinggi
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	1:10,2	Rasio	1:16,04	63,57	Rendah
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	7,11	Persen	7,12	100,14	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	78,28	Persen	78,28	100	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	64,18	Nilai	56,60	88,19	Tinggi
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	56,93	Nilai	48,79	85,70	Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	59,96	Nilai	58,46	97,50	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	62,15	Persen	62,15	100	Sangat Tinggi
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	0,74	Indeks	0,87	117,52	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	77,79	Nilai	73,11	93,98	Sangat Tinggi
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	72,40	Nilai	65,24	90,11	Tinggi
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	61,96	Nilai	57,52	92,80	Sangat Tinggi
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	2	Kurikulum	3	150	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	59,92	Persen	59,15	98,71	Sangat Tinggi
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	64,18	Persen	64,61	100,67	Sangat Tinggi
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	59,93	Persen	60,58	106,41	Sangat Tinggi
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	27,27	Persen	15	55	Rendah
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	79,62	Persen	75,33	94,61	Sangat Tinggi
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	20.10	Persen	20.10	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1:1,05	Rasio	1:1,05	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1:11,30	Rasio	1:11,30	100	Sangat Tinggi
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	0,69	Indeks	0,60	86,96	Tinggi
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	95,02	Persen	95,02	100	Sangat Tinggi
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	5,27	Persen	5,27	100	Sangat Tinggi
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	88,16	Persen	85,53	97,02	Sangat Tinggi
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	74,32	Nilai	83,31	112,10	Sangat Tinggi
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	66,28	Nilai	77,67	117,18	Sangat Tinggi
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	58,07	Nilai	58,07	100	Sangat Tinggi
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	62,08	Persen	62,08	100	Sangat Tinggi
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	0,84	Indeks	0,88	104,76	Sangat Tinggi
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	74,93	Nilai	73,43	98,00	Sangat Tinggi
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	72,20	Nilai	71,20	98,61	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	63,41	Nilai	61	96,20	Sangat Tinggi
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	1	Kurikulum	2	200	Sangat Tinggi
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	38,90	Persen	38,90	100	Sangat Tinggi
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	74,32	Persen	83,31	112,10	Sangat Tinggi
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	66,28	Persen	77,67	117,18	Sangat Tinggi
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	14,14	Persen	14,14	100	Sangat Tinggi
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	69,51	Persen	56,97	81,96	Tinggi
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	51,53	Persen	51,53	100	Sangat Tinggi
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1:1,03	Rasio	1:1,03	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1:7,6	Rasio	1:7,6	100	Sangat Tinggi
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	0,86	Indeks	0,86	100	Sangat Tinggi
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	78,32	Persen	78,32	100	Sangat Tinggi
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	67,30	Persen	67,30	100	Sangat Tinggi
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki	60,37	Persen	60,37	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	sarana dengan kondisi lengkap dan baik					
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	41,16	Persen	41,16	100	Sangat Tinggi
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	76,99	Persen	90	116,90	Sangat Tinggi
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	80,59	Persen	80,59	100	Sangat Tinggi
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	96,05	Persen	96,05	100	Sangat Tinggi
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekola Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	75,94	Persen	75,94	100	Sangat Tinggi
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	51,39	Persen	51,39	100	Sangat Tinggi

## 1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Dinas Pendidikan. Indikator kinerja untuk sasaran ini yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama, Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama yang merupakan indikator penting dalam mengukur dan memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi, lokasi geografis, atau kondisi fisik memiliki kemudahan, kesempatan, dan sarana yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

### 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 menunjukkan akses awal pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi anak usia pra-sekolah dalam layanan pendidikan PAUD/TK. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun ditargetkan sebesar 86,50% sebagai upaya meningkatkan akses dan partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD/TK. Namun demikian, realisasi capaian indikator pada tahun berjalan tercatat sebesar 63,71%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar 73,65%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anak usia pra-sekolah masih perlu ditingkatkan melalui perluasan akses layanan PAUD, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih optimal.

### 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 mencerminkan keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah pertama. Indikator ini menunjukkan sejauh mana anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah terlayani oleh sistem pendidikan formal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun ditetapkan dengan target sebesar 95,45% sebagai indikator keberhasilan akses pendidikan dasar yang merata. Pada pelaporan, realisasi indikator mencapai 94,13%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar 98,62%.

Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia wajib belajar relatif tinggi dan mendekati target, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjangkau seluruh anak usia 7–15 tahun agar memperoleh layanan pendidikan secara

penuh dan berkelanjutan.

### 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan

Indikator ini mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 kesetaraan berfungsi sebagai penopang sistem pendidikan formal dalam menjangkau anak putus sekolah dan kelompok rentan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun jalur kesetaraan ditetapkan dengan target sebesar 58,74% sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dan remaja di luar jalur formal. Pada tahun pelaporan, realisasi indikator mencapai 66,03%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 112,42%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan kesetaraan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat dan berkontribusi positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok usia 7–18 tahun. Tingginya realisasi APS kesetaraan mengindikasikan juga meningkatnya partisipasi anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan melalui Paket A, B, dan C, sebagai alternatif bagi peserta didik putus sekolah atau yang tidak tertampung di jalur pendidikan formal.

### 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator ini digunakan untuk menilai kecukupan fasilitas dan lembaga PAUD, namun perlu dikaji bersama APM untuk menilai ketepatan sasaran usia. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menunjukkan daya tampung layanan pendidikan anak usia dini dibandingkan dengan jumlah penduduk usia PAUD. Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena tidak memperhitungkan kesesuaian usia peserta didik. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditetapkan dengan target sebesar 86,67%. Namun, realisasi indikator belum diketahui karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga tingkat capaian kinerja belum dapat dihitung.

### 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar merupakan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat (tanpa membatasi usia) terhadap jumlah penduduk usia sekolah resmi (7-12 tahun) di suatu wilayah, dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dasar dalam menampung seluruh peserta didik SD tanpa mempertimbangkan usia. Nilai APK yang tinggi mencerminkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, namun juga dapat mengindikasikan adanya peserta didik yang masuk tidak tepat usia atau mengalami tinggal kelas. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar ditetapkan dengan target sebesar 100%.

Realisasi belum diketahui karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama

Indikator ini menunjukkan daya tampung pendidikan SMP/MTs terhadap populasi usia SMP. APK SMP mencerminkan kesiapan sistem pendidikan dalam menampung lulusan SD. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama ditetapkan dengan target sebesar 100%. Realisasi belum diketahui karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa baik akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini tercapai. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD menggambarkan persentase anak usia PAUD yang benar-benar bersekolah sesuai kelompok usia yang ditetapkan. Indikator ini menilai ketepatan sasaran layanan PAUD dan efektivitas program perluasan akses pendidikan usia dini. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditetapkan dengan target sebesar 63,02%. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. APM menggambarkan persentase anak usia resmi Sekolah Dasar (7–12 tahun) yang sedang bersekolah di SD atau yang sederajat dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. APM Sekolah Dasar ditetapkan dengan target sebesar 91,91%. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama menunjukkan persentase anak usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah di SMP atau yang sederajat dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini mencerminkan keberhasilan transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama. APM SMP ditetapkan dengan target sebesar 74,37%. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

## 2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Pengampu sasaran kinerja ini adalah Kepala Dinas Pendidikan. Indikator kinerja untuk sasaran ini yaitu Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin hak dasar warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun target Indeks SPM Bidang Pendidikan ditetapkan sebesar 81,26. Namun demikian, hingga akhir pelaporan, realisasi capaian indikator belum dapat disajikan karena data Indeks SPM Bidang Pendidikan belum dirilis dalam Rapor Pendidikan. Kondisi ini menyebabkan pengukuran capaian kinerja indikator tersebut belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

### 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Dinas Pendidikan. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat implementasi manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, ditetapkan target Nilai SAKIP sebesar 78,00 pada pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar 74,23, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 95,17%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, persentase capaian 95,17% mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja.

### 4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Sekretaris Dinas Pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan. Indeks ini menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban administrasi, efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan. Penilaian IKKI umumnya mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengelolaan aset, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kepatuhan terhadap standar layanan. Target Indeks Kepatuhan dan

Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan sebesar 89,43%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar 93,13%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 104,14%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja internal Dinas Pendidikan telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai realisasi yang lebih tinggi dari target mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban administrasi, efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik.

5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan, yang mengukur sejauh mana perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan RKPD), mengelola anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan evaluasi kinerja yang terstruktur dan terdokumentasi. Target sebesar 100%, dan hasil evaluasi menunjukkan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD), penganggaran, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian maksimal ini mencerminkan tingginya disiplin perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari penyusunan rencana strategis, penyesuaian anggaran dengan prioritas pembangunan, hingga evaluasi kinerja yang terdokumentasi secara sistematis.

6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan, yang mengukur sejauh mana dokumen SPIP disusun, diverifikasi, dan ditetapkan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Target indikator 100%, dan hasil evaluasi menunjukkan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen SPIP telah disusun, diverifikasi, dan ditetapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta seluruh proses koordinasi antarbidang telah berjalan dengan baik.

7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Pengampu sasaran kinerja ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan, yang mengukur sejauh mana seluruh proses administrasi keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan, pengelolaan kas, pertanggungjawaban, hingga pelaporan dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang

berlaku. Ditetapkan target sebesar 100%, dan realisasi menunjukkan 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan, pengelolaan kas, pertanggungjawaban, hingga pelaporan—telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Capaian maksimal ini mencerminkan konsistensi dan disiplin perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, pengendalian internal yang efektif, serta koordinasi antarbidang yang optimal.

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan, yang mengukur sejauh mana seluruh proses administrasi BMD mulai dari pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga pelaporan dilaksanakan sesuai standar, pedoman, dan regulasi yang berlaku. Ditetapkan target 100%, dan realisasi menunjukkan 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi BMD di perangkat daerah telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset.

9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kepegawaian selama periode pelaporan, seluruh proses administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh administrasi kepegawaian perangkat daerah telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya deviasi atau ketidaksesuaian.

10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, serta akuntabel. Administrasi umum yang tertata dengan baik menjadi fondasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Dengan target

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi umum telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, tanpa adanya kekurangan yang signifikan.

#### 11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Indikator sasaran kinerja ini berupa Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang perangkat daerah yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jasa penunjang yang optimal berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, efisien, dan produktif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh jasa penunjang pelayanan umum telah tersedia dan berfungsi secara optimal, tanpa kendala yang berdampak signifikan terhadap kinerja perangkat daerah.

#### 12. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan. Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang perangkat daerah sesuai dengan rencana kebutuhan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengadaan yang terencana dan tepat sasaran memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, efektif, dan efisien. Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan barang penunjang perangkat daerah telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tanpa adanya deviasi dari rencana kebutuhan.

#### 13. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Indikator sasaran kinerja ini adalah Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai dengan Rencana Pemeliharaan. Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang perangkat daerah sesuai dengan rencana pemeliharaan merupakan upaya strategis dalam menjaga kondisi dan fungsi aset agar tetap optimal serta memiliki masa manfaat yang sesuai dengan ketentuan. Pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan juga mendukung

efisiensi anggaran serta mencegah terjadinya kerusakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aset daerah yang direncanakan untuk dipelihara telah ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai perencanaan, tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan yang signifikan.

#### 14. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Indikator sasaran kinerja berupa Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui layanan pendidikan nonformal dan program kesetaraan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses jalur pendidikan formal. Berdasarkan hasil evaluasi, persentase penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jalur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1,65%. Realisasi sebesar 1,65% menunjukkan bahwa berbagai program dan intervensi yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

#### 15. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Bersertifikat Pendidik. Upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan langkah strategis dalam menjamin layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Pemerataan tenaga pendidik memastikan setiap satuan PAUD memiliki jumlah guru yang proporsional sesuai kebutuhan, sedangkan peningkatan kualitas dilakukan melalui pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.

##### 1.1 Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemerataan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan faktor penting dalam menjamin akses layanan pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah. Indeks pemerataan guru menggambarkan tingkat distribusi tenaga pendidik pada satuan PAUD agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah atau satuan pendidikan. Berdasarkan hasil

evaluasi, realisasi indeks pemerataan guru PAUD mencapai 0,69 dari target 0,53, sehingga capaian kinerja sebesar 130,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi guru PAUD telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga kesenjangan ketersediaan guru antar satuan pendidikan semakin berkurang.

#### 1.2 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Bersertifikat Pendidik

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD menjadi prioritas dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan anak usia dini. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu indikator profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik sesuai standar nasional pendidikan. Realisasi persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang bersertifikat pendidik mencapai 39,09%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi melalui fasilitasi sertifikasi, pembinaan, dan pendampingan berjalan secara optimal.

### 16. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Meningkatnya kualitas kelembagaan satuan pendidikan merupakan bagian penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan yang terstandar, akuntabel, dan berkelanjutan. Indikator sasaran kinerja ini ada 2 indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B dan Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B. Kedua indikator ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat tata kelola dan mutu layanan satuan pendidikan, baik pada jenjang PAUD maupun pendidikan nonformal/kesetaraan.

#### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi standar mutu pada aspek kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Realisasi persentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B mencapai 72,16% dari target 73,11%, dengan capaian kinerja sebesar 98,70%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

#### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B

Satuan pendidikan nonformal/kesetaraan memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh jalur formal. Akreditasi minimal B menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menyelenggarakan layanan

pendidikan yang bermutu dan sesuai standar. Realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 78,57%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan nonformal/kesetaraan telah mampu memenuhi standar mutu kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 17. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal di satuan pendidikan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menanamkan nilai-nilai lokal yang relevan dengan karakteristik daerah. Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dan Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal.

### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Indikator ini menunjukkan sejauh mana PAUD mengimplementasikan kurikulum nasional dengan penyesuaian muatan lokal, seperti budaya, kearifan lokal, bahasa daerah, dan lingkungan sekitar. Penerapan kurikulum secara konsisten dan sesuai standar mendukung tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan relevan bagi anak usia dini. Realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Realisasi menunjukkan bahwa seluruh PAUD telah menerapkan Kurikulum Nasional beserta muatan lokal sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen tenaga pendidik dan pengelola PAUD dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai standar nasional sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya lokal.

### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Indikator ini menilai sejauh mana satuan pendidikan nonformal atau kesetaraan mengadopsi kurikulum nasional sekaligus menyesuaikannya dengan muatan lokal yang relevan. Penerapan kurikulum yang tepat di satuan nonformal memastikan peserta didik memperoleh pendidikan yang setara dengan jalur formal dan tetap menanamkan nilai-nilai lokal. Realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Semua satuan pendidikan nonformal/kesetaraan telah berhasil menerapkan kurikulum nasional dengan penyesuaian muatan lokal, sehingga peserta didik memperoleh pendidikan yang setara dengan jalur formal sekaligus tetap menanamkan nilai-nilai lokal.

## 18. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator sasaran kinerja berupa Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan. Adapun target untuk indikator ini sebesar 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%. Seluruh PAUD telah menyusun dan menyampaikan laporan administrasi serta keuangan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan tata kelola dan manajemen satuan pendidikan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

## 19. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Indikator ini menggambarkan tingkat akses dan partisipasi anak dari keluarga tidak mampu dalam memperoleh layanan pendidikan pada jenjang PAUD. Berdasarkan hasil pengukuran, ditetapkan target indikator sebesar 11,78%, dengan realisasi yang tercapai sebesar 7,64%. Dengan demikian, capaian kinerja berada pada angka 64,86% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu pada jenjang PAUD belum sepenuhnya optimal.

## 20. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Sasaran kinerja ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini.

### 1.1 Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator ini mengukur persepsi dan kondisi nyata terkait keamanan fisik maupun psikologis peserta didik dalam lingkungan PAUD, termasuk perlindungan dari perundungan, kekerasan, serta risiko lainnya. Target yang ditetapkan sebesar 72,43, dengan realisasi sebesar 69,43, sehingga capaian kinerja mencapai 95,86%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi iklim keamanan pada satuan PAUD secara umum sudah berada pada kategori baik dan mendekati target yang direncanakan.

### 1.2 Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator ini mengukur sejauh mana satuan PAUD mampu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kondisi khusus peserta didik, serta memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua

anak. Target indikator ditetapkan sebesar 69,20, dengan realisasi sebesar 68,20, sehingga capaian kinerja mencapai 98,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai kebhinekaan dan inklusivitas pada satuan PAUD telah berjalan sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target.

#### 21. Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah melalui muatan lokal yang relevan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan. Ditetapkan target sebanyak 1 kurikulum muatan lokal yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Realisasi yang dicapai adalah 1 kurikulum muatan lokal, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang PAUD telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan perencanaan.

#### 22. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini memiliki indikator Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai Ketentuan. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan pendidikan dalam menyusun dokumen administrasi dan laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada saat pelaporan, seluruh satuan pendidikan nonformal/kesetaraan telah memenuhi kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan administrasi serta keuangan sesuai ketentuan, sehingga realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian 100% ini mencerminkan semakin kuatnya sistem tata kelola dan manajemen pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

#### 23. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Indikator sasaran berupa Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Indikator ini mengukur persentase peserta didik tidak mampu yang terlayani dan terdaftar pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan dibandingkan dengan total sasaran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan data peserta didik yang

terverifikasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Realisasi indikator mencapai 4,58% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4,58%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai perencanaan.

## 24. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan serta memperluas akses dan ketersediaan penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan di masyarakat. Penguatan penyelenggaraan dilakukan melalui optimalisasi peran satuan pendidikan serta kemitraan dengan lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Sasaran ini mempunyai 2 indikator berupa Persentase Masyarakat yang Terlayani Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.

### 1.1 Persentase Masyarakat yang Terlayani Pendidikan Kesetaraan

Indikator ini mengukur tingkat pelayanan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dibandingkan dengan total sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 59% menunjukkan bahwa seluruh target layanan yang direncanakan telah tercapai secara optimal. Capaian 100% ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalnya koordinasi antara satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait.

### 1.2 Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan

Indikator ini mengukur jumlah pondok pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan sebagai bentuk perluasan akses layanan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan masyarakat. Realisasi sebanyak 7 satuan pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dan partisipasi aktif pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, sekaligus memperluas jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat.

## 25. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan kesetaraan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kebhinekaan pada seluruh jenjang (SD, SMP, dan SMA Kesetaraan). Pengukuran dilakukan melalui indikator nilai iklim satuan pendidikan yang mencerminkan kondisi keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas lingkungan belajar. Sasaran ini memiliki 9 indikator yaitu Nilai Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan, Nilai Kebhinekaan Sekolah Dasar

Kesetaraan, Nilai Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan, Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan, Nilai Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan dan Nilai Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan.

#### 1.1 Nilai Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan

Indikator ini mengukur tingkat keamanan lingkungan belajar pada SD Kesetaraan, termasuk aspek perlindungan peserta didik dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, serta terciptanya suasana belajar yang tertib dan nyaman. Adapun target yang ditetapkan sebesar 73,42. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.2 Nilai Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan

Indikator ini mengukur sejauh mana nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan diterapkan dalam lingkungan SD Kesetaraan. Adapun target indikator sebesar 60,05. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.3 Nilai Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan

Indikator ini menilai keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan dalam memberikan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok rentan. Adapun target 57,42 dengan hasil realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.4 Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan

Indikator ini mengukur persepsi dan kondisi nyata keamanan lingkungan belajar pada SMP Kesetaraan. Adapun target indikator yang ditetapkan 68,28, Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.5 Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan

Indikator ini menilai penerapan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman pada jenjang SMP Kesetaraan. Dari target indikator sebesar 65,27 akan tetapi realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.6 Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan

Indikator ini mengukur sejauh mana SMP Kesetaraan memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik. Target indikator yang ditetapkan sebesar 57,53. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung..

#### 1.7 Nilai Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan

Indikator ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar pada SMA Kesetaraan. Adapun target indikator yang ditetapkan 68,57. Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.8 Nilai Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan

Indikator ini menilai penguatan nilai kebhinekaan di jenjang SMA Kesetaraan. Target yang ditetapkan yaitu 67,17 dengan realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

#### 1.9 Nilai Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan

Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan dan kesetaraan akses pendidikan pada SMA Kesetaraan. Adapun target indikator yang ditetapkan sebesar 58,03 Namun realisasi belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

### 26. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidika dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui penguatan kapasitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Indikator sasaran berupa Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Ditingkatkan Kompetensinya. Indikator ini mengukur persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang telah mengikuti dan memperoleh peningkatan kompetensi dibandingkan dengan total sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaporan, realisasi indikator mencapai 40,22% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 40,22%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

### 27. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidika dan Tenaga Kependidikan PAUD dan

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator sasaran berupa Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Ditingkatkan Kompetensinya. Indikator ini mengukur persentase pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dibandingkan dengan total sasaran yang ditetapkan.

Pada pelaporan, realisasi indikator mencapai 98,45% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 98,45%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan secara optimal dan hampir seluruh pendidik serta tenaga kependidikan sasaran telah terfasilitasi.

#### 28. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidika dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pemenuhan kualifikasi akademik minimal S1/D4 bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator sasaran berupa Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi Minimal S1/D4. Indikator ini mengukur persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 dibandingkan dengan total pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Data diperoleh melalui pendataan dan verifikasi kualifikasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada pelaporan, realisasi indikator mencapai 66,04% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 66,04%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualifikasi akademik telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ditetapkan.

#### 29. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidika dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Rasio Pengawas terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

##### 1.1 Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini mengukur ketersediaan kepala sekolah dibandingkan jumlah satuan PAUD. Rasio yang ideal memastikan setiap satuan pendidikan memiliki kepemimpinan yang memadai untuk mengelola proses pembelajaran dan administrasi secara efektif.

Realisasi 1:1,09 menunjukkan bahwa rasio kepala sekolah lebih baik dari target (lebih sedikit PAUD per kepala sekolah), sehingga setiap satuan pendidikan mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang optimal. Capaian ini mencerminkan distribusi kepala sekolah yang memadai dalam mendukung manajemen dan kualitas pendidikan PAUD.

## 1.2 Rasio Pengawas terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini mengukur ketersediaan pengawas PAUD dibandingkan jumlah satuan pendidikan. Pengawas berperan penting dalam memastikan standar mutu pendidikan dan pembinaan pendidik. Target indikator 1:10,2 dengan realisasi 1:16,04 menunjukkan bahwa jumlah satuan PAUD per pengawas lebih tinggi dibanding target, artinya pengawas membawahi lebih banyak satuan pendidikan daripada yang direncanakan. Hal ini menjadi perhatian karena dapat berdampak pada efektivitas pengawasan dan pembinaan pendidik, sehingga capaian rasio pengawas belum optimal dan perlu upaya penyesuaian distribusi pengawas untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

### 30. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dengan menurunkan jumlah anak yang tidak bersekolah (ATS) pada jenjang SD. Adapun indikator sasaran berupa Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar (SD). Indikator ini mengukur persentase pengurangan anak tidak sekolah dibandingkan dengan jumlah ATS pada periode sebelumnya. Realisasi penurunan sebesar 7,12% sedikit melebihi target 7,11%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,14%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak, serta efektifnya upaya intervensi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

### 31. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan reputasi kelembagaan satuan pendidikan melalui pencapaian akreditasi minimal B. Indikator sasaran yaitu Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B. Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan yang telah berhasil memperoleh akreditasi minimal B dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang ada. Pada pelaporan, realisasi indikator mencapai 78,28%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 78,28%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh upaya pembinaan, pendampingan, dan evaluasi akreditasi telah berhasil diterapkan secara optimal.

### 32. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Sasaran kinerja ini memiliki 3 indikator yaitu Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar (SD).

#### 1.1 Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Indikator ini mengukur kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks peserta didik SD. Target indikator 64,18 dan realisasi 56,60 menunjukkan capaian sebesar 88,19% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah menguasai kemampuan literasi dengan baik, meskipun masih ada ruang peningkatan untuk mencapai target penuh.

#### 1.2 Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Indikator ini mengukur kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Pada indikator Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD, ditetapkan target sebesar 56,93 dengan realisasi sebesar 48,79 sehingga capaian kinerja mencapai 85,70%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, persentase capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan numerasi telah berjalan cukup baik.

#### 1.3 Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Indikator ini mengukur perkembangan karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai integritas, kemandirian, gotong royong, religiusitas, dan nasionalisme sebagaimana ditekankan dalam kebijakan penguatan pendidikan karakter. Pada indikator Nilai Rerata Karakter Peserta Didik SD, target yang ditetapkan sebesar 59,96 dengan realisasi sebesar 58,46 dan capaian 97,50%. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan mendekati target yang direncanakan.

### 33. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) melaksanakan kurikulum nasional secara utuh dan konsisten, sekaligus mengintegrasikan muatan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Indikator Kinerja berupa Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar telah mengimplementasikan kurikulum nasional dan muatan lokal sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

#### 34. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional di seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Indikator kinerja pada sasaran ini ada 2 yaitu Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dan Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar.

##### 1.1 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik

Pada indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik, ditetapkan target sebesar 62,15% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 62,15%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi pendidik telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

##### 1.2 Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar

Pada indikator Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar, ditetapkan target sebesar 0,74 dengan realisasi sebesar 0,87 sehingga capaian kinerja mencapai 117,52%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa distribusi guru antar satuan pendidikan semakin merata dan proporsional.

#### 35. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai Ketentuan. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan pendidikan dalam menyusun dan menyampaikan laporan administrasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar telah menyusun dan menyampaikan laporan administrasi serta laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 36. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Untuk mengukur capaian sasaran ini, digunakan tiga indikator kinerja, yaitu Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar, dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar.

### 1.1 Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar

Pada indikator Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar, ditetapkan target sebesar 77,79 dengan realisasi sebesar 73,11 sehingga capaian kinerja mencapai 93,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan di lingkungan sekolah secara umum berada dalam kategori baik dan mendekati target yang ditetapkan.

### 1.2 Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar

Pada indikator Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar, target yang ditetapkan sebesar 72,40 dengan realisasi sebesar 65,24 sehingga capaian mencapai 90,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial di lingkungan sekolah telah terbangun dengan baik.

### 1.3 Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar

Pada indikator Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar, target sebesar 61,96 dengan realisasi 57,52 sehingga capaian mencapai 92,80%. Capaian ini menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menciptakan lingkungan yang terbuka dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang berbeda.

## 37. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Sasaran kinerja ini merupakan bagian strategis dalam upaya meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar (SD). Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi, target yang ditetapkan sebanyak 2 kurikulum muatan lokal. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebanyak 3 kurikulum muatan lokal, sehingga capaian kinerja mencapai 150%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

## 38. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar” merupakan tanggung jawab Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. Sasaran ini difokuskan pada upaya memperluas akses layanan pendidikan dasar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat bersekolah tanpa terhambat faktor ekonomi. Melalui sasaran ini,

diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan, angka partisipasi sekolah meningkat, serta tercipta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh anak usia sekolah dasar. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah pada Jenjang Sekolah Dasar. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 59,92%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 59,15%. Dengan demikian, capaian kinerja berada pada angka 98,71%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, meskipun selisihnya relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi dan optimalisasi program dukungan bagi peserta didik tidak mampu.

### 39. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. Pengukuran sasaran ini dilakukan melalui tiga indikator kinerja, yaitu Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik, Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik, dan Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik.

#### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik

Pada indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik, target yang ditetapkan sebesar 64,18 dengan realisasi 64,61 sehingga capaian kinerja mencapai 100,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik berada pada kategori baik dan telah melampaui target yang ditetapkan.

#### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik

Pada indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik, target sebesar 59,93 dengan realisasi 60,58 sehingga capaian kinerja mencapai 106,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik tidak hanya mencapai target, tetapi melampauinya.

#### 1.3 Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik

Pada indikator Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik, target ditetapkan sebesar 27,27% namun realisasi yang dicapai hanya 15%, sehingga capaian berada pada angka 55%. Capaian ini menunjukkan bahwa prestasi peserta didik, baik di bidang akademik maupun non-akademik, masih berada di bawah target yang ditetapkan. Rendahnya capaian dapat disebabkan oleh keterbatasan fasilitasi kegiatan kompetisi, minimnya pembinaan intensif untuk peserta didik berbakat, serta kesenjangan sumber daya antara sekolah satu dengan yang lain.

#### 40. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. Sasaran kinerja ini merupakan salah satu fokus utama dalam upaya membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, tangguh, dan beretika. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 79,62% satuan pendidikan, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 75,33% satuan pendidikan, sehingga capaian kinerja mencapai 94,61%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah berhasil menerapkan program pendidikan karakter secara efektif, meskipun masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang perlu mendapatkan pendampingan lebih intensif.

#### 41. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 20,10% dan realisasi yang dicapai sama-sama sebesar 20,10%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan sesuai perencanaan, dengan seluruh sasaran yang ditetapkan berhasil dijangkau.

#### 42. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. Sasaran kinerja ini menjamin ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang profesional di seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari tiga indikator, yaitu Rasio Kepala Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Rasio Pengawas Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar.

##### 1.1 Rasio Kepala Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Target rasio yang ditetapkan adalah 1:1,05 dan realisasi yang dicapai juga 1:1,05 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap satuan pendidikan SD telah memiliki kepala sekolah sesuai kebutuhan, sehingga manajemen dan kepemimpinan di tingkat sekolah dapat berjalan optimal.

##### 1.2 Rasio Pengawas Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Target rasio 1:11,30 dan realisasi yang dicapai sama, yaitu 1:11,30, sehingga

capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah telah tersedia sesuai kebutuhan untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan manajemen sekolah.

### 1.3 Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar

Target indeks distribusi guru ditetapkan sebesar 0,69, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,60, sehingga capaian kinerja berada pada angka 86,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi guru di beberapa wilayah belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan guru dan ketersediaan di satuan pendidikan tertentu, terutama di daerah terpencil atau dengan kondisi geografis sulit.

#### 43. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi akademik yang memadai sesuai standar nasional pendidikan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 95,02% dan realisasi yang dicapai sama-sama sebesar 95,02%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendidik dan tenaga kependidikan telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang ditetapkan, sehingga kompetensi akademik mereka sejalan dengan kebutuhan pendidikan dasar yang berkualitas.

#### 44. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini merupakan upaya meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 5,27% dan realisasi yang dicapai sama, yaitu 5,27%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat telah berjalan sesuai rencana dan berhasil menurunkan jumlah anak yang tidak bersekolah sesuai target yang ditetapkan.

#### 45. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini merupakan upaya strategis dalam memastikan seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki kelembagaan yang profesional, terstandarisasi, dan

mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 88,16% dan realisasi yang dicapai sebesar 85,53%, sehingga capaian kinerja mencapai 97,02%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP telah memenuhi standar akreditasi minimal B, meskipun masih terdapat sedikit selisih dari target yang ditetapkan.

#### 46. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini merupakan upaya meningkatkan prestasi akademik, kemampuan dasar, dan pembentukan karakter peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari tiga, yaitu Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.

##### 1.1 Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Target yang ditetapkan sebesar 74,32, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 83,31 sehingga capaian kinerja mencapai 112,10%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kemampuan literasi peserta didik yang sangat signifikan, melebihi target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas program literasi, integrasi literasi dalam pembelajaran, serta pendampingan guru dalam membimbing peserta didik untuk membaca kritis dan memahami berbagai teks secara mendalam.

##### 1.2 Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 66,28 dan realisasi mencapai 77,67 sehingga capaian kinerja sebesar 117,18%. Hasil ini menunjukkan kemampuan numerasi peserta didik meningkat jauh di atas target, yang mengindikasikan keberhasilan strategi pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah, penggunaan asesmen diagnostik, serta penguatan keterampilan berpikir logis dan analitis melalui kegiatan pembelajaran yang beragam.

##### 1.3 Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Target indikator ditetapkan sebesar 58,07 dan realisasi sama, yaitu 58,07 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter peserta didik berjalan sesuai target, mencakup pembiasaan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

#### 47. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini merupakan upaya untuk memastikan seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal. Pada pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh SMP telah berhasil menerapkan kurikulum sesuai ketentuan, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal.

#### 48. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional serta merata di seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari dua indikator, yaitu Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dan Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama.

##### 1.1 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik

Target indikator sebesar 62,08% dan realisasi yang dicapai sama-sama 62,08%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran telah memiliki sertifikasi pendidik sesuai standar, yang mencerminkan profesionalisme dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pembelajaran di SMP.

##### 1.2 Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 0,84 dan realisasi yang dicapai sebesar 0,88, sehingga capaian kinerja mencapai 104,76%. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi guru di SMP telah melebihi target pemerataan yang ditetapkan, menandakan keberhasilan upaya penataan dan penempatan guru secara strategis di seluruh wilayah. Distribusi guru yang merata memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai, sehingga pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik dapat terwujud.

#### 49. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki sistem manajemen dan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan. Pada

pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian maksimal ini menunjukkan bahwa seluruh SMP telah melaksanakan administrasi dan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

## 50. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari tiga indikator, yaitu: Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama.

### 1.1 Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 74,93 dan realisasi yang dicapai 73,43 sehingga capaian kinerja mencapai 98%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di SMP berada pada level yang sangat baik, meskipun masih terdapat sedikit ruang perbaikan.

### 1.2 Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 72,20 dan realisasi 71,20 sehingga capaian kinerja mencapai 98,61%. Capaian ini menunjukkan bahwa sekolah telah berhasil menciptakan iklim yang menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan latar belakang peserta didik.

### 1.3 Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 63,41 dan realisasi yang dicapai 61 sehingga capaian kinerja 96,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar SMP secara umum sudah inklusif, memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat berpartisipasi secara optimal.

## 51. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan kurikulum yang diterapkan tidak hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Ditetapkan Sesuai Dengan Kebutuhan. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebanyak 1 kurikulum, namun realisasi mencapai 2 kurikulum, sehingga capaian kinerja mencapai 200%. Hasil ini menunjukkan bahwa

pengembangan kurikulum muatan lokal tidak hanya tercapai sesuai target, tetapi bahkan melampaui harapan.

#### 52. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak, khususnya peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 38,90% dan realisasi yang dicapai juga 38,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian maksimal ini menunjukkan keberhasilan program peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu.

#### 53. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik peserta didik secara menyeluruh. Adapun indikator kinerja pada sasaran ini ada 3 indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Nilai Literasi Baik, Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Nilai Numerasi Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Beprestasi Akademik dan Non Akademik.

##### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Nilai Literasi Baik

Target indikator sebesar 74,32 dan realisasi yang dicapai 83,31, sehingga capaian kinerja mencapai 112,10%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP telah berhasil meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di atas target, yang mencerminkan keberhasilan strategi penguatan literasi melalui pembelajaran berbasis teks, program membaca, dan pendampingan guru.

##### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Nilai Numerasi Baik

Target indikator sebesar 66,28 dan realisasi mencapai 77,67 sehingga capaian kinerja mencapai 117,18%. Hasil ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan kemampuan numerasi peserta didik, melalui strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah, penggunaan asesmen diagnostik, dan penguatan keterampilan berpikir logis dan analitis.

##### 1.3 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Beprestasi Akademik dan Non Akademik

Target indikator sebesar 14,14% dan realisasi sama, yaitu 14,14%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa program pembinaan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, telah berjalan sesuai target. Keberhasilan ini didukung oleh pembinaan ekstrakurikuler, kompetisi tingkat sekolah dan daerah, serta pendampingan guru untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

#### 54. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Nilai Karakter Baik. Pada pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 69,51% sedangkan realisasi yang dicapai 56,97%, sehingga capaian kinerja mencapai 81,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar SMP telah melaksanakan program pengembangan karakter, capaian aktual masih berada di bawah target.

#### 55. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan administrasi pendidikan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang Meningkatkan Kompetensinya. Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 51,53% dan realisasi yang dicapai juga 51,53%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh program peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan telah terlaksana sesuai target.

#### 56. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan merata di seluruh SMP, sehingga setiap sekolah memiliki kapasitas optimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Sasaran ini memiliki 3 indikator yaitu Rasio Kepala Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Rasio Pengawas Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama.

##### 1.1 Rasio Kepala Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 1:1,03 dan realisasi yang dicapai 1:1,03 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap SMP memiliki kepala sekolah sesuai rasio yang ditetapkan, menjamin kepemimpinan yang optimal dalam manajemen dan pembinaan sekolah.

#### 1.2 Rasio Pengawas Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 1:7,6 dan realisasi yang dicapai 1:7,6 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap SMP telah dilaksanakan sesuai standar, sehingga setiap sekolah mendapatkan pendampingan dan monitoring yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah.

#### 1.3 Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama

Target indikator sebesar 0,86 dan realisasi yang dicapai 0,86 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi guru di SMP telah merata sesuai kebutuhan, memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang cukup dan kompeten untuk mendukung proses pembelajaran.

### 57. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Yang Memiliki Sarana Pembelajaran Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Persentase Satuan Pendidikan Yang Memiliki Prasarana Pembelajaran Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Yang Memiliki Sarana Pembelajaran Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Target indikator sebesar 78,32% dan realisasi yang dicapai 78,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan sebagian besar sekolah telah memiliki sarana pembelajaran yang sesuai standar.

#### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Yang Memiliki Prasarana Pembelajaran Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Target indikator sebesar 67,30% dan realisasi yang dicapai 67,30%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh prasarana yang menjadi sasaran telah terpenuhi sesuai standar, memastikan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya tersedia dan layak digunakan.

## 58. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap Sekolah Dasar (SD) memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, layak, dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Sasaran kinerja ini memiliki 2 Indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik.

### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 60,37% dan realisasi yang dicapai juga 60,37%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh SD sasaran telah memiliki sarana pembelajaran yang lengkap dan dalam kondisi baik, mendukung proses belajar mengajar secara efektif.

### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 41,16% dan realisasi yang dicapai 41,26%, sehingga capaian kinerja juga mencapai 100%. Capaian ini menegaskan bahwa prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, gedung, dan fasilitas pendukung lainnya, telah tersedia dengan baik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lancar dan aman bagi peserta didik.

## 59. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan PAUD memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, layak, dan mendukung proses belajar mengajar bagi anak usia dini. Sasaran kinerja ini memiliki 2 Indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik.

### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 76,99% dan realisasi yang dicapai 90%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,90%. Hasil ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana di PAUD telah melebihi target, mencerminkan keberhasilan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana yang mendukung proses pembelajaran anak usia dini.

## 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 80,59% dan realisasi sama, yaitu 80,59%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prasarana pendukung, termasuk ruang belajar, area bermain, dan fasilitas pendukung lainnya, telah tersedia sesuai standar, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak untuk anak-anak PAUD.

## 60. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan pendidikan nonformal atau kesetaraan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, layak, dan mendukung proses pembelajaran. Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari dua indikator, yaitu: Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik.

### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 100% dan realisasi yang dicapai 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan sebagian besar satuan pendidikan nonformal/kesetaraan telah memiliki sarana yang lengkap dan baik.

### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 96,05% dan realisasi yang dicapai sama, yaitu 96,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan telah tersedia dengan baik dan memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.

## 61. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini di ampu oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap SMP memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, layak, dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu Persentase Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik.

#### 1.1 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Memiliki Sarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 75,94% dan realisasi yang dicapai sama, yaitu 75,94%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh SMP telah memiliki sarana pembelajaran yang lengkap dan dalam kondisi baik, mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

#### 1.2 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Memiliki Prasarana Dengan Kondisi Lengkap dan Baik

Target indikator sebesar 51,39% dan realisasi yang dicapai juga 51,39%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menegaskan bahwa prasarana pendukung, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, telah tersedia dan layak digunakan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

### **A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2030. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	63,71	73,65	54,44	54,44	57,03	89,25	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	94,13	98,62	99,03	99,14	91,90	92,05	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	66,03	112,41	96	107,86	72,93	82,01	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	N/A	70,07	108,23	91,26	141,88	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	N/A	106,64	106,64	110,35	110,35	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	N/A	108,45	120,76	81,76	92,45	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	N/A	94,59	95,23	99,03	99,91	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	N/A	77,77	97,09	71,73	92,42	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	78,76	N/A	73,52	N/A	Belum Menjadi Indikator
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,23	95,17	77,43	N/A	77,41	N/A	Belum Menjadi Indikator
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	Persen	93,13	104,14	88,72	119,89	78.09	105.53	
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen	Persentase Dokumen SPIP	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	SPIP	sesuai ketentuan								Indikator
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat	Persen	100	100	100	100	24	100	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Daerah yang Berkualitas	Daerah yang Berkualitas								
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	Persen	100	100	100	100	95	100	
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)- Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	1,65	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks	0,69	130,19	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	Persen	39,09	100	16	53,33	27.60	100	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	Persen	72,16	98,70	71,43	102,36	58,84	117,42	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,57	100	75	100	73.07	100	
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang	Persen	7,64	64,86	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini								
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Din	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	69,43	95,86	60,46	N/A	50,84	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	68,20	98,55	71,93	N/A	69,89	N/A	Belum Menjadi Indikator
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	4,58	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Nonformal/Kesetaraan									
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	Persen	59	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Satuan Pendidikan	7	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	72,42	N/A	65,06	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	57,5	N/A	60,57	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	54,92	N/A	50,34	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	67,06	N/A	67,25	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	63,27	N/A	62,92	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	55,03	N/A	53,36	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	67,37	N/A	67,9	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	65,17	N/A	61,39	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	N/A	55,53	N/A	54,67	N/A	Belum Menjadi Indikator
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	40,22	100	72,91	145,82	50,00	100	
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	98,45	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal	Persen	66,04	100	48,03	48,03	82,00	82,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Tenaga Kependidikan	S1/D4								
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	1:1,09	102,74	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	1:16,04	63,57	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	Persen	7,12	100,14	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,28	100	60,0	92,31	100	100	
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	56,60	88,19	61,67	N/A	57,81	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	48,79	85,70	54,03	N/A	45,9	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	58,46	97,50	58,46	N/A	58,53	N/A	Belum Menjadi Indikator
33	Meningkatnya	Presentase Satuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal								Indikator
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	Persen	62,15	100	56,77	94,62	52.00	91.60	
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,87	117,52	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	Nilai	73,11	93,98	76,89	N/A	74,84	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	Nilai	65,24	90,11	71,40	N/A	72,56	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	Nilai	57,52	92,80	59,47	N/A	56,71	N/A	Belum Menjadi Indikator
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Kurikulum	3	150	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Sekolah Dasar									
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	59,15	98,71	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	Persen	64,61	100,67	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	60,58	106,41	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	15	55	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	Persen	75,33	94,61	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	Persen	20.10	100	50	100	50.00	100	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Kependidikan Sekolah Dasar	ditingkatkan kompetensinya								
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1:1,05	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1:11,30	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,60	86,96	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	95,02	100	98,18	98,18	100	100	
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	5,27	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	85,53	97,02	85,53	114,04	80.00	133.33	
46	Meningkatnya Kualitas	Nilai Rerata Kemampuan	Nilai	83,31	112,10	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Peserta Didik	Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								Indikator
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	77,67	117,18	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	58,07	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	Persen	62,08	100	56,49	88,27	62.15	97.29	
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama		0,88	104,76	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
50	Meningkatnya Kualitas	Nilai Iklim Keamanan	Nilai	73,43	98,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
	Lingkungan Belajar	Sekolah Menengah Pertama								Indikator
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	Nilai	71,20	98,61	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	Nilai	61	96,20	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Kurikulum	2	200	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Persen	38,90	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	Persen	83,31	112,10	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan	Persen	77,67	117,18	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
		Nilai Numerasi Baik								
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	14,14	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	Persen	56,97	81,96	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	Persen	51,53	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1:1,03	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1:7,6	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,86	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	70,68	90,25	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	67,30	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	60,37	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	41,16	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	90	116,90	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini	Persen			N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
		yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik								Indikator
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	96,05	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	75,94	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	51,39	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Menjadi Indikator

Selama periode tahun 2023 sampai dengan 2025, capaian kinerja Dinas Pendidikan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada aspek aksesibilitas, mutu penyelenggaraan, serta tata kelola perangkat daerah.

Pada sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 57,03%, kemudian pada tahun 2024 sebesar 54,44%, dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 63,71%. Peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan partisipasi PAUD, meskipun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target optimal. APS usia 7–15 tahun relatif stabil dan berada pada kategori tinggi, yaitu 91,90% pada tahun 2023, meningkat menjadi 99,03% pada tahun 2024, dan berada pada 94,13% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar pada usia wajib belajar secara umum telah terjaga dengan baik. APS usia 7–18 kesetaraan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 96% dibandingkan 72,93% pada tahun 2023, namun pada tahun 2025 menurun menjadi 66,03%. Meskipun terjadi penurunan realisasi, capaian terhadap target tahun 2025 tetap melampaui 100%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan lebih rendah dibanding realisasi yang diperoleh.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami penurunan dari 91,26% pada tahun 2023 menjadi 70,07% pada tahun 2024, kemudian meningkat kembali menjadi 86,55% pada tahun 2025. APK Sekolah Dasar menunjukkan tren menurun dari 110,35% pada tahun 2023 menjadi 106,64% pada tahun 2024 dan 96,38% pada tahun 2025, namun masih berada pada kategori sangat baik. APK Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024 sebesar 108,45% dibanding 81,76% pada tahun 2023, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 94,31%.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar menunjukkan tren menurun dari 99,03% pada tahun 2023 menjadi 94,59% pada tahun 2024 dan 90,05% pada tahun 2025. APM Sekolah Menengah Pertama juga berfluktuasi, dari 71,73% pada tahun 2023 meningkat menjadi 77,77% pada tahun 2024, namun kembali turun menjadi 63,16% pada tahun 2025.

Pada sasaran Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan mengalami peningkatan dari 73,52 pada tahun 2023 menjadi 78,76 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan mutu layanan pendidikan. Data tahun 2025 belum tersedia karena Rapor Pendidikan belum rilis dari Kementerian.

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Nilai SAKIP menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada kategori baik, yaitu 77,41 pada tahun 2023,

77,43 pada tahun 2024, dan 74,23 pada tahun 2025. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir, capaian kinerja masih dalam kategori yang cukup baik.

Adapun pada sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah, Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 78,09% pada tahun 2023 menjadi 88,72% pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 93,13% pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan penguatan tata kelola internal dan kepatuhan administrasi yang semakin baik dari tahun ke tahun.

#### **A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir Renstra**

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2025-2030. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bertujuan untuk mengetahui kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan pencapaian periode akhir Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	63,71	100	63,71
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	94,13	97,79	96,26
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	66,03	74	89,23
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	87,17	99,29
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	100	96,38
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	100	94,31
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	68,02	95,90
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	94,17	95,62
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	76,19	82,90
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	93,76	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,23	90	82,48
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	Persen	93,13	93,00	100,14
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
	Ketentuan					
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	100
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	100
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	Persen	100	100	100
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)-Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	1,65	9,92	16,63
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks	0,69	0,48	143,75
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	39,09	46,94	83,28

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
		Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik				
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	Persen	72,16	82,00	88,00
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,57	100,00	78,57
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	100
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	100
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	7,64	54,82	13,94
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Din	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	69,43	74,93	92,66
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	68,2	71,70	95,12
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	1	1	100
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang	Persen	4,58	17,78	25,76

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
	bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	Persen	59	74,00	79,73
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Satuan Pendidikan	7	17	41,18
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	78,42	93,62
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	75,5	80,13
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	N/A	69,92	82,12
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	74,28	91,92
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	75,27	86,71
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	N/A	70,03	82,15
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	74,57	91,95
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	77,17	87,04
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	N/A	70,53	82,28
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	40,22	50,34	79,90

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	98,45	100,00	98,45
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	Persen	66,04	100,00	66,04
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	1 : 1,09	1 : 1	1,67
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	1 : 16,04	1:9,98	108,66
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	Persen	7,12	42,66	16,69
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,28	90,08	86,90
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	61,67	76,68	80,43
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	54,03	71,43	75,64
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	58,46	67,46	86,66
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	100,00
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	Persen	62,15	90	69,06
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,87	0,54	161,11
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100,00	100,00

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	Nilai	76,89	82,29	93,44
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	Nilai	71,4	77,40	92,25
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	Nilai	59,48	74,48	79,86
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Kurikulum	3	4	75,00
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	59,15	75,05	38,49
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	Persen	64,61	76,68	84,26
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	60,58	71,43	84,81
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	15	27,45	54,65
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	Persen	75,33	100,00	75,33
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	20,1	45,76	43,92
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distriibusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1 : 1,05	1 : 1	1,67
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1 :11,30	1 :10,08	101,74
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,6	0,84	71,43
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	95,02	100,00	95,02
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah	Persen	5,27	31,63	16,66

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
	Dalam Pendidikan	(ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama				
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	85,53	100,00	85,53
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	83,31	79,82	104,37
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	77,67	73,78	105,27
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	58,07	65,57	88,56
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	100,00
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	Persen	62,08	90	68,98
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,88	0,74	118,92
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100,00	100,00
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	Nilai	73,43	82,43	89,08
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	Nilai	71,2	77,20	92,23
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	Nilai	61	75,41	80,89
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan	Kurikulum	2	1	200,00

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
	Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Sesuai dengan Kebutuhan				
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Persen	38,9	63,37	61,38
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	Persen	83,31	79,82	104,37
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	77,67	73,78	105,27
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	14,14	14,14	99,97
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	Persen	56,97	100,00	56,97
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	Persen	51,53	74,79	68,90
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1 : 1,03	1 : 1	1,67
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1 : 7,6	1 : 7,6	100,00
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,86	0,91	94,51
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	70,68	84,56	83,58
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar	Persen	67,3	80,54	83,56

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
		Nasional Pendidikan (SNP)				
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	60,37	65,67	91,93
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	41,16	54,03	76,18
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	90	90,58	99,36
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	80,59	100	80,59
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	100	100	96,05
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	96,05	100	96,05
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	75,94	82,00	92,61
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	51,39	68,13	75,43

Pada sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan, capaian tahun 2025 menunjukkan kemajuan menuju target akhir Renstra 2030, meskipun belum seluruhnya optimal. APS usia 5–6 tahun terealisasi sebesar 63,71% dari target 100% (63,71%). APS usia 7–15 tahun mencapai 94,13% dari target 97,79% atau sebesar 96,26% dari target akhir. APS usia 7–18 kesetaraan mencapai 66,03% dari target 74% (89,23%). Untuk APK, PAUD data realisasi tahun 2025 belum tersedia di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan laporan ini dibuat, dengan target akhir Renstra 87,17%, APK SD data realisasi tahun 2025 belum tersedia di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan laporan ini dibuat, dengan target akhir Renstra 100%, dan APK SMP data realisasi tahun 2025 belum tersedia di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan laporan ini dibuat, dengan target akhir Renstra 100%. Sementara itu, APM PAUD dari target 68,02%, APM SD dari target 94,17%, dan APM SMP dari target 76,19% (82,90%) data realisasi tahun 2025 belum tersedia di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan laporan ini dibuat.

Pada sasaran Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan, data realisasi tahun 2025 untuk Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum tersedia di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan laporan ini dibuat, dengan target akhir Renstra sebesar 93,76.

Adapun pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Nilai SAKIP tahun 2025 tercatat sebesar 74,23 dari target akhir 90, atau telah mencapai 82,48% dari target Renstra 2030. Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik menuju target akhir periode, meskipun beberapa indikator masih memerlukan percepatan peningkatan.

#### A. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan standar provinsi bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar lebih baik/kurang baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan standar provinsi sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	63,71	N/A	69,12
		Angka Partisipasi	Persen	94,13	96,48	98,29

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
		Sekolah (APS) 7 - 15				
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	66,03	N/A	29,84
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	44,1	N/A
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	106,34	N/A
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	93,2	N/A
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	N/A	N/A
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	97,79	N/A
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	78,54	N/A
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,23	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	Persen	93,13	N/A	N/A
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	N/A	N/A
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	Persen	100	N/A	N/A
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	Persen	100	N/A	N/A
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)- Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	1,65	N/A	N/A
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks	0,69	N/A	N/A
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	Persen	39,09	N/A	N/A
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	Persen	72,16	N/A	N/A
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,57	N/A	N/A
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	N/A	N/A
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	N/A	N/A
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	7,64	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
	Dini					
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	69,43	N/A	N/A
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	68,2	N/A	N/A
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	1	N/A	N/A
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	4,58	N/A	N/A
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	Persen	59	N/A	N/A
		Jumlah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Satuan Pendidikan	7	N/A	N/A
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	73,42	N/A	N/A
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	60,5	N/A	N/A
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	57,42	N/A	N/A
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	68,28	N/A	N/A
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	65,27	N/A	N/A
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	57,53	N/A	N/A
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	68,57	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	67,17	N/A	N/A
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	58,03	N/A	N/A
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	40,22	N/A	N/A
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	98,45	N/A	N/A
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	Persen	66,04	N/A	N/A
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	01:01,1	N/A	N/A
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	01:16,0	N/A	N/A
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	Persen	7,12	N/A	N/A
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	78,28	N/A	N/A
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	61,67	N/A	N/A
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	54,03	N/A	N/A
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	58,46	N/A	N/A
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	N/A	N/A
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	Persen	62,15	N/A	N/A
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,87	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	Nilai	76,89	N/A	N/A
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	Nilai	71,4	N/A	N/A
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	Nilai	59,48	N/A	N/A
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Kurikulum	3	N/A	N/A
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	28,89	N/A	N/A
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	Persen	64,61	N/A	N/A
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	60,58	N/A	N/A
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	15	N/A	N/A
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	Persen	75,33	N/A	N/A
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	20,1	N/A	N/A
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	01:01,0	N/A	N/A
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	01:11,3	N/A	N/A
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,6	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	95,02	N/A	N/A
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	5,27	N/A	N/A
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	85,53	N/A	N/A
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	83,31	N/A	N/A
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	77,67	N/A	N/A
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	58,07	N/A	N/A
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	N/A	N/A
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	Persen	62,08	N/A	N/A
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,88	N/A	N/A
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	Nilai	73,43	N/A	N/A
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	Nilai	71,2	N/A	N/A
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	Nilai	61	N/A	N/A
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Kurikulum	2	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Persen	38,9	N/A	N/A
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	Persen	83,31	N/A	N/A
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	77,67	N/A	N/A
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	14,14	N/A	N/A
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	Persen	56,97	N/A	N/A
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	Persen	51,53	N/A	N/A
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	01:01,0	N/A	N/A
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	01:07,6	N/A	N/A
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,86	N/A	N/A
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	70,68	N/A	N/A
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	67,3	N/A	N/A
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	60,37	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	41,16	N/A	N/A
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	90	N/A	N/A
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	80,59	N/A	N/A
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	100	N/A	N/A
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	96,05	N/A	N/A
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	75,94	N/A	N/A
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	51,39	N/A	N/A

Secara umum, capaian sasaran strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut apabila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional.

Pada sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, sebagian besar indikator menunjukkan tren positif. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun telah mencapai 94,13 persen, yang mencerminkan bahwa mayoritas anak usia wajib belajar telah terlayani, meskipun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi terhadap anak tidak sekolah dan pencegahan putus sekolah agar kesenjangan dapat diperkecil. Pada kelompok usia 5–6 tahun, APS sebesar 63,71 persen juga masih berada di bawah capaian nasional, sehingga perlu upaya lebih intensif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini melalui perluasan

layanan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Di sisi lain, capaian APS usia 7–18 tahun jalur kesetaraan sebesar 66,03 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik dan jauh melampaui angka nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan kesetaraan di kabupaten telah berperan signifikan dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terlayani jalur formal. Untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), capaian PAUD, SD dan SMP masih belum bisa dihitung karena Rapor Pendidikan belum rilis sampai dengan dibuatnya laporan ini. Begitu pula, pada Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP data capaian belum bisa di tampilkan.

Pada sasaran Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan, data Indeks Standar Pelayanan Minimal belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis komparatif. Sementara itu, dari sisi tata kelola, capaian Nilai SAKIP sebesar 74,23 mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, dan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) sebesar 93,13 persen menunjukkan tingkat kepatuhan administrasi dan pengendalian internal yang sangat tinggi.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan fondasi yang cukup kuat, khususnya dalam perluasan akses pendidikan dan penguatan tata kelola. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan jenjang menengah pertama agar capaian daerah semakin selaras dan mampu melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.

## **A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi Pelaksanaan Target Kinerja**

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran kinerja dapat dilihat dari keberhasilan indikator kinerja yang tercapai dari target kinerja. Kegagalan suatu sasaran kinerja tentunya memerlukan alternatif solusi dalam pencapaiannya. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan**

Keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendukung yang saling bersinergi.

#### **1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6**

Terdapat sejumlah faktor yang mendukung peningkatan APS usia 5–6 tahun.

Faktor Pendukung :

a. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung PAUD

Dukungan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadikan PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar. Program bantuan operasional dan penguatan kurikulum mendorong peningkatan akses dan mutu layanan.

b. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini semakin luas. Banyak orang tua mulai memahami bahwa usia 5–6 tahun merupakan masa penting pembentukan karakter dan kesiapan belajar.

c. Dukungan Pemerintah Daerah dan Komunitas

Pemerintah daerah dan lembaga masyarakat turut membuka layanan PAUD berbasis komunitas sehingga akses pendidikan lebih dekat dan terjangkau.

d. Program Bantuan Sosial

Integrasi pendidikan anak usia dini dengan program bantuan sosial membantu keluarga kurang mampu agar tetap dapat menyekolahkan anaknya.

Selain faktor pendukung, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun yang merepresentasikan partisipasi anak dalam pendidikan prasekolah (PAUD/TK) masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi keluarga, lingkungan, maupun sistem pendidikan itu sendiri.

Faktor Penghambat :

a. Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan pendidikan anak usia dini. Walaupun biaya PAUD/TK relatif lebih terjangkau, pengeluaran tambahan seperti seragam, alat tulis, dan transportasi sering menjadi hambatan.

b. Rendahnya Kesadaran Orang Tua

Sebagian orang tua beranggapan bahwa pendidikan formal baru dimulai saat anak masuk Sekolah Dasar. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya stimulasi kognitif, sosial, dan emosional di usia emas (golden age) membuat partisipasi PAUD kurang optimal.

c. Akses dan Ketersediaan Layanan Terbatas

Di wilayah terpencil atau perdesaan, jumlah lembaga PAUD masih terbatas. Jarak yang jauh, sarana prasarana yang kurang memadai, serta kekurangan tenaga pendidik menjadi kendala utama.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah, anak usia 5–6 tahun lebih sering dilibatkan dalam membantu pekerjaan rumah atau aktivitas keluarga sehingga pendidikan prasekolah tidak menjadi prioritas.

e. Kualitas Layanan yang Belum Merata

Perbedaan mutu antar lembaga PAUD dapat memengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Jika kualitas dianggap kurang baik, orang tua cenderung menunda partisipasi anak.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi alternatif yang komprehensif dan berkelanjutan.

Solusi Alternatif :

a. Penguatan Subsidi dan Bantuan Pendidikan

Memberikan subsidi biaya pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, atau integrasi dengan bantuan sosial agar beban ekonomi keluarga berkurang.

b. Edukasi dan Sosialisasi kepada Orang Tua

Melakukan penyuluhan secara rutin melalui posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya PAUD dalam mendukung kesiapan anak masuk SD.

c. Pemerataan Pembangunan dan Akses PAUD

Mendirikan unit PAUD baru di daerah terpencil serta memanfaatkan bangunan desa atau fasilitas umum sebagai pusat layanan pendidikan anak usia dini.

d. Peningkatan Kompetensi Pendidik

Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru PAUD agar pembelajaran lebih kreatif, menyenangkan, dan sesuai tahap perkembangan anak.

e. Kolaborasi Lintas Sektor

Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkelanjutan.

## 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15

Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 di antaranya:

Faktor Pendukung :

### a. Program Wajib Belajar

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah mendorong anak usia 7–15 tahun untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP.

### b. Dukungan Kebijakan dan Anggaran Pendidikan

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program afirmasi membantu meringankan biaya pendidikan.

### c. Program Bantuan Sosial Pendidikan

Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah.

### d. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat

Semakin banyak orang tua yang memahami pentingnya pendidikan minimal hingga SMP sebagai bekal masa depan anak.

### e. Peran Sekolah dan Komunitas

Sekolah, komite sekolah, dan masyarakat berperan aktif dalam memantau kehadiran siswa serta mencegah terjadinya putus sekolah.

Namun dalam pelaksanaan dalam pencapaian target juga terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu:

### a. Kondisi Ekonomi Keluarga

Keterbatasan ekonomi masih menjadi penyebab utama anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama tidak bersekolah atau putus sekolah. Sebagian anak terpaksa membantu orang tua bekerja demi menambah penghasilan keluarga.

### b. Risiko Putus Sekolah

Pada jenjang SMP, risiko putus sekolah meningkat karena faktor motivasi belajar yang rendah, kesulitan akademik, atau kurangnya dukungan keluarga. Peralihan

dari SD ke SMP juga sering menjadi titik rawan.

c. Akses Pendidikan di Wilayah Tertinggal

Di daerah terpencil, perbatasan, jarak sekolah yang jauh dan keterbatasan transportasi menjadi hambatan serius bagi anak usia 7–15 tahun untuk bersekolah secara konsisten.

d. Faktor Sosial dan Lingkungan

Pergaulan bebas, pernikahan dini, serta pengaruh lingkungan yang kurang kondusif dapat menyebabkan anak berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

e. Keterbatasan Sarana dan Kualitas Pembelajaran

Fasilitas sekolah yang kurang memadai, kekurangan guru, serta kualitas pembelajaran yang rendah dapat menurunkan minat dan partisipasi siswa.

Untuk menghadapi beberapa hambatan tersebut di atas, diperlukan beberapa solusi alternatif yaitu:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Intervensi bagi Siswa Berisiko Putus Sekolah

Melakukan pendataan dan pendampingan khusus bagi siswa yang sering absen atau memiliki masalah akademik maupun sosial.

b. Perluasan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

Membangun unit sekolah baru, sekolah satu atap bagi daerah dengan akses sulit.

c. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki sarana prasarana, dan menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa lebih termotivasi.

d. Penguatan Edukasi kepada Orang Tua

Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan memberikan pemahaman bahwa pendidikan dasar hingga SMP adalah fondasi penting untuk masa depan anak.

e. Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

### 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan

Beberapa faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan antara lain:

Faktor Pendukung:

a. Adanya Jalur Pendidikan Nonformal

Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan kedua bagi anak usia 7–18 tahun yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal.

b. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

c. Fleksibilitas Waktu Belajar

Program kesetaraan memiliki jadwal yang lebih fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang bekerja atau memiliki tanggung jawab lain.

d. Kurikulum yang Kontekstual

Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan cenderung lebih aplikatif dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup peserta didik, termasuk keterampilan vokasional.

e. Peran PKBM dan Lembaga Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga nonformal lainnya membantu memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Selain faktor pendukung di atas, dalam mencapai keberhasilan juga menemui beberapa faktor hambatan di antaranya:

Faktor Penghambat:

a. Rendahnya Minat dan Motivasi Belajar

Sebagian peserta didik yang mengikuti program kesetaraan adalah mereka yang

sebelumnya putus sekolah. Pengalaman gagal atau kurangnya dukungan membuat motivasi belajar cenderung rendah.

b. Stigma terhadap Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A, B, dan C sering dianggap sebagai “pilihan kedua” dibanding sekolah formal, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan masih terbatas.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Beberapa lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan belum memiliki fasilitas belajar yang memadai, baik dari segi ruang belajar, bahan ajar, maupun media pembelajaran.

d. Keterbatasan Tenaga Pendidik

Tutor atau pendidik pada program kesetaraan seringkali jumlahnya terbatas dan belum semua memiliki pelatihan khusus dalam menangani peserta didik dengan latar belakang beragam.

e. Kendala Waktu bagi Peserta Didik

Banyak peserta program kesetaraan adalah anak atau remaja yang sudah bekerja sehingga sulit mengikuti pembelajaran secara rutin.

Berikut beberapa solusi alternatif yang dilakukan dalam mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Sosialisasi dan Penghapusan Stigma

Melakukan kampanye edukatif bahwa ijazah kesetaraan memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal serta membuka akses ke jenjang pendidikan dan dunia kerja.

b. Peningkatan Kualitas Tutor dan Pengelola

Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada tutor agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif dan sesuai dengan karakter peserta didik.

c. Pengembangan Model Pembelajaran Fleksibel

Memanfaatkan pembelajaran daring, modul mandiri, atau sistem blended learning untuk mengakomodasi peserta didik yang bekerja.

d. Integrasi dengan Pelatihan Keterampilan

Menggabungkan program kesetaraan dengan pelatihan vokasional agar peserta tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga keterampilan kerja yang relevan.

e. Penguatan Dukungan Pembiayaan

Memberikan bantuan operasional dan insentif bagi peserta didik kurang mampu agar tetap mengikuti program hingga tuntas.

#### 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini ada beberapa faktor yang mendukung di antaranya:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Kebijakan Nasional terhadap PAUD

Program bantuan operasional dan penguatan kurikulum PAUD mendorong peningkatan akses dan mutu layanan.

b. Meningkatnya Kesadaran Orang Tua

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya masa golden age (0–6 tahun) semakin meningkat. Orang tua mulai memahami bahwa stimulasi dini berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak.

c. Bertambahnya Lembaga PAUD

Pertumbuhan jumlah TK, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini, termasuk di tingkat desa.

d. Integrasi Layanan PAUD Holistik Integratif

Pendekatan yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak meningkatkan daya tarik PAUD karena orang tua melihat manfaat yang lebih menyeluruh.

Namun dalam pelaksanaannya terkadang menemui hambatan yang disebabkan beberapa faktor berikut:

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Walaupun sebagian PAUD berbiaya rendah, pengeluaran tambahan seperti seragam, iuran, dan transportasi masih menjadi beban bagi keluarga kurang mampu.

b. Ketimpangan Akses Wilayah

Di daerah terpencil, jumlah dan kualitas layanan PAUD masih terbatas. Jarak tempuh yang jauh dapat mengurangi partisipasi anak.

c. Kualitas Layanan yang Belum Merata

Perbedaan mutu antar lembaga PAUD, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana, memengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anak.

d. Persepsi bahwa PAUD Tidak Wajib

Sebagian masyarakat masih menganggap PAUD bukan kebutuhan mendesak karena tidak termasuk jenjang pendidikan wajib belajar.

e. Keterbatasan Tenaga Pendidik Profesional

Belum semua pendidik PAUD memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai sesuai standar kompetensi.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif di antaranya:

Solusi Alternatif:

a. Perluasan Subsidi dan Bantuan Operasional

Memperkuat bantuan pembiayaan bagi lembaga dan peserta didik PAUD agar biaya tidak menjadi hambatan utama.

b. Pemerataan Pembangunan Layanan PAUD

Mendorong pendirian PAUD di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat pembelajaran.

c. Peningkatan Kompetensi Pendidik

Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi guru PAUD agar mutu layanan meningkat secara merata.

d. Penguatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan edukasi melalui posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya PAUD sebagai fondasi kesiapan sekolah dasar.

e. Kolaborasi Lintas Sektor

Melibatkan pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam mendukung penyediaan sarana, program gizi, dan kegiatan pembelajaran kreatif.

### 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di antaranya:

Faktor Pendukung:

a. Program Wajib Belajar

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar mendorong seluruh anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan minimal sampai jenjang dasar, sehingga meningkatkan angka partisipasi secara signifikan.

b. Dukungan Kebijakan dan Anggaran Pendidikan

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu meringankan biaya operasional sekolah sehingga peserta didik dapat bersekolah tanpa beban biaya besar.

c. Program Bantuan Sosial Pendidikan

Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial lainnya membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah.

d. Ketersediaan Sekolah yang Relatif Merata

Sebagian besar wilayah telah memiliki Sekolah Dasar yang tersebar hingga tingkat desa, sehingga akses pendidikan dasar lebih mudah dijangkau dibanding jenjang pendidikan lainnya.

e. Kesadaran Masyarakat terhadap Pendidikan Dasar

Masyarakat umumnya telah memahami bahwa pendidikan dasar merupakan hak dan kewajiban setiap anak, sehingga partisipasi pada jenjang SD relatif tinggi.

Selain faktor pendukung di atas, dalam mencapai keberhasilan juga menemui beberapa faktor hambatan di antaranya:

## Faktor Penghambat:

### a. Ketimpangan Akses di Wilayah Terpencil

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), jarak sekolah yang jauh dan keterbatasan transportasi masih menjadi kendala bagi sebagian anak.

### b. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga

Anak dari keluarga kurang mampu terkadang harus membantu orang tua bekerja, sehingga mengganggu keberlanjutan sekolah.

### c. Risiko Tinggal Kelas dan Putus Sekolah

Kesulitan belajar, kurangnya pendampingan orang tua, atau motivasi yang rendah dapat menyebabkan anak tinggal kelas atau bahkan putus sekolah.

### d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Beberapa sekolah masih mengalami kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, maupun media pembelajaran yang memadai.

### e. Kualitas Pembelajaran yang Belum Merata

Perbedaan kompetensi guru dan kualitas pengelolaan sekolah dapat memengaruhi pengalaman belajar siswa dan keberlanjutan partisipasi mereka.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif di antaranya:

## Solusi Alternatif:

### a. Pemerataan Sarana dan Infrastruktur

Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas sanitasi layak, serta akses sekolah.

### b. Penguatan Intervensi bagi Siswa Rentan

Melakukan pendataan dini terhadap siswa yang berisiko putus sekolah dan memberikan pendampingan akademik maupun sosial.

### c. Peningkatan Kompetensi Guru

Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi.

d. Optimalisasi Bantuan Pendidikan

Memastikan bantuan sosial dan program BOS tepat sasaran dan benar-benar membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

e. Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua

Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak agar tercipta dukungan belajar yang berkelanjutan di rumah.

### 1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama

Dalam mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama ada beberapa faktor yang mendukung, sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Kebijakan wajib belajar 9 tahun mendorong peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP sebagai bagian dari pendidikan dasar.

b. Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai program afirmasi membantu mengurangi beban biaya pendidikan di jenjang SMP.

c. Program Bantuan Sosial untuk Siswa Kurang Mampu

Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan ke SMP.

d. Ketersediaan Sekolah Negeri dan Swasta

Jumlah SMP yang terus bertambah, baik negeri maupun swasta, memperluas akses pendidikan bagi lulusan SD di berbagai wilayah.

e. Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Menengah Pertama

Masyarakat semakin menyadari bahwa pendidikan minimal hingga SMP penting sebagai bekal dasar untuk melanjutkan ke jenjang SMA/SMK atau memasuki dunia kerja.

Selain faktor pendukung di atas, dalam mencapai keberhasilan juga menemui

beberapa faktor hambatan di antaranya:

Faktor Penghambat:

a. Risiko Putus Sekolah setelah Lulus SD

Transisi dari SD ke SMP sering menjadi titik rawan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau yang mengalami kesulitan belajar.

b. Faktor Ekonomi dan Kewajiban Bekerja

Sebagian remaja usia SMP terpaksa membantu orang tua bekerja sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama.

c. Akses Geografis yang Terbatas

Di wilayah terpencil, jarak SMP yang lebih jauh dibanding SD menjadi kendala utama karena keterbatasan transportasi dan infrastruktur.

d. Faktor Sosial dan Pergaulan

Pengaruh lingkungan, pernikahan dini, serta kurangnya pengawasan dapat menyebabkan siswa berhenti sekolah sebelum menyelesaikan SMP.

e. Motivasi dan Kualitas Pembelajaran

Metode pembelajaran yang kurang menarik serta kurangnya pendampingan dapat menurunkan minat belajar siswa.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif di antaranya:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Transisi SD ke SMP

Melakukan pendampingan dan sosialisasi sejak kelas akhir SD untuk memastikan seluruh lulusan melanjutkan pendidikan ke SMP.

b. Perluasan Akses dan Infrastruktur

Membangun SMP baru di wilayah yang belum terjangkau, mengembangkan sekolah satu atap (SD-SMP), serta menyediakan transportasi sekolah.

c. Optimalisasi Bantuan Sosial dan Beasiswa

Memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan diberikan secara

berkelanjutan bagi siswa yang berisiko putus sekolah.

d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Mendorong inovasi pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan remaja agar siswa lebih termotivasi.

e. Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat

Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memantau kehadiran serta perkembangan siswa.

### 1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Penguatan Kebijakan PAUD sebagai Fondasi Pendidikan

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memperkuat layanan PAUD mendorong anak usia yang tepat untuk masuk PAUD sesuai tahap perkembangannya.

b. Peningkatan Kesadaran tentang Golden Age

Orang tua semakin memahami bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan otak, sehingga lebih terdorong menyekolahkan anak tepat pada usia PAUD.

c. Perluasan dan Pemerataan Layanan PAUD

Bertambahnya jumlah TK, Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) membuat anak usia dini lebih mudah mengakses layanan sesuai kelompok umur.

d. Integrasi Layanan PAUD Holistik Integratif

Pendekatan yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak meningkatkan minat orang tua untuk memasukkan anak ke PAUD pada usia yang tepat.

e. Dukungan Pemerintah Daerah dan Desa

Pemanfaatan dana desa untuk operasional PAUD membantu memastikan anak

usia sasaran mendapatkan akses pendidikan lebih awal dan tepat waktu.

Berikut beberapa faktor yang menghambat dalam pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Anak Masuk Terlalu Dini atau Terlambat

Sebagian anak masuk PAUD di luar rentang usia yang seharusnya (terlalu muda atau terlalu tua), sehingga tidak tercatat dalam APM meskipun secara APK terhitung.

b. Rendahnya Pemahaman tentang Usia Ideal Masuk PAUD

Sebagian orang tua belum memahami perbedaan kelompok usia dalam layanan PAUD, sehingga menunda atau mempercepat pendaftaran anak.

c. Keterbatasan Akses bagi Kelompok Usia Tertentu

Beberapa wilayah lebih banyak memiliki TK (usia 5–6 tahun) dibanding layanan untuk usia 3–4 tahun, sehingga partisipasi anak usia lebih muda masih rendah.

d. Faktor Ekonomi dan Sosial

Keterbatasan biaya dan anggapan bahwa PAUD tidak wajib menyebabkan orang tua menunda penyekolahan anak hingga masuk SD.

e. Kualitas Layanan yang Belum Merata

Perbedaan mutu antar lembaga membuat orang tua memilih menunggu anak lebih besar sebelum disekolahkan.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif sebagai berikut:

Solusi Alternatif:

a. Edukasi tentang Usia Ideal Masuk PAUD

Melakukan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya menyekolahkan anak sesuai rentang usia perkembangan yang tepat.

b. Pemerataan Layanan Berdasarkan Kelompok Usia

Mendorong pembukaan layanan untuk anak usia 3–4 tahun agar partisipasi lebih seimbang dan sesuai standar usia PAUD.

c. Penguatan Subsidi bagi Anak Usia Sasaran

Memberikan bantuan biaya khusus bagi anak usia resmi PAUD agar orang tua tidak menunda pendaftaran.

d. Peningkatan Kualitas dan Standar Layanan

Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran agar orang tua percaya menyekolahkan anak pada usia yang sesuai.

e. Integrasi Data dan Pemantauan Usia Peserta Didik

Memperbaiki sistem pendataan agar anak tercatat sesuai usia sebenarnya dan meminimalkan ketidaksesuaian dalam pelaporan APM.

### 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Kebijakan wajib belajar mendorong seluruh anak usia 7–12 tahun untuk masuk dan menyelesaikan pendidikan dasar tepat waktu.

b. Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu mengurangi beban biaya sehingga anak usia resmi SD dapat bersekolah tanpa hambatan finansial besar.

c. Program Bantuan Sosial Pendidikan

Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu memastikan anak usia 7–12 tahun dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah sesuai usianya.

d. Ketersediaan SD yang Relatif Merata

Sebagian besar desa/kelurahan telah memiliki SD, sehingga anak usia sekolah dasar memiliki akses yang cukup dekat dengan tempat tinggalnya.

e. Kesadaran Masyarakat terhadap Pendidikan Dasar

Masyarakat umumnya memahami bahwa SD merupakan jenjang pendidikan wajib dan menjadi fondasi bagi jenjang berikutnya.

Berikut beberapa faktor yang menghambat dalam pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Anak Masuk Terlambat atau Terlalu Dini

Sebagian anak masuk SD tidak pada usia 7 tahun, melainkan lebih lambat atau lebih cepat, sehingga tidak tercatat dalam APM meskipun masih bersekolah di SD.

b. Tinggal Kelas

Siswa yang tinggal kelas menyebabkan ketidaksesuaian usia dengan tingkat kelasnya, sehingga memengaruhi nilai APM.

c. Putus Sekolah Usia Dini

Faktor ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, atau masalah sosial dapat menyebabkan anak usia 7–12 tahun berhenti sekolah sebelum tamat SD.

d. Akses di Wilayah Terpencil

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), jarak sekolah dan keterbatasan transportasi masih menjadi kendala bagi anak usia resmi SD.

e. Kurangnya Pendampingan Belajar

Minimnya dukungan belajar di rumah dapat menyebabkan anak kesulitan akademik dan berisiko tidak melanjutkan sekolah sesuai usia.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif sebagai berikut:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Program Masuk SD Tepat Usia

Melakukan sosialisasi kepada orang tua agar mendaftarkan anak ke SD pada usia 7 tahun sesuai ketentuan.

b. Pencegahan Tinggal Kelas

Memberikan pendampingan belajar, kelas remedial, dan intervensi dini bagi siswa yang mengalami kesulitan akademik.

c. Intervensi bagi Anak Berisiko Putus Sekolah

Melakukan pendataan dan kunjungan rumah (home visit) untuk memastikan anak usia 7–12 tahun tetap bersekolah.

d. Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Membangun dan merehabilitasi sekolah di wilayah 3T serta menyediakan fasilitas transportasi jika diperlukan.

e. Optimalisasi Bantuan Pendidikan

Memastikan bantuan sosial dan BOS tepat sasaran agar tidak ada anak usia resmi SD yang terhambat karena faktor biaya.

### 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

Beberapa faktor pendukung dan penghambat yang menyertai keberhasilan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Kebijakan wajib belajar hingga jenjang SMP mendorong anak usia 13–15 tahun untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SD secara tepat waktu.

b. Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu menekan biaya pendidikan sehingga siswa usia resmi SMP dapat tetap bersekolah.

c. Program Bantuan Sosial (KIP dan Beasiswa)

Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan sesuai usia.

d. Ketersediaan SMP

Pengembangan SMP negeri dan swasta membantu memperlancar transisi dari SD ke SMP terutama di wilayah terpencil.

e. Meningkatnya Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan Menengah

Orang tua semakin menyadari bahwa pendidikan minimal hingga SMP sangat penting sebagai dasar melanjutkan ke SMA/SMK atau memasuki dunia kerja.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Keterlambatan Masuk atau Tinggal Kelas

Siswa yang masuk SD tidak tepat usia atau pernah tinggal kelas akan memasuki SMP dalam usia yang tidak sesuai, sehingga tidak tercatat dalam APM meskipun masih bersekolah.

b. Risiko Putus Sekolah pada Usia Remaja

Usia 13–15 tahun merupakan masa transisi remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, kurangnya motivasi belajar, atau tekanan sosial yang dapat menyebabkan putus sekolah.

c. Faktor Ekonomi Keluarga

Sebagian remaja terpaksa membantu orang tua bekerja, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas dan tidak melanjutkan SMP tepat waktu.

d. Akses Geografis Terbatas

Di beberapa daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), jarak SMP yang lebih jauh dibanding SD menjadi hambatan bagi anak usia resmi SMP.

e. Pernikahan Dini dan Faktor Sosial

Pernikahan dini dan norma sosial tertentu masih menjadi penyebab sebagian remaja tidak melanjutkan pendidikan sesuai usia.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif sebagai berikut:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Transisi SD ke SMP Tepat Usia

Melakukan pendampingan dan sosialisasi sejak kelas akhir SD agar seluruh lulusan melanjutkan ke SMP tanpa jeda waktu.

b. Pencegahan Tinggal Kelas

Memberikan bimbingan belajar, kelas remedial, dan pendampingan akademik untuk mencegah keterlambatan usia sekolah akibat tinggal kelas.

c. Intervensi bagi Siswa Berisiko Putus Sekolah

Melakukan pendataan dan pendampingan intensif terhadap siswa yang sering absen atau memiliki masalah sosial dan ekonomi.

d. Penguatan Edukasi dan Peran Orang Tua

Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan belajar anak agar tetap bersekolah sesuai usia resminya.

2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dengan indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Regulasi dan Kebijakan yang Jelas

Adanya regulasi nasional mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan acuan yang terukur bagi pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Pendidikan

Kewajiban pengalokasian minimal 20% APBD untuk pendidikan menjadi dasar pendanaan dalam memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik.

c. Sistem Pendataan Pendidikan yang Terintegrasi

Pemanfaatan data Dapodik dan sistem informasi daerah membantu Dinas Pendidikan dalam memetakan kekurangan layanan sesuai indikator SPM.

d. Dukungan Kepala Daerah

Komitmen Bupati dan jajaran pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan mempercepat peningkatan capaian Indeks SPM.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Fiskal Daerah

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat menghambat pemenuhan seluruh indikator SPM, terutama rehabilitasi infrastruktur dan penyediaan guru.

b. Ketimpangan Antarwilayah Kecamatan

Perbedaan kondisi geografis dan akses antar kecamatan menyebabkan layanan pendidikan belum merata, terutama di wilayah terpencil.

c. Kekurangan dan Distribusi Guru Tidak Merata

Masih terdapat sekolah kekurangan guru mata pelajaran tertentu atau kelebihan guru di lokasi lain.

d. Kondisi Sarana Prasarana yang Belum Standar

Ruang kelas rusak, sanitasi tidak layak, dan kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran memengaruhi nilai capaian SPM.

e. Kapasitas Perencanaan dan Pengawasan

Belum optimalnya perencanaan berbasis data serta lemahnya monitoring dan evaluasi internal dapat memperlambat peningkatan indeks.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diatas, maka di perlukan solusi alternatif sebagai berikut:

Solusi Alternatif:

a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SPM

Menyusun dokumen rencana aksi berbasis data yang memuat target tahunan, prioritas indikator, serta strategi pembiayaan yang jelas.

b. Pemetaan dan Pemerataan Guru

Melakukan analisis kebutuhan guru per sekolah dan redistribusi tenaga pendidik secara bertahap, termasuk pemberian insentif untuk daerah terpencil.

c. Prioritas Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

Memfokuskan anggaran pada pemenuhan komponen SPM yang paling mendesak seperti ruang kelas layak, sanitasi, dan akses air bersih.

d. Optimalisasi Dana Transfer dan Sumber Pendanaan Lain

Mengintegrasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), BOS, dan sumber lain untuk mendukung percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal.

e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala

Membentuk tim monitoring SPM tingkat kabupaten untuk melakukan evaluasi rutin per triwulan serta memastikan data pelaporan akurat dan mutakhir.

f. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

Memberikan pelatihan teknis kepada kepala sekolah, pengawas, dan operator data agar implementasi dan pelaporan SPM berjalan efektif.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Dukungan Pimpinan

Dukungan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil (outcome) menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

b. Dukungan Regulasi dan Evaluasi Nasional

Pembinaan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi pedoman dalam penyempurnaan implementasi SAKIP.

c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Terstruktur

Adanya Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKjIP) yang tersusun secara sistematis memudahkan penyelarasan antara sasaran strategis dan indikator kinerja.

d. Penggunaan Data Pendidikan sebagai Dasar Perencanaan

Pemanfaatan data pendidikan (seperti capaian APK, APM, dan mutu layanan pendidikan) membantu penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur dan relevan.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Perencanaan yang Belum Sepenuhnya Berbasis Outcome

Masih terdapat program dan kegiatan yang berorientasi pada output administratif, belum sepenuhnya mengukur dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.

b. Keterbatasan SDM Perencana dan Evaluator

Belum meratanya pemahaman aparaturnya terkait cascading kinerja, pengukuran kinerja, dan penyusunan LKjIP berbasis hasil.

c. Monitoring dan Evaluasi Internal yang Belum Optimal

Evaluasi capaian kinerja belum dilakukan secara berkala dan mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan.

d. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya konsisten, sehingga memengaruhi kualitas akuntabilitas.

Adapun solusi alternatif yang digunakan dalam mengatasi beberapa hambatan di atas di antaranya:

Solusi Alternatif:

a. Penyempurnaan Cascading Kinerja

Menurunkan sasaran strategis daerah ke dalam sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan hingga ke tingkat bidang dan subbagian secara selaras.

b. Reviu dan Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Melakukan evaluasi terhadap IKU agar lebih fokus pada dampak peningkatan mutu pendidikan, seperti peningkatan capaian SPM, APS, APK, dan APM.

c. Penguatan Kapasitas SDM

Melaksanakan pelatihan teknis penyusunan perencanaan kinerja dan LKjIP bagi pejabat struktural dan staf perencana.

d. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi triwulanan terhadap capaian indikator serta menyusun rencana aksi perbaikan (action plan) jika terdapat deviasi target.

e. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan

Memastikan keselarasan antara Renstra, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, dan LKjIP agar seluruh program memiliki kontribusi jelas terhadap sasaran strategis.

f. Penguatan Reviu Internal oleh Inspektorat

Melibatkan Inspektorat Kabupaten dalam mereviu dokumen kinerja sebelum evaluasi eksternal guna meningkatkan kualitas dan kesiapan penilaian.

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

##### a. Komitmen Pimpinan terhadap Tata Kelola yang Akuntabel

Komitmen Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menegakkan disiplin administrasi, kepatuhan regulasi, dan budaya kerja berbasis kinerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan nilai IKKI.

##### b. Pembinaan dan Pengawasan Internal

Pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Banjar mendorong perbaikan tata kelola, kepatuhan administrasi, serta percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

##### c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Implementasi SPIP sesuai pedoman dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membantu memastikan pengelolaan program, keuangan, dan aset berjalan sesuai ketentuan.

##### d. Ketersediaan SOP dan Standar Kerja

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan administrasi memperkuat konsistensi dan kepatuhan kerja.

##### e. Digitalisasi Sistem Administrasi

Pemanfaatan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (seperti SIPD dan sistem internal lainnya) meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketertiban administrasi.

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan pencapaian target di temui beberapa faktor hambatan di antaranya:

Faktor Penghambat:

##### a. Ketidaktertiban Administrasi

Masih adanya keterlambatan penyampaian laporan, pengarsipan dokumen yang belum sistematis, atau kelengkapan administrasi yang kurang optimal.

b. Pemahaman Regulasi yang Belum Merata

Sebagian ASN belum sepenuhnya memahami regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan kinerja.

c. Tindak Lanjut Temuan Audit yang Belum Optimal

Rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal maupun eksternal yang belum ditindaklanjuti secara cepat dapat memengaruhi nilai IKKI.

d. Monitoring Internal yang Belum Konsisten

Evaluasi internal yang belum rutin atau belum berbasis risiko menyebabkan potensi temuan berulang.

e. Budaya Kerja yang Masih Berorientasi Administratif

Sebagian unit kerja masih berfokus pada pemenuhan dokumen tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam mengatasi beberapa hambatan di atas, berikut solusi alternatif yang mungkin bisa digunakan yaitu:

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Budaya Integritas dan Disiplin

Melakukan pembinaan rutin, penegakan disiplin ASN, serta keteladanan pimpinan untuk membangun budaya kerja yang patuh dan profesional.

b. Optimalisasi Penerapan SPIP

Melakukan penilaian risiko secara berkala dan memastikan setiap kegiatan memiliki mekanisme pengendalian yang jelas dan terdokumentasi.

c. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Audit

Membentuk tim monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan seluruh rekomendasi diselesaikan tepat waktu.

d. Peningkatan Kapasitas SDM

Menyelenggarakan pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah, tata naskah dinas, pengadaan barang/jasa, dan penyusunan laporan kinerja.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap kepatuhan administrasi dan capaian kinerja intern di setiap bidang/unit kerja.

5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling bersinergi.

Faktor Pendukung:

a. Koordinasi dengan Pimpinan

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penyesuaian kembali dokumen perencanaan. Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perencanaan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

b. Peninjauan Kembali Dokumen Perencanaan

Peninjauan ulang terhadap dokumen perencanaan dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas perencanaan ke depan.

c. Konsultasi dengan Pihak Terkait

Selain koordinasi internal, konsultasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh masukan dan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini menjadi salah satu upaya proaktif untuk mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas perencanaan serta evaluasi.

Faktor Penghambat:

a. Kendala Aplikasi Evaluasi Bulanan

Proses evaluasi bulanan mengalami hambatan karena aplikasi yang seharusnya digunakan untuk melakukan pemantauan dan penilaian kinerja belum dapat difungsikan secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara manual yang memerlukan waktu dan tenaga lebih, serta berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaporan.

b. Lambatnya Penerimaan Data Pendukung

Penerimaan data-data pendukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dan

perencanaan masih mengalami keterlambatan. Hal ini berdampak pada keterlambatan analisis serta pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

#### Solusi Alternatif:

Dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan serangkaian langkah strategis dan alternatif solusi yang komprehensif. Salah satu solusi utama adalah dengan mengoptimalkan proses perencanaan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terarah, konsisten, dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja perlu dilakukan dengan mengacu pada RPJMD serta prioritas pembangunan daerah, disertai kalender perencanaan yang jelas untuk meminimalisir keterlambatan maupun tumpang tindih kegiatan.

Selanjutnya, dalam aspek penganggaran, alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil, bukan hanya sekadar input atau rutinitas belanja. Penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

#### 6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan dokumen SPIP berjalan secara terkoordinir dan melibatkan seluruh pihak yang relevan guna menghasilkan dokumen yang komprehensif dan sesuai ketentuan.

##### Faktor Pendorong:

##### a. Dorongan Koordinasi Secara Berkelanjutan

Upaya untuk terus mendorong koordinasi antar pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam penyusunan dokumen SPIP. Melalui koordinasi yang intensif, terbuka, dan berkelanjutan, seluruh pihak dapat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan, sehingga memudahkan tercapainya kesepakatan bersama.

##### b. Konsultasi dan Tukar Pendapat

Proses penyusunan dokumen SPIP juga didukung oleh kegiatan konsultasi dan tukar pendapat antar unit atau pemangku kepentingan terkait. Interaksi ini membuka ruang diskusi yang konstruktif, memperkaya perspektif, dan membantu menyusun dokumen berdasarkan masukan yang relevan dan mendalam.

### c. Pengambilan Kesepakatan Bersama

Untuk menjaga keselarasan dalam penyusunan dokumen, dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Langkah ini memastikan bahwa seluruh hasil yang dituangkan dalam dokumen SPIP telah disetujui dan dipahami oleh seluruh pihak, sehingga meminimalkan potensi perbedaan persepsi dan mempermudah implementasi ke depan.

#### Faktor Penghambat:

#### a. Perbedaan Pendapat yang Belum Sejalan

Proses diskusi dan pengambilan keputusan dalam penyusunan dokumen SPIP masih menghadapi perbedaan pendapat antar pihak terkait. Hal ini mengharuskan hasil yang telah disusun dikaji ulang secara berkala guna mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

#### b. Lambatnya Pengumpulan Data

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah lambatnya proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan dokumen. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penelaahan dan tindak lanjut, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penyusunan dokumen secara keseluruhan.

#### c. Data yang Bersifat Dinamis

Evaluasi terhadap data kerap menemui kendala karena adanya perbedaan kondisi antara data saat proses pekerjaan berlangsung dan data saat evaluasi dilakukan. Hal ini terjadi karena sifat data yang terus bergerak dan berubah, sehingga diperlukan penyesuaian dan pemutakhiran yang berkelanjutan agar dokumen yang disusun tetap relevan dan akurat.

#### Solusi Alternatif:

Upaya untuk mencapai sasaran kinerja “Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP” dilakukan melalui penguatan peran koordinatif antar perangkat daerah, sehingga penyusunan dokumen SPIP dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan konsisten. Proses koordinasi melibatkan penetapan jadwal dan tahapan penyusunan dokumen yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja, serta pemantauan secara berkala terhadap progres penyusunan.

Selain itu, peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap konsep, prinsip, dan komponen SPIP juga menjadi bagian penting dalam mendukung keterpaduan proses penyusunan. Kegiatan ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun

pendampingan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga setiap unit kerja mampu berkontribusi secara optimal dalam penyusunan dokumen.

7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pimpinan terhadap Tertib Administrasi Keuangan

Komitmen Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai peraturan menjadi landasan utama tertib administrasi.

b. Dukungan Regulasi dan Sistem Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan berpedoman pada regulasi nasional dan sistem yang terintegrasi seperti SIPD, sehingga proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan lebih sistematis.

c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Implementasi SPIP sesuai pedoman dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membantu meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan.

d. SDM Pengelola Keuangan yang Tersertifikasi/Kompeten

Keberadaan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan staf keuangan yang memahami regulasi mendukung kelancaran administrasi.

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan

Adanya SOP terkait pengajuan SPP, pencairan dana, pembayaran, dan penyusunan SPJ membantu menjaga konsistensi dan ketertiban dokumen.

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan pencapaian target di temui beberapa faktor hambatan di antaranya:

Faktor Penghambat:

a. Keterlambatan Penyampaian SPJ dan Laporan Keuangan

Keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat memengaruhi kualitas administrasi dan penilaian kinerja.

b. Perubahan Regulasi yang Dinamis

Seringnya pembaruan aturan pengelolaan keuangan daerah menuntut penyesuaian cepat yang tidak selalu mudah diimplementasikan.

c. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Masih adanya kekurangan bukti transaksi atau kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.

d. Beban Kerja Tinggi

Besarnya alokasi anggaran pendidikan serta banyaknya program/kegiatan meningkatkan kompleksitas pengelolaan administrasi keuangan.

e. Koordinasi Antarbidang yang Belum Optimal

Ketidaksinkronan antara bidang teknis dan pengelola keuangan dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen.

Dalam mengatasi beberapa hambatan di atas, berikut solusi alternatif yang mungkin bisa digunakan yaitu:

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan

Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan rutin terkait regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah.

b. Penguatan Monitoring Internal

Melakukan evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran dan kelengkapan SPJ untuk mencegah penumpukan laporan di akhir tahun.

c. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Audit

Membentuk tim kecil untuk memonitor dan memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.

d. Peningkatan Koordinasi Antarbidang

Melaksanakan rapat koordinasi rutin antara bidang teknis dan pengelola keuangan agar perencanaan kegiatan dan administrasi berjalan selaras.

e. Penyusunan Timeline Administrasi Keuangan

Menetapkan jadwal internal penyampaian dokumen dan laporan agar proses pertanggungjawaban lebih tertib dan tepat waktu.

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Terdapat beberapa faktor di dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pimpinan terhadap Tertib Pengelolaan Aset

Komitmen Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menatausahakan aset daerah secara tertib dan akuntabel menjadi dasar utama peningkatan kualitas administrasi BMD.

b. Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Jelas

Adanya pedoman nasional dan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD memberikan acuan dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset.

c. Peran Pengurus dan Pengelola Barang

Keberadaan Pengurus Barang dan Pengelola Barang di lingkungan Dinas Pendidikan mendukung tertib administrasi serta pembaruan data aset secara berkala.

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan pencapaian target di temui beberapa faktor hambatan di antaranya:

Faktor Penghambat:

a. Data Aset yang Belum Tertib dan Mutakhir

Masih terdapat aset sekolah atau kantor yang belum tercatat secara lengkap atau belum diperbarui kondisi dan lokasinya.

b. Banyaknya Aset yang Tersebar di Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki aset dalam jumlah besar dan tersebar di banyak sekolah (PAUD, SD, SMP), sehingga pengawasan dan inventarisasi menjadi lebih kompleks.

c. Keterbatasan SDM Pengelola Aset

Jumlah dan kompetensi pengurus barang di tingkat dinas maupun sekolah belum merata.

d. Keterlambatan Pelaporan Mutasi Barang

Perubahan kondisi barang (rusak, hilang, dipindahkan) tidak selalu dilaporkan tepat waktu sehingga memengaruhi keakuratan data.

e. Tindak Lanjut Penghapusan dan Pemanfaatan Aset

Proses penghapusan barang rusak berat atau pemanfaatan aset belum optimal karena prosedur administrasi yang memerlukan waktu.

Dalam mengatasi beberapa hambatan di atas, berikut solusi alternatif yang mungkin bisa digunakan yaitu:

Solusi Alternatif:

a. Penertiban dan Rekonsiliasi Data Aset Secara Berkala

Melakukan inventarisasi menyeluruh dan rekonsiliasi data antara dinas dan satuan pendidikan minimal satu kali dalam setahun.

b. Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang

Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan BMD agar pengurus barang memahami prosedur pencatatan, pelaporan, dan penghapusan aset.

c. Optimalisasi Sistem Informasi Aset

Mengintegrasikan pencatatan aset dengan sistem keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data.

d. Penguatan Monitoring dan Pengawasan Internal

Melakukan monitoring rutin terhadap aset di sekolah-sekolah serta memastikan setiap mutasi barang tercatat dan dilaporkan.

e. Percepatan Proses Penghapusan Barang Rusak

Menyusun jadwal usulan penghapusan secara berkala agar tidak terjadi penumpukan aset rusak yang masih tercatat aktif.

9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian mulai dari pengelolaan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, mutasi,

hingga pensiun—dapat berjalan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Faktor Pendorong:

Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan internal SKPD didukung oleh koordinasi yang baik antara unit kepegawaian dan seluruh bagian yang terkait. Kegiatan ini juga berjalan lancar karena adanya komitmen dari personel pengelola kepegawaian yang secara aktif melaksanakan tugasnya sesuai jadwal dan prosedur. Selain itu, penggunaan sistem administrasi yang terintegrasi turut membantu mempercepat pengolahan data dan mendukung akurasi dalam penyusunan dokumen kepegawaian.

#### Faktor Penghambat:

Namun demikian, pelaksanaan administrasi kepegawaian tidak terlepas dari hambatan, salah satunya adalah keterlambatan dalam penerbitan daftar nama pegawai yang diusulkan untuk kenaikan pangkat. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi lanjutan menjadi tertunda, dan berdampak pada keterlambatan pengusulan ke tingkat yang lebih tinggi. Keterlambatan tersebut dapat memengaruhi motivasi pegawai serta menimbulkan ketidaksesuaian dalam penjadwalan proses kepegawaian lainnya, jika tidak segera ditindaklanjuti.

#### Solusi Alternatif:

Pencapaian sasaran kinerja “Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan” dilakukan melalui penataan dan pengelolaan data kepegawaian secara sistematis dan terintegrasi. Proses administrasi kepegawaian mencakup antara lain pengelolaan data pegawai, pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat, pengangkatan dan mutasi pegawai, pencatatan cuti, penilaian kinerja, hingga pengelolaan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur pengelola kepegawaian menjadi bagian penting dari upaya ini. Pelatihan teknis dan sosialisasi peraturan terbaru di bidang kepegawaian dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pengelola SDM memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan instansi pembina kepegawaian, seperti BKD atau BKN, juga menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan ketepatan dan kelancaran proses administrasi.

#### 10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi, seperti surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan barang, dan kegiatan pendukung lainnya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Faktor Pendorong:

Kelancaran administrasi umum di perangkat daerah didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memahami tugas administratif, serta sistem kerja yang telah terstruktur dengan baik. Selain itu, adanya koordinasi yang intensif antarbagian serta penggunaan teknologi informasi turut mempercepat proses administrasi, sehingga mendukung efektivitas pelayanan. Komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan administrasi juga menjadi pendorong penting yang menjaga ritme kerja tetap stabil dan terarah.

### Faktor Penghambat:

Di sisi lain, pelaksanaan administrasi umum masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan dalam pemenuhan dokumen pendukung administrasi, baik dari unit internal maupun dari pihak eksternal. Hal ini berdampak pada penundaan dalam penyelesaian pekerjaan administratif lainnya. Selain itu, terbatasnya sarana penunjang kerja, seperti perangkat kerja yang belum optimal, juga menjadi kendala dalam mempercepat proses administrasi dan pengarsipan secara efisien.

### Solusi Alternatif:

Salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah standardisasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses administrasi, mulai dari tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, pengarsipan, pengelolaan kepegawaian, hingga layanan administrasi internal. SOP yang jelas dan mudah dipahami akan mengurangi kesalahan prosedur serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, optimalisasi digitalisasi administrasi menjadi langkah strategis. Penerapan sistem persuratan elektronik, arsip digital, dan manajemen dokumen terintegrasi akan mempercepat proses kerja, meminimalkan kehilangan dokumen, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Digitalisasi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen.

Dinas Pendidikan juga perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan tata naskah dinas, kearsipan, pelayanan publik, serta etika administrasi perkantoran. Aparatur yang memahami regulasi dan prosedur kerja akan mampu menjalankan administrasi secara profesional dan responsif.

Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai standar. Evaluasi rutin dapat mengidentifikasi kendala lebih awal dan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan.

## 11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa penunjang yang mendukung pelayanan umum di perangkat daerah dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan berkesinambungan. Jasa penunjang seperti layanan kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, hingga dukungan logistik memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran operasional pelayanan publik.

#### Faktor Pendorong:

Terlaksananya jasa penunjang pelayanan umum secara optimal didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tersusunnya perencanaan kegiatan yang jelas dan terarah, serta adanya dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit kerja serta keterlibatan penyedia jasa yang profesional juga menjadi pendorong utama dalam menjamin kualitas dan kelancaran layanan penunjang. Komitmen dari pihak internal dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja turut memperkuat kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

#### Faktor Penghambat:

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan jasa penunjang pelayanan umum. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan dalam penyediaan atau pengadaan sarana penunjang, yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan harian. Selain itu, terbatasnya personel pendukung di beberapa unit kerja juga mengurangi efektivitas pelayanan, khususnya dalam hal respons cepat terhadap kebutuhan teknis atau darurat. Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap fasilitas juga dapat menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

#### Solusi Alternatif:

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar perlu memastikan perencanaan kebutuhan jasa dilakukan secara tepat dan berbasis prioritas. Identifikasi kebutuhan riil seperti jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, layanan teknologi informasi, serta jasa administrasi pendukung harus disusun secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja penyedia jasa secara berkala melalui indikator yang terukur, seperti ketepatan waktu, kualitas hasil pekerjaan, dan responsivitas layanan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kontrak maupun pengambilan keputusan di tahun berikutnya.

Penguatan koordinasi internal antarbidang serta penunjukan pejabat penanggung jawab yang jelas juga akan meningkatkan efektivitas pengelolaan jasa penunjang. Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan, dan pengawasan yang konsisten,

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dapat memastikan jasa penunjang berjalan optimal dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

## 12. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat terlaksana secara tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersedianya barang milik daerah secara tepat mendukung kelancaran operasional, pelayanan publik, serta efektivitas kinerja perangkat daerah.

### Faktor Pendorong:

Kelancaran pengadaan barang milik daerah didorong oleh beberapa hal, di antaranya adalah tersusunnya perencanaan kebutuhan barang secara matang dan tepat sasaran oleh masing-masing unit kerja. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup, koordinasi antar tim pengadaan, serta keterbukaan dalam proses pengadaan menjadi faktor penting yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengadaan barang. Pemanfaatan sistem informasi pengadaan secara elektronik (e-procurement) juga turut mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.

### Faktor Penghambat:

Meskipun proses pengadaan telah direncanakan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterlambatan penyampaian usulan kebutuhan barang, yang berdampak pada lambatnya proses pengadaan secara keseluruhan. Selain itu, perubahan spesifikasi atau revisi kebutuhan barang di tengah proses pengadaan, serta keterlambatan dari pihak penyedia atau rekanan, juga menjadi tantangan yang menghambat ketersediaan barang tepat waktu. Hambatan administratif dan teknis dalam proses verifikasi dan pencairan anggaran juga kerap mempengaruhi kelancaran pengadaan.

### Solusi Alternatif:

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar perlu memperkuat proses perencanaan berbasis kebutuhan riil. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) harus didasarkan pada hasil inventarisasi aset, analisis kondisi barang, serta prioritas program pendidikan. Sinkronisasi antara perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan menjadi langkah penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian spesifikasi, volume, maupun waktu pengadaan.

Selain itu, perlu dilakukan verifikasi teknis sebelum dan sesudah pengadaan untuk

memastikan barang yang diterima sesuai spesifikasi dan dapat langsung dimanfaatkan. Penguatan koordinasi antara pejabat perencanaan, pejabat pengadaan, pengurus barang, dan bidang teknis juga sangat diperlukan agar seluruh tahapan berjalan terintegrasi. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi pengadaan serta pemanfaatan barang menjadi langkah pengendalian untuk mencegah pengadaan yang tidak tepat sasaran.

13. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja "Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan" bertujuan memastikan bahwa seluruh barang milik daerah yang mendukung operasional perangkat daerah dirawat dan dipelihara secara tepat waktu dan terencana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi, kualitas, dan umur manfaat aset tersebut sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pelaksanaan pemeliharaan yang terjadwal sesuai rencana membantu mencegah kerusakan yang lebih parah dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga. Selain itu, pemeliharaan yang terorganisir dengan baik juga memperpanjang masa pakai barang milik daerah dan mendukung keberlangsungan kegiatan perangkat daerah.

Faktor Pendukung:

a. Perencanaan Pemeliharaan yang Matang:

Penyusunan rencana pemeliharaan yang terstruktur dan berdasarkan data kondisi barang secara periodik memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan berjalan sesuai jadwal.

b. Komitmen dan Kesadaran Pengelola Aset:

Tingginya kesadaran dan komitmen petugas pengelola barang milik daerah dalam menjalankan pemeliharaan rutin meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

c. Ketersediaan Anggaran:

Dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan memastikan tersedianya sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan sesuai kebutuhan.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Adanya mekanisme monitoring yang konsisten dan evaluasi berkala memudahkan pengendalian pelaksanaan dan perbaikan proses pemeliharaan.

#### Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:

Kekurangan tenaga teknis yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan dapat menghambat kelancaran proses pemeliharaan.

b. Keterbatasan Anggaran:

Jika anggaran dialokasikan terbatas atau mengalami penundaan, pelaksanaan pemeliharaan bisa terganggu dan tidak sesuai jadwal.

c. Pengelolaan Data Aset yang Kurang Akurat:

Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data kondisi dan jumlah barang milik daerah menyulitkan perencanaan dan prioritas pemeliharaan.

d. Kendala Teknis dan Logistik:

Sulitnya pengadaan suku cadang atau bahan pendukung pemeliharaan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan.

#### 14. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan telah menunjukkan komitmen nyata dengan melakukan verifikasi dan validasi (verval) data ATS secara berkala. Selain itu, pendekatan persuasif kepada anak-anak yang terdata sebagai ATS juga dilakukan, baik melalui kunjungan langsung ke rumah, kerja sama dengan tokoh masyarakat, maupun dengan pemberian informasi tentang manfaat pendidikan. Upaya ini telah mendorong sebagian anak untuk kembali melanjutkan pendidikan formal atau nonformal, sehingga berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan.

#### Faktor Pendorong:

a. Pelaksanaan Verval ATS oleh Dinas Pendidikan:

Kegiatan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara sistematis telah menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga memudahkan identifikasi ATS dan penentuan strategi penanganan yang tepat sasaran.

b. Pendekatan Personal kepada ATS:

Langkah aktif dari Dinas Pendidikan dalam melakukan pendekatan secara langsung kepada anak-anak yang terdata sebagai ATS telah memberikan hasil positif dalam mendorong mereka kembali bersekolah, baik di jalur formal maupun pendidikan

kesetaraan.

c. Dukungan dari Masyarakat dan Stakeholder:

Pelibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lembaga sosial turut memperkuat proses advokasi terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah.

Faktor Penghambat:

a. Perbedaan Tanggal Cutoff Data Dapodik dan Emis:

Ketidaksinkronan antara data pada sistem Dapodik (pendidikan formal) dan Emis (pendidikan keagamaan/nonformal) menyebabkan beberapa anak yang sebetulnya sudah lulus namun tidak melanjutkan (LTM) masih terbaca sebagai ATS. Hal ini berdampak pada naiknya jumlah ATS dalam sistem meskipun di lapangan kasusnya sudah tertangani.

b. Keterbatasan Koordinasi Antarsistem Data:

Belum optimalnya integrasi antarplatform pendataan menyebabkan proses validasi memerlukan waktu dan penyesuaian manual, sehingga mempengaruhi keakuratan pelaporan capaian partisipasi pendidikan.

Solusi Alternatif:

a. Pemutakhiran dan Integrasi Data ATS

Melakukan pendataan aktif berbasis desa/kelurahan serta sinkronisasi data dengan sekolah dan instansi terkait agar intervensi lebih akurat.

b. Program Penjangkauan dan Pendampingan

Membentuk tim penjangkauan anak tidak sekolah yang melibatkan sekolah, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga.

c. Penguatan Program Pendidikan Kesetaraan

Mengoptimalkan layanan Paket A, B, dan C bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal agar tetap memperoleh layanan pendidikan.

d. Pemberian Bantuan dan Insentif Pendidikan

Meningkatkan akses bantuan pendidikan atau dukungan perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu.

e. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan kampanye pentingnya pendidikan melalui kegiatan desa, media sosial, dan forum masyarakat guna meningkatkan kesadaran.

f. Kolaborasi Lintas Sektor

Bekerja sama dengan dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta instansi lainnya untuk menangani faktor sosial-ekonomi penyebab ATS.

15. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdapat beberapa faktor dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di antaranya:

Faktor Pendorong:

a. Peningkatan Jumlah Guru yang Lulus PPG Piloting:

Banyak guru telah menyelesaikan proses PPG melalui program percontohan (piloting), yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik.

b. Penempatan Guru PPPK ke Sekolah Tujuan:

Penugasan guru-guru yang lulus seleksi PPPK ke satuan pendidikan yang membutuhkan telah memperkuat upaya pemerataan guru, terutama di wilayah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga pengajar.

c. Dukungan Kebijakan Nasional dan Daerah:

Adanya regulasi dan kebijakan afirmatif untuk peningkatan kompetensi dan distribusi guru menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan berbagai program peningkatan SDM pendidikan.

Faktor Penghambat:

a. Masih Ada Guru yang Belum Berkualifikasi S1:

Beberapa guru belum memenuhi syarat kualifikasi minimal (S1/D4), sehingga tidak dapat mengikuti seleksi PPG. Hal ini menghambat peningkatan kompetensi secara formal.

b. Keterlambatan dalam Proses PPG:

Ditemukan beberapa kasus di mana guru yang telah dipanggil untuk mengikuti PPG tidak dapat melanjutkan karena terlambat dalam melengkapi dokumen atau pemberkasan, yang menyebabkan tertundanya peningkatan kualifikasi mereka.

c. Pensiunnya Guru Tanpa Pengganti yang Cepat:

Pada triwulan ini terdapat sejumlah guru yang memasuki masa pensiun, namun proses penggantian atau pengisian formasi baru belum optimal, sehingga terjadi kekurangan tenaga pengajar di beberapa sekolah.

Solusi Alternatif:

a. Pemetaan dan Penataan Distribusi PTK PAUD

Melakukan pemetaan kebutuhan guru PAUD berbasis data untuk memastikan pemerataan distribusi sesuai rasio kebutuhan.

b. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

Mendorong pendidik PAUD untuk melanjutkan pendidikan formal serta menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi secara berkala.

c. Penguatan Program Pembinaan dan Supervisi

Melaksanakan supervisi akademik dan manajerial secara rutin guna meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan PAUD.

d. Pemberian Insentif dan Penghargaan

Mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui insentif daerah serta pemberian penghargaan bagi pendidik berprestasi.

e. Pemerataan Akses Pelatihan Berbasis Wilayah

Mengadakan pelatihan berbasis klaster/kecamatan atau memanfaatkan metode daring agar guru di wilayah terpencil tetap terjangkau.

f. Penguatan Komunitas Praktisi PAUD

Mendorong aktifnya KKG atau forum pendidik PAUD sebagai wadah berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran.

16. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pencapaian target sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B dan Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B.

Faktor Pendukung:

a. Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan

Adanya kebijakan nasional terkait akreditasi satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) menjadi dasar peningkatan mutu kelembagaan.

b. Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam pembinaan dan pendampingan akreditasi mendorong kesiapan satuan pendidikan memenuhi standar mutu.

c. Ketersediaan Satuan PAUD dan PKBM

Banyaknya lembaga PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Banjar menjadi potensi untuk meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.

d. Program Pembinaan dan Supervisi

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta bimbingan teknis penyusunan dokumen akreditasi membantu lembaga lebih siap menghadapi proses penilaian.

e. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Pengelola

Pelatihan manajemen kelembagaan dan peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan mendukung pemenuhan standar akreditasi.

Faktor Penghambat:

a. Kesiapan Dokumen Administratif yang Belum Optimal

Sebagian satuan PAUD dan pendidikan nonformal belum tertib dalam penyusunan dokumen kurikulum, administrasi pembelajaran, dan laporan kelembagaan.

b. Sarana dan Prasarana yang Belum Memenuhi Standar

Keterbatasan ruang belajar, alat permainan edukatif (APE), dan fasilitas pendukung lainnya memengaruhi hasil akreditasi.

c. Keterbatasan SDM Pengelola

Pengelola lembaga belum sepenuhnya memahami indikator dan instrumen akreditasi terbaru.

d. Keterbatasan Pendanaan

Beberapa satuan pendidikan nonformal dan PAUD swasta memiliki keterbatasan

anggaran untuk memenuhi standar sarana prasarana.

e. Rendahnya Kesadaran terhadap Pentingnya Akreditasi

Sebagian lembaga masih menganggap akreditasi sebagai beban administratif, bukan sebagai proses peningkatan mutu.

Solusi Alternatif:

a. Pemetaan dan Prioritisasi Satuan Pendidikan

Melakukan pemetaan satuan PAUD dan pendidikan kesetaraan yang belum atau masih berakreditasi C untuk diprioritaskan pembinaannya.

b. Pendampingan Intensif Pra-Akreditasi

Membentuk tim pendamping tingkat kabupaten untuk membantu penyusunan dokumen, simulasi penilaian, dan perbaikan kelembagaan sebelum visitasi.

c. Penguatan Manajemen Berbasis Mutu

Mendorong penerapan manajemen berbasis sekolah/lembaga dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terdokumentasi baik.

d. Dukungan Sarana dan Prasarana Bertahap

Mengalokasikan bantuan sarana prasarana secara prioritas bagi satuan pendidikan yang siap akreditasi namun terkendala fasilitas.

e. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kepala Satuan

Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait instrumen akreditasi terbaru dan tata kelola kelembagaan.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan evaluasi rutin terhadap progres pemenuhan standar mutu agar lembaga siap saat pengajuan akreditasi.

17. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Dalam pencapaian target terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, di antaranya:

Faktor Pendorong:

a. Pelatihan dan Pendampingan Rutin

Dinas Pendidikan secara konsisten memberikan pelatihan serta pendampingan teknis dalam implementasi kurikulum kepada guru dan kepala sekolah, yang meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menjalankan pembelajaran sesuai arah kebijakan kurikulum nasional.

b. Keterlibatan Guru Berpengalaman dalam Muatan Lokal

Proses penyusunan kurikulum muatan lokal dilakukan dengan melibatkan guru-guru yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap karakteristik lokal, sehingga menghasilkan kurikulum yang aplikatif dan mudah diterapkan.

Faktor Penghambat:

a. Belum Efektifnya Implementasi di Beberapa Sekolah

Meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat sekolah yang menghadapi kendala dalam mengimplementasikan kurikulum secara menyeluruh dan konsisten, baik karena keterbatasan SDM, fasilitas, atau kesiapan manajemen sekolah.

b. Kendala Adaptasi terhadap Kurikulum Baru

Perubahan kebijakan kurikulum, seperti transisi ke Kurikulum Merdeka, menuntut penyesuaian yang cepat. Beberapa sekolah membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Solusi Alternatif:

a. Pendampingan Intensif Berbasis Kebutuhan Sekolah

Melakukan pemetaan sekolah berdasarkan tingkat kesiapan implementasi kurikulum, kemudian memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada sekolah yang masih mengalami kendala. Pendampingan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, klinik kurikulum, maupun pembinaan per klaster wilayah agar lebih efektif dan terarah.

b. Penguatan Peran Pengawas dan Guru Inti

Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dan guru inti sebagai mentor dalam membantu penyusunan perangkat ajar, perencanaan pembelajaran, serta pelaksanaan asesmen. Pendekatan coaching dan mentoring akan mempercepat peningkatan kapasitas sekolah yang belum optimal.

c. Penyediaan Contoh Perangkat Ajar Terstandar

Menyusun dan mendistribusikan contoh modul ajar, perangkat pembelajaran, serta panduan integrasi muatan lokal yang aplikatif sebagai referensi bagi satuan pendidikan,

sehingga guru memiliki acuan yang jelas dalam implementasi kurikulum.

d. Pelatihan Lanjutan dan Berkelanjutan

Menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang bersifat praktis dan berbasis studi kasus, terutama terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan penguatan pembelajaran berbasis proyek serta muatan lokal. Pelatihan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

e. Penguatan Manajemen Sekolah

Memberikan pembinaan kepada kepala sekolah terkait manajemen perubahan dan kepemimpinan pembelajaran agar mampu menggerakkan seluruh warga sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum secara konsisten.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan supervisi akademik dan evaluasi rutin untuk memastikan kurikulum diterapkan sesuai standar, sekaligus memberikan umpan balik konstruktif bagi perbaikan berkelanjutan.

18. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Selama periode pelaporan ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai target.

Faktor Pendorong:

a. Komitmen PTK PAUD terhadap Tata Kelola yang Baik:

Kesadaran dan tanggung jawab PTK dalam mengelola administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel memberikan dampak positif pada kualitas laporan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Dukungan Pemerintah melalui Regulasi dan Pedoman Teknis:

Tersedianya pedoman dan peraturan yang jelas menjadi panduan penting bagi satuan PAUD dalam menjalankan manajemen kelembagaannya secara tertib dan profesional.

Faktor Penghambat:

a. Kurangnya Kemampuan PTK dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan:

Banyak PTK belum memiliki pelatihan atau latar belakang manajerial, sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun laporan dan menjalankan pencatatan keuangan yang sesuai standar.

b. Keterbatasan Teknologi Pendukung:

Minimnya perangkat teknologi dan akses internet menghambat efisiensi dalam pengelolaan data administrasi dan pelaporan keuangan berbasis sistem atau daring.

c. Keterlambatan Penyampaian Laporan:

Beberapa satuan PAUD masih belum tepat waktu dalam menyampaikan laporan administrasi dan keuangan, yang dapat mengganggu proses verifikasi, monitoring, dan akuntabilitas kelembagaan.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Kapasitas PTK melalui Pelatihan Manajerial dan Keuangan

Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala terkait administrasi kelembagaan, penyusunan laporan, serta pengelolaan keuangan sederhana sesuai standar yang berlaku. Pelatihan dapat dikemas dalam bentuk bimbingan teknis, workshop praktik penyusunan laporan, maupun pendampingan langsung di satuan PAUD.

b. Pendampingan Intensif dan Klinik Administrasi

Membentuk tim pendamping atau membuka “klinik administrasi” tingkat kecamatan/kabupaten untuk membantu satuan PAUD yang mengalami kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan. Pendekatan ini bersifat konsultatif dan solutif sehingga permasalahan dapat segera ditangani.

c. Penyederhanaan Format dan Standarisasi Dokumen

Menyusun format administrasi dan laporan keuangan yang lebih sederhana, seragam, dan mudah dipahami oleh PTK, sehingga meminimalkan kesalahan teknis dan meningkatkan ketertiban pelaporan.

d. Penguatan Dukungan Teknologi

Mendorong penggunaan aplikasi sederhana atau sistem pelaporan berbasis digital yang mudah diakses. Untuk satuan dengan keterbatasan sarana, dapat dilakukan berbagi fasilitas (sharing device) atau pemanfaatan pusat layanan di kantor kecamatan/desa.

e. Penetapan Timeline dan Pelaporan

Menyusun jadwal pelaporan yang jelas disertai mekanisme pengingat serta monitoring berkala agar keterlambatan dapat diminimalkan.

f. Pemberian Apresiasi dan Pembinaan Bertahap

Memberikan penghargaan kepada satuan PAUD yang tertib administrasi dan tepat waktu dalam pelaporan, serta melakukan pembinaan khusus bagi satuan yang masih mengalami kendala.

19. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendorong:

a. Kesiediaan dan Upaya Calon Penerima Bantuan dalam Memenuhi Persyaratan:

Beberapa calon penerima bantuan biaya personal telah mulai melengkapi persyaratan administratif, seperti membuka rekening di Bank KalSel sebagai syarat pencairan bantuan. Ini menjadi indikator positif atas meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sejak usia dini.

Faktor Penghambat:

a. Terbatasnya Anggaran APBD untuk Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu:

Keterbatasan alokasi dana dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam perluasan cakupan program bantuan. Akibatnya, program belum dapat menjangkau seluruh anak dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan akses pendidikan PAUD.

Solusi Alternatif:

a. Optimalisasi dan Prioritas Penyaluran Anggaran

Melakukan pemetaan dan verifikasi data peserta didik tidak mampu secara lebih akurat agar bantuan yang tersedia benar-benar tepat sasaran. Skema prioritas dapat diterapkan bagi keluarga dengan tingkat kerentanan tertinggi sehingga dampak bantuan lebih maksimal meskipun anggaran terbatas.

b. Penguatan Kolaborasi dan Sumber Pendanaan Alternatif

Mengupayakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti dunia usaha, lembaga sosial, dan program CSR untuk mendukung pembiayaan pendidikan anak usia dini. Sinergi lintas sektor dapat membantu memperluas jangkauan penerima manfaat di luar keterbatasan APBD.

c. Integrasi dengan Program Bantuan Sosial Lain

Mengintegrasikan data penerima bantuan pendidikan dengan program bantuan sosial yang telah berjalan, sehingga intervensi lebih terkoordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

20. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Upaya Satuan PAUD dalam Menciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman:

Satuan PAUD telah berinisiatif menjaga lingkungan belajar yang memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis bagi anak dan seluruh warga sekolah.

b. Komitmen terhadap Pendidikan Inklusif:

Ada kesadaran dan komitmen dari beberapa satuan PAUD untuk menciptakan ruang belajar yang ramah terhadap keberagaman, dengan mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik.

Faktor Penghambat:

a. Belum Adanya Regulasi Khusus tentang Keamanan dan Keselamatan Lingkungan PAUD:

Ketiadaan aturan teknis atau standar minimum menyebabkan pelaksanaan tata kelola lingkungan belajar yang aman belum seragam di seluruh satuan pendidikan.

b. Kurangnya Guru yang Terlatih dalam Pendidikan Inklusif:

Masih sedikit tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga layanan belum maksimal.

c. Fasilitas yang Belum Ramah Disabilitas:

Aksesibilitas sekolah, seperti jalur masuk, toilet, dan ruang belajar belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran.

Solusi Alternatif:

a. Penyusunan Pedoman Teknis Keamanan dan Keselamatan PAUD

Dinas Pendidikan dapat menyusun dan menetapkan pedoman teknis atau standar

operasional minimum terkait keamanan dan keselamatan lingkungan PAUD. Pedoman ini mencakup aspek keselamatan bangunan, pengawasan anak, prosedur keadaan darurat, perlindungan anak, serta standar lingkungan belajar yang ramah anak agar implementasinya lebih seragam di seluruh satuan.

b. Penguatan Kapasitas Guru dalam Pendidikan Inklusif

Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pendidikan inklusif, deteksi dini kebutuhan khusus, serta strategi pembelajaran diferensiatif. Pendampingan dapat melibatkan tenaga ahli atau bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusi agar guru lebih siap memberikan layanan yang tepat.

c. Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Ramah Disabilitas

Melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana di satuan PAUD dan mengalokasikan dukungan secara bertahap untuk peningkatan aksesibilitas, seperti jalur landai (ramp), toilet ramah disabilitas, ruang belajar yang fleksibel, serta alat permainan edukatif yang adaptif.

d. Penguatan Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas

Melibatkan orang tua serta komunitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif melalui sosialisasi, forum diskusi, dan kerja bakti lingkungan sekolah.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan supervisi rutin untuk memastikan standar keamanan dan prinsip inklusif diterapkan secara konsisten, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

f. Pemberian Apresiasi bagi Satuan PAUD Ramah Anak dan Inklusif

Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada satuan PAUD yang berhasil menerapkan prinsip keamanan dan inklusivitas dengan baik sebagai motivasi bagi lembaga lain.

21. Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk mendorong satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar tidak hanya melaksanakan kurikulum nasional, tetapi juga mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi daerah, budaya setempat, dan kebutuhan perkembangan anak.

#### Faktor Pendorong:

a. Tersedianya Buku Kurikulum Muatan Lokal Sesuai Kebutuhan:

Buku kurikulum muatan lokal yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan konteks lokal memberikan kemudahan bagi satuan PAUD dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis lokal.

#### Faktor Penghambat:

a. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Belum Maksimal di Satuan PAUD:

Beberapa satuan PAUD masih belum mampu menerapkan kurikulum muatan lokal secara efektif karena keterbatasan pemahaman, pendampingan, dan kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan materi muatan lokal ke dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini.

b. Terbatasnya Tenaga Pendidik yang Kompeten dalam Penyusunan Kurikulum

Tidak semua guru PAUD memiliki kemampuan teknis dalam menyusun kurikulum dan perangkat ajar muatan lokal secara sistematis. Keterbatasan pemahaman terhadap struktur kurikulum dan perencanaan pembelajaran menjadi kendala dalam menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan terstandar.

c. Terbatasnya Dukungan Anggaran

Keterbatasan anggaran daerah memengaruhi pelaksanaan pelatihan, pengembangan materi, serta penyediaan bahan ajar pendukung muatan lokal. Hal ini menyebabkan proses pengembangan belum dapat dilakukan secara optimal dan merata.

#### Solusi Alternatif:

a. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal

Membentuk tim tingkat kabupaten yang terdiri dari pengawas, guru berpengalaman, dan praktisi budaya lokal untuk menyusun kerangka kurikulum dan contoh perangkat ajar yang dapat digunakan bersama oleh seluruh satuan PAUD.

b. Pelatihan Praktis Berbasis Workshop

Menyelenggarakan pelatihan teknis secara bertahap dan berbasis praktik (workshop penyusunan modul ajar muatan lokal), sehingga guru tidak hanya memahami teori tetapi juga menghasilkan produk nyata yang siap digunakan.

c. Optimalisasi Potensi Lokal sebagai Sumber Belajar Murah dan Kontekstual

Memanfaatkan lingkungan sekitar, permainan tradisional, cerita rakyat, serta budaya lokal sebagai media pembelajaran tanpa memerlukan biaya besar, sehingga pengembangan kurikulum tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.

d. Pemanfaatan Buku Muatan Lokal Secara Optimal

Melakukan pendampingan pemanfaatan buku kurikulum muatan lokal yang telah tersedia agar tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pembelajaran.

22. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Adanya Sosialisasi dan Tim Pendamping BOSP

Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi serta membentuk tim pendamping BOSP untuk membantu SPNF dalam memahami dan menyesuaikan pengelolaan administrasi serta keuangan sesuai juknis terbaru. Pendampingan ini menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Faktor Penghambat:

a. Terbitnya Juknis BOSP Baru

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 pada 9 Mei 2025 membawa sejumlah perubahan dalam mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOSP. Perubahan ini menuntut penyesuaian cepat dari SPNF, baik dalam administrasi, pencatatan keuangan, maupun penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Tidak semua pengelola langsung memahami substansi perubahan tersebut.

b. Keterbatasan Pendampingan dan Pembinaan

Jumlah penilik yang terbatas (hanya 1 orang) menyebabkan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara intensif dan merata ke seluruh SPNF. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penyesuaian terhadap juknis terbaru serta potensi kesalahan administrasi.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Sistem Pendampingan Berbasis Klaster

Membagi SPNF dalam beberapa klaster wilayah dan menunjuk koordinator dari satuan yang lebih siap/berpengalaman untuk membantu pendampingan awal, sehingga tidak seluruh beban pembinaan bertumpu pada satu penilik.

b. Pemanfaatan Pendampingan Daring

Mengoptimalkan pertemuan daring (zoom meeting/grup koordinasi) untuk konsultasi rutin, sehingga keterbatasan jumlah penilik tidak menghambat proses pembinaan.

c. Monitoring Berkala dan Evaluasi Tahapan

Melakukan monitoring bertahap (per triwulan) agar kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan segera diberikan solusi sebelum menjadi temuan pemeriksaan.

23. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Alokasi Program Indonesia Pintar (PIP)

Adanya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi peserta didik kurang mampu menjadi stimulus ekonomi agar mereka tetap melanjutkan pendidikan, termasuk pada jalur kesetaraan.

b. Bantuan Perlengkapan Peserta Didik dari Pemerintah Daerah

Dukungan berupa perlengkapan sekolah dari Pemerintah Daerah membantu mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Faktor Penghambat:

a. Persepsi Masyarakat yang Mengutamakan Pendidikan Agama

Sebagian masyarakat masih memandang pendidikan agama sebagai satu-satunya prioritas, sehingga pendidikan umum atau pendidikan kesetaraan dianggap kurang penting. Pola pikir ini menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan formal/kesetaraan karena lebih difokuskan pada pendidikan berbasis keagamaan saja.

b. Rendahnya Pemahaman terhadap Manfaat dan Legalitas Ijazah Kesetaraan

Masih terdapat anggapan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) tidak

memiliki kekuatan hukum atau tidak setara dengan pendidikan formal. Kurangnya informasi mengenai legalitas dan pengakuan ijazah kesetaraan berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut.

Solusi Alternatif:

a. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif melalui desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media sosial mengenai legalitas serta manfaat ijazah pendidikan kesetaraan, termasuk peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

b. Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan

Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan agar pendidikan agama dan pendidikan umum/kesetaraan dapat berjalan berdampingan. Pendekatan ini menekankan bahwa keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

c. Optimalisasi Bantuan Pendidikan

Memastikan bantuan PIP dan bantuan perlengkapan daerah tepat sasaran dan disertai pendampingan, sehingga benar-benar mendorong keberlanjutan belajar peserta didik.

d. Penguatan Legalitas dan Informasi Resmi

Memberikan penjelasan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pendidikan formal sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan studi atau melamar pekerjaan.

## 24. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Terbentuknya Kelompok Belajar Baru di Pondok Pesantren:

Pembentukan kelompok belajar baru menandai meningkatnya partisipasi lembaga nonformal, khususnya pondok pesantren, dalam mendukung layanan pendidikan kesetaraan.

b. Adanya Keinginan Sebagian Pondok Pesantren untuk Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan:

Antusiasme dari beberapa pondok pesantren menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal setara bagi santri dan masyarakat sekitar.

Faktor Penghambat:

a. Tidak Semua Pondok Pesantren Menindaklanjuti Hasil Pemetaan:

Meskipun telah dilakukan pemetaan dan sosialisasi, tidak seluruh pondok pesantren bersedia atau mampu merealisasikan pembukaan program pendidikan kesetaraan, sehingga potensi pengembangan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Solusi Alternatif:

a. Pendekatan Persuasif dan Dialog Intensif

Melakukan kunjungan dan dialog langsung dengan pimpinan pondok pesantren untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai manfaat pendidikan kesetaraan bagi santri, baik dari sisi legalitas ijazah maupun peluang melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Pendekatan ini dilakukan secara persuasif dengan tetap menghormati karakter dan kekhasan pesantren.

b. Penyederhanaan Proses Administrasi Pembukaan Program

Memberikan pendampingan teknis serta bantuan penyusunan dokumen administrasi agar pondok pesantren tidak merasa terbebani oleh prosedur perizinan dan persyaratan teknis.

c. Pemberian Insentif dan Dukungan Fasilitas

Mengupayakan dukungan berupa bantuan sarana prasarana, buku, atau pelatihan tutor sebagai bentuk stimulus agar pesantren lebih siap membuka layanan kesetaraan.

## 25. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pengelola dan Tutor terhadap Lingkungan Belajar yang Aman

Sebagian besar PKBM/SPNF telah berupaya menciptakan suasana belajar yang tertib, bebas kekerasan, dan mendukung kenyamanan peserta didik, termasuk melalui tata tertib dan pengawasan kegiatan belajar.

b. Keberagaman Latar Belakang Peserta Didik

Peserta didik pendidikan kesetaraan berasal dari berbagai usia, sosial, budaya, dan pengalaman hidup. Keberagaman ini menjadi potensi kuat dalam membangun nilai kebhinekaan dan toleransi dalam proses pembelajaran.

c. Dukungan Kebijakan Pendidikan Ramah Anak dan Inklusif

Adanya kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, perlindungan anak, dan anti perundungan menjadi dasar normatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghargai perbedaan.

d. Peran Aktif Pengelola PKBM/SPNF

Sebagian lembaga telah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan orang tua, sehingga tercipta pengawasan sosial yang mendukung keamanan lingkungan belajar.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Beberapa PKBM/SPNF masih menggunakan fasilitas yang terbatas, seperti ruang belajar sempit atau berbagi tempat dengan lembaga lain, sehingga memengaruhi rasa aman dan kenyamanan belajar.

b. Minimnya Pelatihan tentang Pendidikan Inklusif dan Pencegahan Kekerasan

Tidak semua tutor memiliki pemahaman memadai mengenai penanganan konflik, pendekatan inklusif, atau strategi pembelajaran berbasis kebhinekaan.

c. Rendahnya Kesadaran tentang Pentingnya Iklim Sekolah

Sebagian pengelola masih berfokus pada aspek administratif dan kelulusan, sementara penguatan budaya positif, toleransi, dan keamanan belum menjadi prioritas utama.

d. Keberagaman Usia Peserta Didik

e. Perbedaan usia yang cukup jauh dalam satu kelas kesetaraan berpotensi menimbulkan dinamika sosial tertentu apabila tidak dikelola dengan baik.

Solusi Alternatif:

a. Penyusunan dan Penerapan SOP Lingkungan Aman dan Inklusif

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pencegahan kekerasan, perlindungan peserta didik, serta mekanisme penanganan konflik di setiap PKBM/SPNF.

b. Pelatihan Tutor tentang Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas

Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi tutor terkait:

- Pencegahan perundungan
- Pembelajaran toleransi dan kebhinekaan
- Strategi pembelajaran diferensiatif untuk peserta didik dengan kebutuhan beragam

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Moderasi

Mengintegrasikan nilai toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan anti diskriminasi dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan non-akademik.

d. Penataan Ruang Belajar yang Lebih Ramah

Melakukan penataan ruang belajar agar lebih nyaman, aman, dan tidak diskriminatif, meskipun dengan keterbatasan sarana.

e. Pembentukan Tim atau Penanggung Jawab Iklim Lembaga

Menunjuk satu orang koordinator atau tim kecil di PKBM/SPNF yang bertugas memantau dan mengevaluasi iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas secara berkala.

f. Monitoring dan Survei Berkala

Melaksanakan survei sederhana kepada peserta didik untuk mengukur persepsi terhadap rasa aman, penerimaan terhadap keberagaman, dan kenyamanan belajar sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

g. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat

Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan penguatan nilai kebhinekaan dan hidup berdampingan secara harmonis.

26. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Dukungan Dinas dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelatihan:

Dinas pendidikan dan pemda aktif menyelenggarakan atau mengundang guru PAUD untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi, baik secara langsung maupun melalui

kemitraan.

b. Adanya pemberian insentif bagi guru PAUD non-ASN

Faktor penting yang mendorong pendidik untuk lebih aktif mengikuti program pengembangan kompetensi. Insentif ini tidak hanya memberikan penghargaan dan rasa dihargai, tetapi juga meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan komitmen guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Dampaknya, guru terdorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan, workshop, dan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga kualitas layanan pendidikan anak usia dini dapat meningkat secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Anggaran Lembaga PAUD Swadaya:

Banyak lembaga PAUD swasta atau swadaya yang mengalami keterbatasan dana, sehingga tidak dapat mengalokasikan biaya bagi guru untuk mengikuti pelatihan.

b. Kurangnya Motivasi Guru untuk Mengikuti Pelatihan:

Masih ada guru PAUD yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya peningkatan kompetensi, atau merasa terbebani dengan tugas harian sehingga enggan mengikuti pelatihan.

Solusi Alternatif:

a. Beasiswa atau subsidi pelatihan dari pemerintah dan Dinas Pendidikan

Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial langsung bagi guru PAUD di lembaga swadaya untuk mengikuti pelatihan. Hal ini meringankan beban biaya, sehingga guru tetap dapat mengakses program pengembangan kompetensi tanpa terbebani masalah pendanaan.

b. Kemitraan dengan pihak swasta atau yayasan

Lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan perusahaan, yayasan, atau lembaga CSR untuk mendukung biaya pelatihan. Pendekatan ini membuka peluang sumber dana tambahan, memperluas jangkauan pelatihan, dan meningkatkan kualitas program yang tersedia.

c. Pemanfaatan pelatihan daring (online)

Pelatihan berbasis daring atau hybrid dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi bagi guru. Metode ini juga memudahkan guru di daerah terpencil untuk tetap mengikuti program peningkatan kompetensi.

d. Sosialisasi pentingnya pengembangan kompetensi

Peningkatan kesadaran guru tentang pentingnya kompetensi profesional dilakukan melalui kampanye, seminar, atau komunikasi rutin dari dinas terkait. Dengan kesadaran yang meningkat, guru lebih proaktif dan termotivasi untuk mengikuti pelatihan, meskipun menghadapi tantangan lain.

27. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Dukungan Dinas Terkait dan Pemerintah Daerah

Adanya kerja sama yang baik antara dinas pendidikan dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNF.

Faktor Penghambat:

a. Banyak Tenaga Kependidikan PNF Mengajar di Lebih dari Satu Sekolah

Kondisi ini membuat mereka kesulitan mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan karena harus membagi perhatian ke beberapa tempat.

b. Kurangnya Motivasi Guru PNF untuk Mengikuti Pelatihan

Sebagian guru PNF belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya peningkatan kompetensi, atau merasa pelatihan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan atau karier mereka.

Solusi Alternatif:

a. Optimalkan Dukungan Dinas dan Pemerintah Daerah

Menyelenggarakan pelatihan terstruktur dan berkala serta menyediakan fasilitas dan pendanaan untuk mendukung pelatihan.

b. Atasi Guru Mengajar di Beberapa Sekolah

Memberikan jadwal pelatihan fleksibel (akhir pekan, libur sekolah) atau pelatihan daring atau modular agar dapat diikuti sesuai waktu luang. Serta melakukan koordinasi antar-sekolah untuk memberi izin tanpa mengganggu belajar.

c. Tingkatkan Motivasi Guru PNF

Memberikan insentif atau sertifikasi resmi sebagai penghargaan. Memberikan materi pelatihan relevan dan aplikatif, berdampak langsung pada pengajaran. Sosialisasikan pentingnya pengembangan kompetensi untuk profesionalisme, karier, dan kesejahteraan.

28. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan Profesi Guru:

Adanya pelatihan seperti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PPG) membantu guru meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pendidikan masa kini.

b. Tersedianya Program Beasiswa:

Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah maupun pihak lain memberikan peluang bagi guru untuk menempuh pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Faktor Penghambat:

a. Tingkat Kemampuan Ekonomi yang Beragam:

Tidak semua guru memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melanjutkan studi, terutama di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi rendah.

b. Cukup Rendahnya Gaji/Upah Guru PAUD:

Pendapatan yang minim membuat guru kesulitan membiayai pendidikan lanjutan secara mandiri.

c. Beban Kerja Ganda Guru PAUD:

Banyak guru PAUD harus membagi waktu antara mengajar, mengurus keluarga, dan pekerjaan tambahan lainnya, sehingga sulit fokus pada studi lanjutan.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Akses Beasiswa dan Subsidi Pendidikan

Pemerintah dan lembaga terkait dapat memperluas program beasiswa, termasuk beasiswa penuh atau subsidi biaya kuliah. Kerjasama dengan pihak swasta atau yayasan

untuk pendanaan tambahan bagi guru berprestasi.

b. Pelatihan dan Studi Fleksibel

Menyediakan program pendidikan lanjutan daring, sehingga guru dapat belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan..

c. Peningkatan Insentif dan Kesejahteraan Guru

Menambah tunjangan, insentif, atau penghargaan bagi guru yang menempuh pendidikan lanjutan.

d. Pendampingan dan Mentoring

Memberikan mentoring atau bimbingan akademik agar guru terbantu dalam menyelesaikan studi lanjutan.

29. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Mutu PAUD

Adanya dukungan kebijakan dan perencanaan daerah dalam penguatan tata kelola satuan PAUD, termasuk penataan kepala sekolah dan pengawas.

b. Program Diklat dan Pengembangan Kompetensi

Tersedianya pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas PAUD untuk memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.

c. Pendataan dan Pemetaan Satuan PAUD

Sistem pendataan yang baik membantu mengidentifikasi jumlah satuan PAUD serta kebutuhan riil kepala sekolah dan pengawas sesuai rasio yang ditetapkan.

d. Koordinasi Antarbidang di Lingkungan Dinas Pendidikan

Sinergi antara bidang PAUD, kepegawaian, dan perencanaan mendukung proses penempatan dan distribusi tenaga kependidikan.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan SDM yang Memenuhi Syarat

Tidak semua guru PAUD memenuhi kualifikasi administratif dan kompetensi untuk diangkat sebagai kepala sekolah atau pengawas.

b. Sebaran Wilayah yang Luas dan Beragam

Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan distribusi tenaga tidak merata.

c. Rangkap Tugas Kepala Sekolah

Masih terdapat kepala PAUD yang merangkap sebagai guru kelas karena keterbatasan tenaga, sehingga rasio ideal belum tercapai.

d. Keterbatasan Anggaran dan Formasi

Keterbatasan alokasi anggaran dan formasi pengawas berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar rasio.

Solusi Alternatif:

a. Optimalisasi Pemetaan dan Perencanaan Formasi

Melakukan analisis kebutuhan berbasis data untuk memastikan jumlah kepala sekolah dan pengawas sesuai dengan jumlah satuan PAUD.

b. Peningkatan Rekrutmen dan Diklat Berkelanjutan

Memperluas kesempatan mengikuti diklat calon kepala sekolah dan pengawas untuk menyiapkan SDM yang memenuhi kualifikasi.

c. Kebijakan Pemerataan dan Insentif Wilayah Terpencil

Memberikan insentif tambahan atau tunjangan khusus bagi kepala sekolah dan pengawas yang bertugas di wilayah sulit dijangkau.

d. Penguatan Supervisi Berbasis Teknologi

Memanfaatkan sistem pelaporan dan pembinaan daring untuk membantu pengawas menjangkau lebih banyak satuan PAUD secara efektif.

e. Koordinasi dengan BKPSDM dan Pemerintah Daerah

Mengusulkan penambahan formasi serta dukungan anggaran dalam perencanaan kepegawaian daerah agar pemenuhan rasio dapat tercapai secara bertahap.

30. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Dukungan Pemerintah Daerah

Adanya program wajib belajar serta dukungan anggaran pendidikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah.

b. Kerja Sama Lintas Sektor

Sinergi antara Dinas Pendidikan, perangkat desa, dan lembaga sosial memperkuat proses pendataan dan penjangkauan anak tidak sekolah.

c. Program Bantuan Sosial Dan Beasiswa Daerah

Bantuan biaya pendidikan membantu keluarga kurang mampu agar anak tetap melanjutkan sekolah.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Program “Tuntas Banjar”

Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak.

e. Pemerataan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas yang semakin merata membantu meningkatkan akses dan kenyamanan belajar.

Faktor Penghambat:

a. Kondisi Ekonomi Keluarga Yang Lemah

Keterbatasan ekonomi membuat sebagian anak harus membantu orang tua bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah.

b. Jarak Sekolah Yang Jauh

Di wilayah pedesaan atau terpencil, akses menuju sekolah cukup sulit dan membutuhkan biaya serta waktu tempuh yang panjang.

c. Kurangnya Pendataan Yang Akurat Dan Terintegrasi

Data anak tidak sekolah belum sepenuhnya valid dan terbaru, sehingga intervensi program sering tidak tepat sasaran.

d. Perkawinan Usia Anak Dan Faktor Sosial Budaya

Praktik perkawinan usia dini serta pandangan sosial tertentu masih memengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan.

e. Keterbatasan Fasilitas Belajar

Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, terutama di daerah terpencil atau sekolah dengan jumlah siswa sedikit, menurunkan minat belajar.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Bantuan Ekonomi dan Insentif Pendidikan

Memperluas bantuan sosial bersyarat bagi keluarga kurang mampu dengan syarat anak tetap bersekolah serta memberikan bantuan perlengkapan sekolah.

b. Peningkatan Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil

Pengadaan layanan sekolah jarak jauh, kelas filial, atau pendidikan nonformal.

c. Penguatan Sistem Pendataan Terpadu

Membangun sistem pendataan berbasis desa yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala dan melibatkan RT/RW dan perangkat desa dalam verifikasi data anak tidak sekolah.

d. Edukasi dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak perkawinan dini terhadap pendidikan dan masa depan anak.

e. Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana

Pengalokasian anggaran prioritas untuk perbaikan fasilitas sekolah di wilayah terpencil serta pemanfaatan teknologi pembelajaran sederhana untuk mendukung sekolah dengan jumlah siswa terbatas.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkala Program “Tuntas Banjar”

Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian program dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan agar penanganan anak tidak sekolah lebih tepat sasaran.

31. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

#### Faktor Pendukung:

##### a. Komitmen Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu

Adanya kebijakan dan dukungan pembiayaan dari Dinas Pendidikan menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan sekolah.

##### b. Peran Aktif Kepala Sekolah, Guru, Dan Pengawas

Keterlibatan aktif dalam pembinaan dan pendampingan proses akreditasi memperkuat kesiapan sekolah dalam memenuhi standar mutu.

##### c. Peningkatan Sarana Prasarana Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dukungan pembiayaan melalui Dana DAK dan pemanfaatan Dana BOS sesuai juknis membantu sekolah melengkapi fasilitas serta sistem administrasi berbasis digital untuk mendukung akreditasi.

#### Faktor Penghambat:

##### a. Keterbatasan Sarana, Prasarana, Dan Tenaga Pendidik

Masih terdapat sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang belum memiliki fasilitas belajar memadai serta kekurangan guru sesuai kebutuhan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemenuhan standar nasional pendidikan.

##### b. Kapasitas Manajerial Sekolah Dan Pemahaman Instrumen Akreditasi Belum Merata

Tidak semua kepala sekolah dan tim manajemen memahami secara optimal standar dan instrumen akreditasi, sehingga persiapan administrasi dan mutu pembelajaran belum maksimal.

##### c. Keterbatasan Jumlah Pengawas

Jumlah pengawas yang terbatas menyebabkan pembinaan, supervisi, dan pendampingan akreditasi belum menjangkau seluruh satuan pendidikan secara intensif dan berkelanjutan.

#### Solusi Alternatif:

##### a. Prioritas Pemerataan Sarana dan Tenaga Pendidik

Pengalokasian Dana DAK dan BOS diprioritaskan untuk sekolah dengan kebutuhan tertinggi, khususnya di wilayah terpencil. Redistribusi atau penambahan tenaga pendidik dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

b. Penguatan Kapasitas Manajerial Sekolah

Pelatihan manajemen sekolah dan pemahaman instrumen akreditasi bagi kepala sekolah serta tim manajemen perlu ditingkatkan. Pembentukan tim pendamping kabupaten membantu sekolah dalam persiapan akreditasi.

c. Optimalisasi Peran Pengawas

Pembinaan dilakukan secara terjadwal dan berbasis prioritas sekolah yang akan akreditasi. Supervisi daring dimanfaatkan untuk menjangkau sekolah dengan keterbatasan akses.

d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi berkala dilakukan untuk memantau kesiapan sekolah. Sistem pelaporan digital membantu pemantauan pemenuhan standar secara berkelanjutan.

e. Peningkatan Kolaborasi dan Praktik Baik

Sekolah berakreditasi baik menjadi rujukan bagi sekolah lain. Forum berbagi praktik baik memperkuat peningkatan mutu secara kolektif.

32. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pelatihan guru oleh BGP Kalimantan Selatan dan Disdik Kabupaten Banjar

Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi berbasis praktik baik.

b. Pemanfaatan Rapor Pendidikan

Data capaian literasi dan numerasi digunakan sebagai dasar perencanaan program berbasis kebutuhan.

c. Dukungan Kebijakan Daerah

Literasi dan numerasi diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran sebagai prioritas peningkatan mutu.

d. Pemanfaatan media digital dan alat peraga sederhana

Mendukung pembelajaran matematika dan literasi agar lebih kontekstual dan menarik.

## Faktor Penghambat:

### a. Rendahnya Kemampuan Literasi Dan Numerasi

Sebagian sekolah dasar, terutama di wilayah dengan keterbatasan guru matematika, masih menunjukkan capaian literasi dan numerasi yang rendah.

### b. Keterbatasan Sarana Pembelajaran Kontekstual

Minimnya alat peraga dan media pembelajaran di sekolah pedesaan menghambat pemahaman konsep secara konkret.

### c. Pendekatan Pembelajaran Berorientasi Hafalan

Pembelajaran belum sepenuhnya mendorong pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

### d. Minimnya Dukungan Lingkungan Keluarga

Budaya membaca dan berhitung di rumah masih rendah, serta keterlibatan orang tua belum optimal.

### e. Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Asesmen

Hasil asesmen literasi dan numerasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan pembelajaran.

## Solusi Alternatif:

### a. Peningkatan Kompetensi Guru Berkelanjutan

Pelatihan berbasis praktik kelas, pendampingan, dan komunitas belajar guru untuk memperkuat metode pembelajaran kontekstual.

### b. Penyediaan Alat Peraga dan Media Sederhana

Pengadaan alat bantu belajar murah dan kontekstual, terutama untuk sekolah pedesaan.

### c. Transformasi Metode Pembelajaran

Mendorong pendekatan berbasis pemecahan masalah dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

### d. Pelibatan Orang Tua dan Program Literasi Rumah

Kampanye membaca di rumah, lembar aktivitas numerasi keluarga, dan komunikasi rutin sekolah-orang tua.

e. Optimalisasi Tindak Lanjut Asesmen

Penyusunan program remedial dan pengayaan berbasis hasil asesmen sekolah.

33. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pelatihan dan Pendampingan yang Rutin:

Pemerintah daerah dan dinas pendidikan secara aktif menyelenggarakan pelatihan serta pendampingan penerapan kurikulum kepada guru dan kepala sekolah.

b. Keterlibatan Guru Berpengalaman dalam Penyusunan Muatan Lokal:

Proses penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru-guru senior yang memahami konteks budaya dan kebutuhan peserta didik, sehingga lebih tepat guna.

Faktor Penghambat:

a. Sebagian Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum secara Efektif:

Masih ada satuan pendidikan yang belum optimal dalam menerapkan Kurikulum Nasional dan belum mengembangkan muatan lokal secara terarah.

b. Keterbatasan SDM dan Pemahaman Kurikulum:

Tidak semua guru memahami secara mendalam konsep dan implementasi kurikulum, baik dari sisi perencanaan pembelajaran maupun penilaiannya.

c. Fasilitas dan Sarana Pendukung yang Belum Merata:

Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan sarana pendukung untuk mengimplementasikan kurikulum secara maksimal.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan

Monitoring dan evaluasi berkala memastikan penerapan Kurikulum Nasional dan muatan lokal berjalan sesuai standar. Penyusunan panduan teknis yang sederhana membantu sekolah memahami langkah implementasi secara praktis. Penetapan sekolah percontohan menjadi rujukan praktik baik bagi satuan pendidikan lain.

b. Peningkatan Kompetensi dan Pemahaman Guru

Pelatihan berbasis praktik kelas meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar dan sistem penilaian. Komunitas belajar seperti KKG/MGMP menjadi wadah berbagi pengalaman dan solusi. Guru berpengalaman dapat berperan sebagai mentor untuk mendampingi rekan sejawat.

c. Pemerataan Sarana dan Dukungan Fasilitas

Penggunaan DAK dan BOS diprioritaskan bagi sekolah dengan keterbatasan sarana. Guru didorong mengembangkan media pembelajaran sederhana dan kontekstual. Pemanfaatan teknologi digital memperluas akses terhadap bahan ajar dan referensi kurikulum.

d. Optimalisasi Peran Guru Senior dalam Muatan Lokal

Guru senior dilibatkan dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum muatan lokal agar sesuai konteks daerah. Praktik baik didokumentasikan sebagai referensi dan inspirasi bagi sekolah lain.

34. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Banyak Guru Telah Menyelesaikan PPG secara Piloting

Hal ini memperkuat kualitas guru dalam hal kompetensi pedagogik dan profesional, sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. Beberapa Guru Lulus PPPK dan Sudah Mengajar di Sekolah Tujuan

Distribusi guru melalui formasi PPPK turut membantu mengisi kekurangan guru di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Faktor Penghambat:

a. Masih Ada Guru yang Belum Berpendidikan S-1

Ketiadaan kualifikasi akademik minimal menjadi kendala dalam mengikuti PPG dan proses peningkatan kompetensi lainnya.

b. Beberapa Guru Terlambat Melengkapi Pemberkasan PPG

Meskipun sudah dipanggil, tidak sedikit guru yang gagal mengikuti PPG karena kendala administratif.

c. Beberapa Guru Pensiun di Tahun Ini

Jumlah guru yang pensiun belum sebanding dengan penambahan guru baru, menyebabkan kekurangan tenaga pendidik di beberapa sekolah.

d. Guru yang Belum Dua Tahun Terdaftar di Dapodik Tidak Bisa Mendaftar PPPK:

Aturan ini membatasi kesempatan guru-guru baru untuk mengikuti seleksi dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan guru secara cepat.

Solusi Alternatif:

a. Percepatan Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru

Fasilitasi guru yang belum S-1 melalui program RPL atau kuliah lanjutan, serta berikan beasiswa atau subsidi agar kualifikasi akademik tercapai.

b. Penguatan Pendampingan Administrasi PPG

Bentuk tim pendamping pemberkasan dan lakukan sosialisasi rutin agar guru melengkapi dokumen tepat waktu.

c. Antisipasi Kekurangan Guru Akibat Pensiun

Pemetaan kebutuhan guru berbasis data pensiun, usulkan penambahan formasi PPPK/ASN, dan redistribusi guru jika ada ketimpangan.

d. Optimalisasi Rekrutmen PPPK

Beri kebijakan afirmasi bagi guru baru dan pendampingan agar memenuhi syarat administrasi secara cepat.

e. Pemanfaatan Guru yang Lulus PPG dan PPPK

Tempatkan guru lulus PPG/PPPK di sekolah prioritas dan jadikan mereka mentor untuk meningkatkan kualitas guru lainnya.

35. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pelatihan dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan

Dinas pendidikan rutin memberikan pelatihan kepada bendahara dan guru terkait prosedur pengelolaan dana BOS.

b. Pendampingan Penginputan Aset ke e-BMD

Sekolah mendapatkan bimbingan dalam mencatat aset dan barang milik daerah ke aplikasi e-BMD sehingga laporan lebih transparan dan akurat.

c. Kebijakan Daerah yang Jelas

Regulasi pengelolaan keuangan dan aset yang ditetapkan pemerintah daerah memberikan pedoman resmi bagi sekolah dalam administrasi keuangan.

Faktor Penghambat:

a. Pengelolaan Dana BOS yang Belum Sesuai Ketentuan

Masih ada sekolah dengan rekening yang tidak tercatat resmi atau laporan keuangan yang belum lengkap, sehingga menimbulkan ketidaktertiban administrasi.

b. Keterlambatan Pencairan Dana

Dana BOS atau dukungan keuangan yang terlambat diterima berdampak pada kelancaran pengelolaan sekolah dan tertib administrasi.

c. Kapasitas Bendahara/SDM Sekolah yang Belum Merata

Tidak semua bendahara atau petugas keuangan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar dan melakukan administrasi aset.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah

Pelatihan dan workshop rutin bagi bendahara dan guru, serta pendampingan internal di tiap kecamatan, meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan dana BOS.

b. Percepatan dan Kepastian Pencairan Dana

Dana BOS dicairkan tepat waktu dengan jadwal rutin, disertai sosialisasi agar perencanaan anggaran sekolah lebih tertib.

c. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Digital

Optimalisasi aplikasi e-BMD dan sistem laporan digital memudahkan pencatatan aset, monitoring dana, serta memberikan panduan online bagi sekolah.

d. Audit dan Supervisi Berkala

Audit internal dan supervisi rutin memastikan pengelolaan dana dan aset sesuai ketentuan, dengan rekomendasi perbaikan cepat bagi sekolah bermasalah.

e. Sosialisasi dan Edukasi

Panduan regulasi keuangan disebarluaskan secara periodik, dan forum bendahara difasilitasi untuk berbagi praktik baik serta menyelesaikan kendala bersama.

### 36. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Kebijakan dan Regulasi Sekolah

Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan menetapkan peraturan terkait keamanan, toleransi, dan inklusivitas yang jelas dan wajib diterapkan di sekolah.

b. Pelatihan dan Pendampingan Guru

Guru SD mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan dan Balai Guru Penggerak tentang pengelolaan kelas inklusif, pencegahan bullying, dan pendidikan nilai keberagaman.

c. Keterlibatan Siswa dan Komunitas Sekolah

OSIS, ekstrakurikuler, dan kegiatan forum siswa aktif mendorong partisipasi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pembentukan lingkungan belajar aman.

d. Fasilitas Pendukung Lingkungan Belajar

Ketersediaan ruang belajar ramah anak, sarana keamanan, dan media informasi mendukung komunikasi terbuka dan interaksi positif antar siswa.

Faktor Penghambat:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Guru/Siswa

Sebagian guru dan siswa belum sepenuhnya memahami prinsip inklusivitas dan keberagaman, sehingga praktiknya di kelas belum optimal.

b. Keterbatasan Fasilitas Sekolah

Sekolah di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas kurang memiliki ruang konseling, media pembelajaran inklusif, dan sarana keamanan yang memadai.

c. Budaya Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Nilai sosial tertentu atau norma budaya yang kurang mendukung penerimaan keberagaman dapat memicu diskriminasi atau bullying.

d. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Iklim Sekolah

Belum ada sistem asesmen rutin untuk menilai keamanan, keberagaman, dan inklusivitas, sehingga tindak lanjut belum optimal.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan dan workshop berkelanjutan membekali guru dengan praktik kelas inklusif, penanganan bullying, dan penerapan nilai keberagaman.

b. Peningkatan Partisipasi Siswa dan Komunitas

Forum diskusi, klub keberagaman, serta peran aktif OSIS dan guru pembimbing mendorong komunikasi terbuka dan toleransi.

c. Peningkatan Fasilitas Lingkungan Belajar

Ruang konseling, area bermain aman, media pembelajaran inklusif, dan optimalisasi ruang kelas menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah.

d. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Survei rutin dan mekanisme umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua memastikan perbaikan iklim keamanan, keberagaman, dan inklusivitas secara bertahap dan terus menerus.

e. Sosialisasi Nilai Keberagaman dan Inklusivitas

Integrasi pendidikan karakter, toleransi, dan inklusivitas ke kurikulum serta keterlibatan orang tua dan masyarakat mendukung sekolah yang ramah, aman, dan inklusif.

37. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian

target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar aktif mendukung pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal.

b. Potensi Daerah yang Kuat

Nilai kearifan lokal, budaya, dan lingkungan Banjar tersedia sebagai bahan muatan lokal yang kaya.

c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lokal

Tokoh adat, budayawan, dan praktisi dilibatkan dalam penyusunan kurikulum.

d. Dukungan Sekolah dan Guru Kreatif

Guru dan sekolah berinisiatif mengimplementasikan muatan lokal secara kontekstual.

e. Kebijakan Pemerintah Daerah

Regulasi mendukung pelestarian budaya dan lingkungan dalam pendidikan.

Faktor Penghambat:

a. Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Belum Merata

Tidak semua sekolah memiliki dokumen kurikulum muatan lokal yang resmi, sehingga implementasi belum konsisten.

b. Keterbatasan SDM

Guru dan tenaga kependidikan belum semua memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran muatan lokal.

c. Panduan Teknis Belum Seragam

Belum ada acuan teknis yang konsisten untuk implementasi muatan lokal di seluruh SD.

d. Minim Integrasi dengan Kurikulum Nasional

Muatan lokal sering berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan pembelajaran kurikulum nasional, sehingga kurang relevan.

e. Kendala Pembiayaan

Dana untuk pelatihan guru dan pengembangan bahan ajar lokal terbatas.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan SDM Guru

Pelatihan modul muatan lokal dan mentoring oleh guru senior/praktisi budaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan konten lokal.

b. Penyusunan Panduan Teknis

Pedoman standar untuk seluruh SD dan integrasi dengan kurikulum nasional memastikan implementasi muatan lokal lebih konsisten dan relevan.

c. Optimalisasi Pendanaan

Memanfaatkan DAK/BOS dan kerja sama dengan lembaga budaya untuk mendukung pelatihan guru dan pengembangan bahan ajar.

d. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal

Tokoh adat, budayawan, dan komunitas lokal dilibatkan dalam pengembangan konten agar materi muatan lokal autentik dan kontekstual.

e. Monitoring dan Evaluasi

Penilaian rutin dan dokumentasi praktik baik membantu perbaikan berkelanjutan serta menjadi referensi bagi sekolah lain.

38. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Bantuan Pemerintah Daerah (Biaya Personil Peserta Didik / PIP Alternatif)

Anak yang tidak menerima program PIP dari pemerintah pusat tetap dapat memperoleh bantuan pendidikan melalui kebijakan lokal, sehingga akses pendidikan tetap terjamin.

Faktor Penghambat:

a. Banyaknya Siswa Tidak Mampu

Masih terdapat sejumlah besar siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan

bantuan pendidikan, sehingga beban pemerintah daerah dan sekolah meningkat.

Solusi Alternatif:

a. Optimalisasi Data Siswa

Melakukan pendataan lengkap dan berkala terhadap siswa kurang mampu agar penerima bantuan tepat sasaran.

b. Diversifikasi Sumber Bantuan

Selain PIP dan Biaya Personil Peserta Didik (BPPD), dorong kerja sama dengan yayasan, lembaga sosial, dan donatur lokal untuk menambah bantuan pendidikan.

c. Prioritas dan Skema Bantuan Bertahap

Tetapkan kriteria prioritas berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan siswa, serta alokasikan bantuan secara bertahap agar lebih merata.

d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan

Pastikan dana bantuan digunakan sesuai tujuan, misalnya untuk buku, seragam, transportasi, atau keperluan belajar lainnya.

e. Sosialisasi kepada Orang Tua dan Sekolah

Memberikan informasi jelas tentang prosedur pengajuan bantuan agar semua siswa yang berhak dapat menerima dukungan.

39. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pelatihan Guru dan Pendampingan Pembelajaran

Guru SD mendapatkan pelatihan literasi, numerasi, dan metode pengembangan prestasi akademik/non-akademik dari Dinas Pendidikan dan Balai Guru Penggerak.

b. Pemanfaatan Hasil Rapor Pendidikan dan Data Evaluasi

Analisis capaian literasi dan numerasi membantu merencanakan program pembelajaran berbasis data.

c. Dukungan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan buku, alat peraga, media digital, laboratorium sederhana, dan ruang ekstrakurikuler mendukung pembelajaran efektif dan pengembangan bakat siswa.

d. Program Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kompetisi

Sekolah menyediakan kegiatan olahraga, seni, sains, dan lomba akademik/non-akademik yang menumbuhkan prestasi siswa.

e. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Regulasi dan anggaran yang memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dan siswa, termasuk program remedial dan bimbingan belajar tambahan.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan SDM Guru Berkompeten

Tidak semua guru memiliki kemampuan tinggi dalam literasi, numerasi, atau pembinaan prestasi akademik/non-akademik.

b. Fasilitas dan Media Pembelajaran Terbatas

Sekolah di daerah terpencil atau kurang dana sering kekurangan alat peraga, buku, dan sarana pendukung pengembangan kompetensi.

c. Beban Kerja dan Motivasi Siswa

Siswa dengan waktu belajar terbatas atau kurang motivasi belajar sulit mencapai literasi, numerasi, dan prestasi maksimal.

d. Kurangnya Dukungan Orang Tua

Rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar dan kegiatan pengembangan bakat anak.

e. Pendekatan Pembelajaran yang Kurang Variatif

Masih banyak pembelajaran berorientasi hafalan sehingga kemampuan literasi, numerasi, dan prestasi kreatif siswa tidak berkembang optimal.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Kapasitas Guru

Pelatihan lanjutan dan mentoring oleh guru berprestasi atau ahli meningkatkan kemampuan guru dalam literasi, numerasi, dan pembinaan prestasi siswa.

b. Pengembangan Sarana dan Media Pembelajaran

Penyediaan alat peraga, buku, media digital, dan ruang ekstrakurikuler, serta pemanfaatan teknologi mendukung pembelajaran efektif dan remedial.

c. Program Remedial dan Pengayaan Siswa

Kegiatan tambahan untuk siswa tertinggal dan program pengayaan bagi siswa berprestasi meningkatkan kompetensi dan prestasi secara merata.

d. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Pelibatan orang tua dan kerja sama dengan komunitas atau lembaga swasta mendukung pembelajaran dan pengembangan bakat siswa.

e. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Asesmen rutin literasi, numerasi, dan prestasi non-akademik, serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi, mendorong perbaikan dan motivasi berkelanjutan.

40. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Kebijakan dan Program Penguatan Pendidikan Karakter

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mendorong sekolah mengintegrasikan pendidikan karakter ke kurikulum dan kegiatan sehari-hari.

b. Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru mendapatkan bimbingan tentang pendidikan karakter, pembiasaan positif, dan metode evaluasi perilaku peserta didik.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Lingkungan Sekolah

Program OSIS, pramuka, seni, dan olahraga menjadi media pembiasaan nilai karakter seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab.

d. Dukungan Orang Tua dan Masyarakat

Keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak dan kolaborasi dengan komunitas mendukung penguatan karakter.

#### Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Pemahaman Guru

Tidak semua guru mampu mengintegrasikan nilai karakter secara efektif ke dalam pembelajaran.

b. Pengaruh Lingkungan dan Media

Media digital dan lingkungan sosial yang kurang kondusif dapat mempengaruhi perilaku anak negatif.

c. Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi

Belum ada sistem penilaian karakter yang terukur dan rutin di sebagian sekolah.

d. Minimnya Kegiatan Pembiasaan

Sekolah dengan sarana terbatas atau kurang dukungan orang tua sulit membiasakan perilaku positif secara konsisten.

#### Solusi Alternatif:

a. Penguatan Kapasitas Guru

Pelatihan dan mentoring guru untuk mengintegrasikan nilai karakter ke pembelajaran dan pembiasaan harian.

b. Pengembangan Program dan Kegiatan Sekolah

Ekstrakurikuler, OSIS, pramuka, dan kegiatan sosial menjadi media pembiasaan karakter, menanamkan disiplin, tanggung jawab, gotong-royong, dan toleransi.

c. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Partisipasi orang tua dan kolaborasi masyarakat mendukung pembiasaan nilai positif di sekolah dan di rumah.

d. Monitoring dan Evaluasi

Penilaian karakter secara rutin dengan rubrik sederhana dan dokumentasi praktik baik untuk perbaikan berkelanjutan.

#### 41. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

#### Faktor Pendukung:

a. Pelatihan dan Workshop Berkala

Guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan pedagogik, literasi, numerasi, manajemen kelas, dan pengembangan profesional lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Balai Guru Penggerak.

b. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Sertifikasi

Kesempatan bagi guru untuk mengikuti PPG dan memperoleh sertifikasi meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional.

c. Pendampingan dan Mentoring

Guru senior dan pengawas memberikan bimbingan praktik, coaching, dan mentoring di kelas untuk penguatan kompetensi.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Media Pembelajaran

Akses platform digital, modul daring, dan sumber belajar online mendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru.

e. Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Regulasi dan alokasi anggaran DAK/BOS/Dana Kabupaten mendukung program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

#### Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Guru

Sebagian guru belum memiliki kompetensi memadai atau pemahaman teknologi pembelajaran digital.

b. Beban Kerja Guru Tinggi

Guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah atau memiliki tanggung jawab ganda kesulitan mengikuti pelatihan.

c. Keterbatasan Akses Pelatihan di Wilayah Terpencil

Sekolah di daerah pedesaan atau terpencil sulit dijangkau untuk pelatihan tatap muka.

d. Kendala Administratif dan Pemberkasan

Guru terlambat melengkapi dokumen atau persyaratan untuk mengikuti program

sertifikasi atau PPG.

Solusi Alternatif:

a. Pelatihan dan Pendampingan Terjadwal

Workshop praktik kelas dan mentoring guru oleh pengawas atau guru senior meningkatkan kemampuan mengajar secara langsung.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pelatihan daring, modul online, dan platform interaktif memudahkan guru, terutama di daerah terpencil, mengembangkan literasi, numerasi, dan manajemen kelas.

c. Fasilitasi PPG dan Sertifikasi

Pendampingan administrasi dan pemberian beasiswa/subsidi mendukung guru mengikuti PPG dan memperoleh sertifikasi profesional.

d. Redistribusi Beban Kerja dan Prioritas Pelatihan

Jadwal pelatihan disesuaikan untuk guru multi-sekolah, dengan prioritas pada sekolah yang membutuhkan peningkatan kompetensi tinggi.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Observasi kelas, asesmen, dan feedback rutin memantau perkembangan kompetensi guru, sementara dokumentasi praktik baik menjadi referensi bagi sekolah lain.

#### 42. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Upaya pemenuhan dan distribusi PTK terus dilakukan melalui strategi yang melibatkan koordinasi lintas sektor. Beberapa pengawas sekolah dasar yang baru dilantik merupakan individu yang masih berada pada usia muda, sehingga secara kapasitas dan mobilitas mampu mengampu jumlah sekolah yang lebih banyak. Penataan wilayah binaan juga telah dilakukan dengan membagi jumlah sekolah kepada pengawas yang berada di wilayah terdekat, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan.

b. Kerja sama aktif dengan pihak terkait seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) telah dilakukan untuk menyusun mekanisme usulan dan seleksi bakal calon kepala sekolah. Hal ini mendorong proses regenerasi kepemimpinan sekolah yang lebih terencana dan sesuai regulasi.

#### Faktor Penghambat Capaian

- a. Sesuai dengan Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah, seluruh kandidat kepala sekolah wajib mengikuti serangkaian proses seleksi, pelatihan, dan penugasan resmi sebelum dapat diangkat. Akibatnya, kekosongan jabatan kepala sekolah tidak dapat segera diisi karena harus menunggu proses seleksi dan pelatihan selesai, serta peserta dinyatakan lulus.
- b. Pada tahun 2025, sebanyak 5 orang pengawas sekolah dasar memasuki masa pensiun, yang berdampak pada semakin berkurangnya jumlah pengawas aktif di jenjang tersebut. Sementara itu, untuk pengangkatan calon pengawas, terdapat syarat administratif dan kompetensi, yakni wajib memiliki sertifikat calon pengawas dan sertifikat uji kompetensi. Ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua calon memenuhi persyaratan tersebut secara langsung.
- c. Masih diperlukan pembaruan Surat Keputusan (SK) untuk Koordinator Wilayah dan pengawas yang memasuki masa pensiun, guna menyesuaikan struktur pengawasan dan wilayah kerja yang baru. Sementara itu, banyaknya formasi jabatan yang telah terisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di unit kerja tujuan, membuat usulan mutasi untuk kebutuhan distribusi guru hanya sebagian kecil yang disetujui, sehingga pemerataan guru belum dapat terlaksana secara optimal.

#### Solusi Alternatif:

- a. Agar sasaran ini dapat tercapai secara maksimal, diperlukan kebijakan afirmatif yang mempercepat proses seleksi kepala sekolah dan calon pengawas, pembukaan jalur pelatihan yang lebih luas, serta revisi dan realokasi formasi secara strategis agar pemenuhan PTK dapat dilakukan lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

#### 43. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

#### Faktor Pendukung:

- a. Salah satu faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik dengan tim monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi guru. Kolaborasi ini mendukung proses pengawasan pelaksanaan tunjangan profesi guru agar tepat sasaran

dan sesuai regulasi. Selain itu, kerja sama yang solid dengan kepala sekolah dan para guru dalam pelaksanaan pembinaan, supervisi akademik, serta tindak lanjut hasil monitoring menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab guru terhadap peningkatan kualitas diri.

- b. Komitmen kepala sekolah dalam membina dan memfasilitasi pengembangan guru, serta keterbukaan guru dalam menerima masukan dan menjalankan perbaikan, turut mempercepat proses peningkatan kompetensi secara nyata di satuan pendidikan.

#### Faktor Penghambat

- a. Di sisi lain, beberapa kendala masih ditemukan dalam proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerima sertifikasi guru jenjang Sekolah Dasar. Proses monev yang dilakukan ke seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Banjar memerlukan waktu, tenaga, dan koordinasi yang intensif, mengingat jumlah satuan pendidikan yang cukup besar dan tersebar. Pemeriksaan berkas hasil monev sertifikasi dari masing-masing sekolah juga membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
- b. Proses ini sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, waktu yang terbatas, serta kompleksitas administrasi, yang pada akhirnya memengaruhi kecepatan tindak lanjut terhadap hasil temuan. Jika hasil monev tidak segera dianalisis dan ditindaklanjuti, maka upaya peningkatan kompetensi guru melalui jalur sertifikasi tidak akan berjalan secara optimal.

#### Solusi Alternatif:

- a. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran ini, diperlukan sistem monitoring yang lebih terintegrasi dan efisien, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan hasil monev, serta pelatihan berkelanjutan kepada kepala sekolah dan guru untuk memastikan sertifikasi tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.

#### 44. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

##### Faktor Pendukung:

- a. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penguatan sasaran Anak Tidak Sekolah (ATS). Kegiatan ini membantu mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal dan menjadi dasar

intervensi untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Pendataan ini juga mendorong keterlibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah dalam menyosialisasikan pentingnya pendidikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

#### Faktor Penghambat

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyekolahkan anak ke sekolah formal. Beberapa orang tua masih memandang bahwa sekolah bukanlah kebutuhan utama, terutama di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Hal ini menyebabkan masih adanya ATS yang belum dapat dijangkau oleh program pendidikan.

#### Solusi Alternatif:

- a. Untuk mencapai sasaran ini secara maksimal, dibutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, serta peningkatan edukasi publik tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

#### 45. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

#### Faktor Pendukung:

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan satuan pendidikan terus didorong melalui koordinasi aktif dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN/SM) Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan dan standar akreditasi, serta memastikan kesiapan sekolah dalam menghadapi proses akreditasi secara optimal.
- b. Kerja sama dengan pengawas jenjang SMP turut memperkuat proses pendampingan terhadap satuan pendidikan, terutama dalam hal pembinaan manajerial, supervisi akademik, serta pendampingan penyusunan dokumen dan implementasi standar mutu. Peran pengawas sangat penting dalam memastikan sekolah memahami dan memenuhi instrumen penilaian akreditasi.

#### Faktor Penghambat

- a. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat tantangan dalam mencapai sasaran ini, yaitu adanya 11 sekolah yang hingga saat ini memiliki nilai akreditasi di bawah predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian satuan pendidikan masih menghadapi kendala dalam pemenuhan standar mutu, baik dari segi manajemen, sarana, tenaga pendidik, maupun pelaksanaan proses pembelajaran. Kondisi ini memerlukan perhatian

husus dan intervensi berkelanjutan, termasuk pembinaan intensif, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta pemenuhan sarana prasarana yang mendukung standar pelayanan minimal.

Solusi Alternatif:

- a. Untuk mendorong peningkatan kualitas kelembagaan secara merata, diperlukan strategi pembinaan yang lebih terarah, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan sinergi antara sekolah, pengawas, dan lembaga akreditasi. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan dapat mencapai standar mutu yang diharapkan dan meningkatkan predikat akreditasi sebagai cerminan mutu kelembagaan yang sesungguhnya.

#### 46. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Pelatihan Guru dan Pendampingan Profesional

Guru SMP mendapatkan pelatihan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter dari Dinas Pendidikan dan Balai Guru Penggerak, meningkatkan kualitas pembelajaran.

- b. Pemanfaatan Hasil Asesmen dan Rapor Pendidikan

Data capaian literasi, numerasi, dan karakter menjadi dasar perencanaan program remedial dan pengayaan siswa.

- c. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pembiasaan Nilai

Ekstrakurikuler, OSIS, pramuka, dan kegiatan sosial menanamkan nilai karakter positif, disiplin, dan tanggung jawab.

- d. Dukungan Sarana dan Media Pembelajaran

Tersedianya buku, laboratorium, media digital, dan alat peraga mendukung pembelajaran literasi dan numerasi yang efektif.

- e. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Regulasi dan alokasi anggaran DAK/BOS/Dana Kabupaten mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Kompetensi Guru

Tidak semua guru menguasai metode literasi, numerasi, dan pendidikan karakter secara mendalam.

b. Fasilitas Belajar yang Tidak Merata

Sekolah di daerah terpencil memiliki keterbatasan laboratorium, media pembelajaran, dan ruang kegiatan.

c. Beban Belajar dan Motivasi Siswa

Siswa dengan beban belajar tinggi atau kurang motivasi sulit mencapai nilai literasi, numerasi, dan karakter optimal.

d. Kurangnya Dukungan Orang Tua

Minimnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi pembelajaran dan pembiasaan nilai karakter di rumah.

e. Pendekatan Pembelajaran yang Kurang Variatif

Masih banyak pembelajaran berorientasi hafalan sehingga kemampuan analisis, numerasi, dan pengembangan karakter siswa kurang maksimal.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Kapasitas Guru

Pelatihan praktik kelas dan mentoring guru meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.

b. Pengembangan Sarana dan Media Pembelajaran

Penyediaan buku, laboratorium, media digital, dan alat peraga, serta pemanfaatan teknologi mendukung pembelajaran efektif dan remedial.

c. Program Remedial dan Pengayaan Siswa

Kegiatan tambahan untuk siswa tertinggal dan pengayaan bagi siswa berprestasi meningkatkan kualitas kompetensi secara merata.

d. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Partisipasi orang tua dan kolaborasi dengan komunitas/ lembaga swasta mendukung pembelajaran dan penguatan karakter siswa.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Asesmen rutin dan dokumentasi praktik baik memantau perkembangan literasi, numerasi, dan karakter, sekaligus memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi.

47. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Semua sekolah SMP di Kabupaten Banjar secara konsisten menerapkan Kurikulum Nasional pada seluruh jenjang kelas 7 hingga 9. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih antara Kurikulum Nasional atau Kurikulum 2013, seluruh SMP di kabupaten ini telah memilih untuk menggunakan Kurikulum Nasional sebagai landasan pembelajaran. Keputusan ini memudahkan standarisasi pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan evaluasi, sehingga mempermudah koordinasi dan supervisi pembinaan kurikulum di tingkat daerah. Implementasi ini juga memperkuat integrasi muatan lokal yang menjadi ciri khas daerah, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya sesuai standar nasional, tetapi juga menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal.

Faktor Penghambat

- a. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan perbedaan pemahaman dan kesiapan di antara sekolah-sekolah dalam menerapkan kurikulum yang ditetapkan. Variasi interpretasi terhadap aturan baru menyebabkan ketidakseragaman pelaksanaan kurikulum, yang pada beberapa kasus berdampak pada kualitas pembelajaran dan kesulitan dalam penyesuaian materi ajar serta metode pengajaran.
- b. Ketidaksiapan sumber daya pendidik, kurangnya pelatihan yang memadai, serta kebutuhan penyesuaian administrasi dan dokumentasi kurikulum juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar penerapan Kurikulum Nasional dan muatan lokal dapat berjalan lancar dan efektif.

Solusi Alternatif:

- a. Untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum nasional dan muatan lokal, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta pendampingan intensif dari dinas pendidikan dan pengawas sekolah. Pendekatan kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan regulasi juga penting agar

seluruh sekolah dapat menyesuaikan diri secara efektif dan konsisten dalam melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan.

#### 48. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan kepala sekolah dan pengawas terkait pendataan guru menjadi faktor pendorong utama dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas PTK. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi kebutuhan guru secara tepat serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan yang lebih efektif. Pendataan yang akurat menjadi dasar perencanaan pengangkatan, pelatihan, dan penempatan guru sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sekolah.

Faktor Penghambat

- a. Adanya guru bersertifikasi yang memasuki masa purnatugas atau pensiun, serta beberapa yang meninggal dunia, sehingga menimbulkan kekurangan tenaga pendidik yang berkompetensi. Selain itu, sulitnya mengajak calon guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi hambatan signifikan, mengingat PPG merupakan jalur penting untuk meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi profesional.
- b. Keterbatasan calon peserta PPG yang bersedia dan mampu mengikuti program ini menghambat upaya peningkatan kualitas guru secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik bersertifikasi.

Solusi Alternatif:

- a. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya strategi yang komprehensif, termasuk penyediaan insentif dan fasilitasi bagi calon guru agar termotivasi mengikuti PPG, serta perencanaan suksesi guru purnatugas secara sistematis. Sinergi antara dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga pelatihan perlu diperkuat untuk menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

#### 49. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung

a. Pelatihan dan Pendampingan SDM Sekolah

Bendahara dan kepala sekolah mendapatkan pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan berbasis BOS, termasuk penggunaan aplikasi e-BMD, Arkas dan Si-BOS.

b. Kebijakan dan Regulasi Jelas

Pemerintah daerah menetapkan aturan pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah yang jelas dan baku.

c. Pendampingan dan Supervisi Berkala

Pengawas dan tim dinas melakukan monitoring dan bimbingan teknis, membantu sekolah menyusun laporan yang sesuai ketentuan.

d. Pemanfaatan Teknologi Digital

Sistem e-BMD dan laporan keuangan digital memudahkan pencatatan, pelaporan, dan transparansi aset serta dana.

Faktor Penghambat:

a. Kapasitas SDM Terbatas

Tidak semua bendahara atau staf sekolah memahami administrasi BOS dan pelaporan keuangan digital.

b. Keterlambatan Pencairan Dana

Pencairan dana BOS yang terlambat dapat menghambat tertib administrasi dan pelaporan.

c. Pengelolaan Administrasi Belum Merata

Beberapa sekolah belum rutin mencatat aset atau menyusun laporan sesuai standar.

d. Keterbatasan Supervisi dan Monitoring

Pengawasan belum merata, terutama di SMP di wilayah terpencil, sehingga kesalahan atau keterlambatan pelaporan terjadi.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Kapasitas SDM

Pelatihan lanjutan dan pendampingan internal meningkatkan kemampuan bendahara dan kepala sekolah dalam pengelolaan BOS dan administrasi keuangan.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Optimalisasi aplikasi e-BMD dan panduan online memudahkan pencatatan aset dan laporan keuangan secara mandiri.

c. Percepatan dan Kepastian Pencairan Dana

Jadwal pencairan rutin dan sosialisasi membantu perencanaan anggaran lebih tertib dan tepat waktu.

d. Monitoring, Supervisi, dan Audit Berkala

Audit dan supervisi rutin memastikan laporan sesuai ketentuan, dengan rekomendasi perbaikan cepat bagi sekolah bermasalah.

e. Sosialisasi dan Forum Praktik Baik

Panduan regulasi disebarluaskan periodik, dan forum bendahara memungkinkan berbagi praktik baik serta solusi kendala.

50. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan staf mendapatkan pelatihan penanganan bullying, kelas inklusif, dan penguatan nilai keberagaman.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Forum Siswa

OSIS, klub keberagaman, dan kegiatan sosial mendorong interaksi positif dan toleransi antar siswa.

c. Fasilitas Lingkungan Belajar yang Mendukung

Tersedianya ruang konseling, area bermain aman, dan media pembelajaran inklusif.

d. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Peraturan sekolah dan dukungan pemerintah daerah memfasilitasi terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman.

e. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Orang tua dan masyarakat aktif mendukung sekolah ramah, aman, dan inklusif.

#### Faktor Penghambat

a. Keterbatasan SDM Terlatih

Tidak semua guru dan staf memahami teknik pengelolaan kelas inklusif dan penanganan konflik.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media Digital

Lingkungan sekitar dan media digital kadang menghambat pembentukan karakter positif dan toleransi.

c. Fasilitas Belum Merata

Sekolah di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas kekurangan ruang konseling atau media inklusif.

d. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Penilaian iklim sekolah, keberagaman, dan inklusivitas belum rutin atau sistematis.

#### Solusi Alternatif

a. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan dan workshop praktik kelas inklusif, penanganan bullying, dan nilai keberagaman.

b. Peningkatan Partisipasi Siswa dan Komunitas

Membentuk forum diskusi, klub keberagaman, dan kegiatan peer mentoring; melibatkan OSIS dan guru pembimbing.

c. Pengembangan Fasilitas Lingkungan Belajar

Penyediaan ruang konseling, area bermain aman, dan media pembelajaran inklusif; optimalkan ruang kelas agar semua siswa merasa diterima.

d. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Survei rutin iklim keamanan, keberagaman, dan inklusivitas; mekanisme feedback dari siswa, guru, dan orang tua.

e. Sosialisasi Nilai Keberagaman dan Inklusivitas

Integrasi pendidikan karakter, toleransi, dan inklusivitas ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah; libatkan orang tua serta masyarakat.

#### 51. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

##### a. Kebijakan Kementerian dan Peraturan Daerah

Regulasi resmi mendorong muatan lokal menjadi bagian integral dari kurikulum nasional, sehingga ada landasan hukum dan arah pengembangan.

##### b. Inisiatif dan Dukungan Dinas Pendidikan serta Kepala Sekolah

Dinas pendidikan dan kepala sekolah menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah, budaya, dan potensi lokal.

Faktor penghambat:

##### a. Muatan Lokal Kurang Prioritas

Beberapa sekolah belum menempatkan pengembangan muatan lokal sebagai fokus utama, sehingga implementasinya tidak maksimal.

##### b. Keterbatasan Pemahaman Guru dan Kepala Sekolah

Guru dan kepala sekolah belum sepenuhnya memahami pentingnya muatan lokal untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan budaya dan kebutuhan lokal.

Solusi Alternatif:

##### a. Penguatan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah

Pelatihan, workshop, dan mentoring dari guru senior serta praktisi budaya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun modul muatan lokal.

##### b. Penyusunan Panduan Teknis

Pedoman standar dan integrasi dengan kurikulum nasional memudahkan sekolah menerapkan muatan lokal secara konsisten dan relevan.

##### c. Optimalisasi Pendanaan

Penggunaan DAK/BOS atau kerja sama dengan lembaga budaya mendukung pelatihan guru dan pengembangan bahan ajar muatan lokal.

d. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal

Tokoh adat, budayawan, dan komunitas lokal dilibatkan untuk memperkaya konten dan relevansi muatan lokal.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Evaluasi rutin dan dokumentasi praktik baik memastikan implementasi muatan lokal berjalan efektif dan menjadi referensi bagi sekolah lain.

52. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Koordinasi Baik dengan Satuan Pendidikan

Komunikasi dan koordinasi dengan sekolah membantu memperbarui data peserta didik, mempermudah verifikasi, dan memastikan program tepat sasaran.

Faktor Penghambat:

a. Perubahan Data Calon Penerima Bantuan

Data calon penerima sering berubah sehingga tidak sesuai ketentuan, menyebabkan proses verifikasi dan pencairan tertunda.

b. Calon Penerima Berhenti Tanpa Pemberitahuan

Beberapa calon penerima keluar atau berhenti sekolah tanpa informasi resmi, sehingga program tidak tepat sasaran.

Solusi Alternatif:

a. Perbaruan Data Rutin

Lakukan pendataan berkala dengan sekolah untuk memastikan data calon penerima selalu update.

b. Sistem Pemberitahuan dan Pelaporan

Tetapkan mekanisme wajib lapor bagi peserta didik yang berhenti atau pindah sekolah agar data tetap akurat.

c. Verifikasi Berlapis

Koordinasikan data antar dinas, sekolah, dan pihak terkait sebelum pencairan bantuan.

d. Sosialisasi dan Edukasi

Informasikan prosedur dan ketentuan program kepada peserta didik dan orang tua agar memahami kewajiban dan haknya.

e. Pemanfaatan Teknologi

Gunakan sistem digital atau aplikasi untuk update data dan tracking peserta secara real-time.

### 53. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

#### Faktor Pendukung:

- a. Peningkatan kompetensi PTK didorong oleh koordinasi yang baik antara dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah terkait dengan penentuan peserta kegiatan peningkatan kapasitas. Melalui komunikasi yang intensif, pemilihan peserta dapat dilakukan secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
- b. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti narasumber, pelatih, dan lembaga pelatihan turut mendukung tersusunnya materi kegiatan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini memastikan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual bagi guru dan tenaga kependidikan.

#### Faktor Penghambat

- a. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, yang mengharuskan penyesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, sehingga berpengaruh terhadap waktu dan cakupan pelaksanaan kegiatan. Perubahan ini menuntut fleksibilitas dan kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta koordinasi tambahan untuk memastikan seluruh

proses tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solusi Alternatif:

- a. Ke depan, upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus dilaksanakan secara terencana, adaptif terhadap kebijakan, dan berbasis kebutuhan nyata. Dukungan semua pihak serta kejelasan regulasi menjadi kunci dalam memastikan program peningkatan kompetensi ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah.

#### 54. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Program ini mulai dijalankan terpadu antara sekolah dan keluarga sebagai dasar pembiasaan karakter positif.

- b. Dukungan Kepala Sekolah dan Guru

Nilai disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong ditanamkan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

- c. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya lokal mendukung pembentukan karakter siswa.

- d. Kebijakan Daerah yang Mendukung PPK

Penguatan Pendidikan Karakter menjadi prioritas peningkatan mutu SDM di Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat:

- a. Regulasi Cepat Berubah

Perubahan kebijakan yang dinamis membuat sekolah kesulitan menyesuaikan perencanaan dan implementasi program karakter secara konsisten.

- b. Praktik Pendidikan Karakter Belum Seragam

Di sebagian sekolah, pendidikan karakter masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi dalam pembelajaran sehari-hari.

c. Kapasitas Guru Terbatas

Tidak semua guru mampu mengintegrasikan nilai karakter secara efektif ke dalam proses pembelajaran.

d. Pengaruh Lingkungan dan Media Digital

Lingkungan sosial dan paparan media digital yang kurang kondusif dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan karakter siswa.

e. Kurangnya Pembiasaan Berkelanjutan

Kegiatan pembiasaan karakter belum berjalan rutin, terutama di sekolah dengan keterbatasan sarana dan dukungan masyarakat.

f. Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal

Penilaian karakter peserta didik belum dilakukan secara terukur dan sistematis.

Solusi Alternatif:

a. Penguatan Pemahaman dan Implementasi Regulasi

Sosialisasi cepat setiap perubahan kebijakan serta panduan teknis sederhana membantu sekolah menyesuaikan program karakter secara tepat dan konsisten.

b. Integrasi Karakter ke Pembelajaran

Pelatihan praktik dan penyediaan contoh modul/RPP berbasis karakter memudahkan guru mengintegrasikan nilai karakter dalam setiap mata pelajaran.

c. Pembiasaan Berkelanjutan di Sekolah

Program rutin seperti apel karakter dan kegiatan sosial membentuk budaya sekolah yang disiplin, ramah, dan berkarakter.

d. Kolaborasi Sekolah, Keluarga dan Masyarakat

Sinkronisasi pola asuh di rumah dan pelibatan tokoh agama serta budaya memperkuat pembinaan karakter siswa.

e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Instrumen penilaian sederhana dan evaluasi berkala memastikan perkembangan karakter siswa terpantau dan terus diperbaiki.

f. Literasi Digital dan Pengawasan Media

Edukasi penggunaan media secara bijak bagi siswa dan orang tua mendukung pembentukan karakter positif di era digital.

#### 55. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

##### a. Dorongan Pengembangan Diri Mandiri

PTK didorong untuk secara mandiri mengikuti pelatihan daring, webinar, komunitas belajar, dan program peningkatan kompetensi lainnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pembiayaan pemerintah.

Faktor Penghambat:

##### a. Kebijakan Efisiensi Anggaran

Keterbatasan atau efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya jumlah pelatihan, workshop, dan program peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Dampaknya, kesempatan pengembangan profesional menjadi lebih terbatas dan tidak merata.

Solusi Alternatif:

##### a. Optimalisasi Pelatihan Daring dan Gratis

Memanfaatkan platform pelatihan online, webinar gratis, dan komunitas belajar sebagai alternatif hemat biaya.

##### b. Penguatan Komunitas Belajar Internal

Mengaktifkan MGMP atau forum PTK sebagai ruang berbagi praktik baik dan pengembangan kompetensi bersama.

##### c. Kemitraan dengan Pihak Eksternal

Bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau organisasi pendidikan untuk memperoleh pelatihan bersubsidi atau gratis.

##### d. Sistem Berbagi Ilmu (Training of Trainers)

PTK yang telah mengikuti pelatihan menjadi narasumber internal untuk melatih rekan sejawat di sekolah atau wilayahnya.

e. Perencanaan Prioritas Berbasis Kebutuhan

Mengalokasikan anggaran terbatas pada kompetensi prioritas yang paling mendesak dan berdampak langsung pada mutu pembelajaran.

56. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan pemenuhan dan distribusi PTK dengan menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kerja sama ini mencakup pelaksanaan mekanisme usulan dan seleksi bakal calon kepala sekolah, sehingga proses pengangkatan kepala sekolah dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tersedianya data kebutuhan guru yang akurat dan mutakhir menjadi landasan penting dalam proses perencanaan dan penempatan guru. Melalui koordinasi yang efektif dengan BKPSDM, proses pemerataan guru antar wilayah dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sekaligus menghindari kekurangan maupun kelebihan guru di satuan pendidikan tertentu.

Faktor Penghambat

- a. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Sesuai dengan Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025, pengangkatan kepala sekolah hanya dapat dilakukan bagi guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi bakal calon kepala sekolah. Hal ini membuat pengisian kekosongan kepala sekolah tidak dapat dilakukan secara cepat, karena calon harus terlebih dahulu melalui proses seleksi dan pelatihan resmi. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengisian jabatan kepala sekolah di beberapa satuan pendidikan.
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan penugasan pengawas sekolah juga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan. Akibatnya, pengisian formasi pengawas mengalami penundaan dan rasio ideal pengawas terhadap jumlah satuan pendidikan belum dapat dipenuhi secara optimal.
- c. Ketidakseimbangan distribusi guru antar wilayah, terbatasnya formasi rekrutmen guru, serta perubahan kebijakan kepegawaian yang berdampak langsung pada proses mutasi, pengangkatan, dan penempatan guru. Hal ini menghambat upaya pemerataan dan

menimbulkan beban kerja yang tidak merata di sejumlah sekolah, terutama di daerah yang kekurangan guru.

Solusi Alternatif:

- a. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan perencanaan kebutuhan guru yang lebih adaptif terhadap kebijakan, serta optimalisasi mekanisme seleksi dan pelatihan kepala sekolah dan pengawas secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara merata.

#### 57. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap SNP

Adanya kebijakan dan program pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mendukung peningkatan sarana prasarana.

- b. Ketersediaan Sumber Pendanaan (APBN/APBD/Bantuan Lain)

Dana DAK, BOS, dan sumber lainnya menjadi peluang pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi.

- c. Pemanfaatan Sistem Pendataan

Aplikasi dan sistem data sarpras membantu pemetaan kebutuhan secara lebih terarah.

- d. Dukungan Masyarakat dan Komite Sekolah

Partisipasi masyarakat dapat membantu pemeliharaan dan pengawasan fasilitas sekolah.

- e. Kesadaran Sekolah akan Mutu Sarpras

Sekolah semakin memahami bahwa sarana prasarana yang baik berpengaruh pada kualitas pembelajaran.

Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan Anggaran Pembangunan/Rehabilitasi

Dana yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan dan

perbaiki sarana prasarana secara menyeluruh.

b. Kondisi Geografis dan Akses Sulit

Sekolah di wilayah terpencil menghadapi kendala distribusi material dan biaya pembangunan yang lebih tinggi.

c. Bangunan Sekolah Tua dan Rusak

Banyak gedung sekolah memerlukan rehabilitasi berat sehingga membutuhkan anggaran besar dan penanganan bertahap.

d. Data Sarpras Belum Akurat

Data kondisi bangunan dan fasilitas belum sepenuhnya mutakhir sehingga menyulitkan penentuan prioritas.

e. Kapasitas Pengelolaan Terbatas

Satuan pendidikan belum semua memiliki kemampuan perencanaan, pemeliharaan, dan pelaporan sarana prasarana yang baik.

Solusi Alternatif:

a. Prioritas Berbasis Data

Pemutakhiran data sarpras secara berkala memastikan kondisi riil sekolah terpantau. Skala prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah siswa terdampak, dan urgensi keselamatan agar anggaran tepat sasaran.

b. Optimalisasi Pendanaan

Dana DAK/APBD/BOS difokuskan pada rehabilitasi ringan dan pemeliharaan rutin. Selain itu, dukungan CSR, komite sekolah, dan mitra swasta dimanfaatkan untuk menutup keterbatasan anggaran pemerintah.

c. Pembangunan Bertahap dan Efisien

Rehabilitasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Desain bangunan dibuat efisien, tahan lama, dan sesuai standar agar mengurangi biaya perawatan jangka panjang.

d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarpras

Kepala sekolah dan operator diberikan pelatihan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sarpras. Disusun SOP pemeliharaan rutin agar fasilitas sekolah terawat dan

tidak cepat rusak.

e. Pendekatan Kolaboratif Wilayah Sulit Akses

Dilakukan koordinasi lintas sektor untuk memperlancar distribusi material ke daerah terpencil. Perencanaan khusus disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan prioritas wilayah tersebut.

58. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Ketersediaan Sumber Pendanaan (APBN, APBD, DAK, BOS)

Tersedianya berbagai skema pembiayaan untuk mendukung pengadaan dan rehabilitasi.

b. Sistem Pendataan Sarana dan Prasarana

Aplikasi pendataan membantu pemetaan kebutuhan dan monitoring kondisi fasilitas sekolah.

c. Dukungan Komite Sekolah dan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat membantu pemeliharaan dan pengawasan fasilitas sekolah.

d. Meningkatnya Kesadaran Sekolah akan Mutu Sarpras

Sekolah memahami bahwa sarana dan prasarana yang lengkap dan baik berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan dan Efisiensi Anggaran

Anggaran belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan dan rehabilitasi sarana-prasarana SD secara merata.

b. Kondisi Geografis dan Akses Sulit

Sekolah di daerah terpencil mengalami kendala distribusi material dan biaya pembangunan lebih tinggi.

c. Banyaknya Sarana/Prasarana Rusak atau Usang

Gedung, ruang kelas, perpustakaan, sanitasi, serta alat peraga yang sudah lama membutuhkan perbaikan atau penggantian.

d. Pemeliharaan Belum Optimal

Tidak semua sekolah memiliki sistem perawatan rutin sehingga fasilitas cepat rusak.

e. Data Sarpras Belum Sepenuhnya Akurat dan Mutakhir

Ketidaktepatan data menyebabkan perencanaan dan penentuan prioritas kurang tepat sasaran.

Solusi Alternatif:

a. Pemutakhiran dan Validasi Data Berkala

Melakukan pendataan rutin dan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sarpras tercatat akurat sebagai dasar perencanaan.

b. Penentuan Skala Prioritas Berbasis Urgensi dan Risiko

Memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, risiko keselamatan tinggi, dan jumlah siswa besar.

c. Program Pemeliharaan Rutin dan Preventif

Menyusun SOP perawatan berkala di sekolah agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan berumur panjang.

d. Pendekatan Khusus untuk Wilayah Terpencil

Perencanaan teknis dan alokasi anggaran khusus untuk sekolah dengan akses sulit agar tidak terjadi kesenjangan.

e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarpras

Pelatihan kepala sekolah dan operator terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sarana prasarana secara tertib dan akuntabel.

59. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Proses Pembelajaran

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pemerintah terhadap Penguatan PAUD

PAUD menjadi prioritas dalam pembangunan SDM sejak usia dini.

b. Tersedianya Sumber Pendanaan (BOP PAUD, APBD, Bantuan Lain)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan dukungan daerah membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Dukungan komunitas cukup tinggi dalam penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar.

d. Kesadaran Pentingnya Lingkungan Belajar yang Aman dan Ramah Anak

Peningkatan pemahaman bahwa kualitas sarpras memengaruhi tumbuh kembang anak.

e. Pemanfaatan Sistem Pendataan PAUD

Adanya sistem pendataan membantu pemetaan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Anggaran PAUD

Alokasi dana untuk PAUD relatif terbatas, terutama bagi lembaga swasta atau berbasis masyarakat.

b. Ketimpangan Status dan Pengelolaan Lembaga

Banyak PAUD dikelola secara mandiri dengan kemampuan manajerial dan pendanaan yang berbeda-beda.

c. Sarana Bermain Edukatif Belum Memenuhi Standar

Alat permainan edukatif (APE), ruang belajar, sanitasi, dan ruang bermain luar belum seluruhnya aman dan layak.

d. Kondisi Bangunan Tidak Permanen

Beberapa PAUD masih menggunakan bangunan seadanya atau menumpang fasilitas umum/rumah warga.

e. Pemeliharaan dan Pendataan Belum Optimal

Data kondisi sarana prasarana belum sepenuhnya mutakhir dan perawatan belum terjadwal.

Solusi Alternatif:

a. Prioritas Pemenuhan Standar Minimum PAUD

Memastikan terpenuhinya sarana dasar seperti ruang belajar aman, sanitasi layak, dan APE sesuai standar keselamatan.

b. Pengembangan Sarana Edukatif Lokal dan Murah

Mendorong pembuatan APE berbasis bahan lokal yang aman, kreatif, dan ekonomis.

c. Peningkatan Kapasitas Pengelola PAUD

Pelatihan perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana bagi kepala dan pengelola PAUD.

d. Pemutakhiran Data dan Monitoring Berkala

Validasi rutin data kondisi sarpras sebagai dasar perencanaan bantuan dan intervensi bertahap.

e. Pendekatan Bertahap dan Kolaboratif

Pembangunan atau rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

60. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Proses Pembelajaran

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan

Pendidikan nonformal/kesetaraan menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.

b. Ketersediaan Bantuan Operasional (BOP Kesetaraan dan Sumber Lain)

Bantuan operasional dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dasar sarana.

c. Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Lembaga nonformal relatif fleksibel dalam menjalin kerja sama dukungan fasilitas.

d. Semangat Kemandirian Pengelola PKBM/Lembaga Kesetaraan

Pengelola umumnya memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif.

e. Pemanfaatan Ruang Publik dan Fasilitas Komunitas

Dapat menggunakan balai desa, rumah ibadah, atau gedung komunitas sebagai tempat belajar.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Anggaran dan Skala Prioritas

Pendidikan nonformal/kesetaraan sering belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran sarana prasarana.

b. Status dan Kemandirian Lembaga Beragam

Banyak PKBM/lembaga kesetaraan dikelola secara mandiri dengan kemampuan pendanaan terbatas.

c. Pemanfaatan Gedung Non Permanen/Sewa

Sebagian lembaga masih menumpang atau menggunakan fasilitas yang belum memenuhi standar pembelajaran.

d. Sarana Pembelajaran Terbatas

Ketersediaan buku, modul, alat praktik, dan media pembelajaran belum memadai.

e. Pendataan dan Pengelolaan Sarpras Belum Optimal

Data kondisi sarana prasarana belum sepenuhnya mutakhir dan belum terkelola sistematis.

Solusi Alternatif:

a. Prioritas Pemenuhan Sarana Minimum

Memastikan tersedianya ruang belajar layak, modul pembelajaran, dan alat praktik dasar sesuai kebutuhan program kesetaraan.

b. Pemanfaatan Fasilitas Bersama

Mengoptimalkan penggunaan gedung sekolah, balai desa, atau fasilitas umum secara terjadwal untuk efisiensi biaya.

c. Pengembangan Sarana Kontekstual dan Murah

Mengembangkan media pembelajaran berbasis kebutuhan lokal dan sumber daya yang tersedia.

d. Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga

Pelatihan perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan sarana prasarana agar lebih tertib dan berkelanjutan.

e. Pemutakhiran Data dan Monitoring Berkala

Validasi rutin data sarpras sebagai dasar intervensi bantuan dan perencanaan bertahap.

61. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Proses Pembelajaran

Adapun faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi alternatif dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pemerintah terhadap Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Kebijakan pusat dan daerah mendorong pemenuhan standar sarana dan prasarana SMP.

b. Ketersediaan Sumber Pendanaan (APBN, APBD, DAK, BOS)

Tersedianya berbagai skema pembiayaan untuk pembangunan dan rehabilitasi.

c. Pemanfaatan Sistem Pendataan Sarpras

Aplikasi pendataan membantu pemetaan kebutuhan dan monitoring kondisi fasilitas.

d. Dukungan Komite Sekolah dan Masyarakat

Partisipasi masyarakat membantu pengawasan dan pemeliharaan sarana sekolah.

e. Meningkatnya Kesadaran Sekolah terhadap Mutu Fasilitas

Sekolah memahami bahwa kelengkapan sarana (lab, TIK, perpustakaan) berdampak langsung pada mutu pembelajaran.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan dan Efisiensi Anggaran

Anggaran belum mampu memenuhi kebutuhan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas,

sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya secara merata.

b. Kondisi Bangunan Lama dan Kerusakan Berat

Banyak gedung SMP memerlukan rehabilitasi sedang hingga berat yang membutuhkan biaya besar.

c. Ketimpangan Antar Wilayah

SMP di daerah terpencil mengalami kendala akses distribusi material dan pengawasan pembangunan.

d. Pemeliharaan Fasilitas Belum Optimal

Tidak semua sekolah memiliki sistem perawatan rutin sehingga sarana cepat rusak.

e. Data Sarpras Belum Sepenuhnya Mutakhir

Ketidaktepatan data berdampak pada kurang tepatnya penentuan prioritas bantuan.

Solusi Alternatif:

a. Pemutakhiran dan Validasi Data Berkala

Melakukan verifikasi kondisi sarpras secara rutin sebagai dasar perencanaan dan prioritas intervensi.

b. Penentuan Skala Prioritas Berbasis Urgensi dan Risiko

Memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, kekurangan ruang kelas, atau risiko keselamatan tinggi.

c. Program Pemeliharaan Preventif dan SOP Perawatan

Menyusun standar pemeliharaan rutin agar sarana tetap dalam kondisi baik dan tidak cepat rusak.

d. Pendekatan Khusus Wilayah Terpencil

Perencanaan teknis dan dukungan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan di wilayah sulit akses.

e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarpras

Pelatihan kepala sekolah dan operator terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sarana prasarana secara tertib dan akuntabel.

## A. 7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	112,41	97,2	2,8
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	103,51		
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	104,14	93,4	6,6
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	99,73	0,27
4	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100	80,84	19,16
5	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	94,84	5,16
6	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100		
7	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	39,71	60,29
8	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100		
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100		
10	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	100		
11	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100		
12	Meningkatnya Partisipasi	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)-	100	95,42	4,58

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)		
	Masyarakat dalam Pendidikan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
13	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	130,19	91,76	8,24		
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	100				
14	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	100				
15	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100				
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100				
16	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100				
17	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	100				
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100				
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100				
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	100			98,92	1,08
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	100				
21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	100				
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	100				
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	100				
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	100				

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	100		
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	100		
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	100		
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	100		
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	100		
22	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	100		
23	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	100	93,81	6,19
24	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	100		
25	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	102,74		
26	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	100,14		
27	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	100		
28	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	95,47	4,53
29	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	100		
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	117,52		
30	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	99,11	0,89
31	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	150		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
	Jenjang Sekolah Dasar				
32	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	100,67	91,93	8,07
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	106,41		
33	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	100	55,36	44,64
34	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100		
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100		
35	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	100		
36	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	100	99,3	0,7
37	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	112,1		
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	117,18		
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100		
38	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	104,76	
39	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	100		
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama			
40	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	99,9	0,1
41	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	200		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
	Jenjang Sekolah Menengah Pertama				
42	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	100	97,71	2,29
43	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	112,1		
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	117,18		
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	100		
44	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	100	94,63	5,37
45	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100		
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100		
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	100		
46	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	100	86,09	13,91
47	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	100	85,05	14,95
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	100		
48	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	116,9	88,01	11,99
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	100		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100$ %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
49	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	100	90,17	9,83
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	100		
50	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	100	86,48	13,52
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	100		

Secara umum, capaian kinerja untuk seluruh indikator menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana semua target minimal tercapai dan bahkan sebagian besar indikator menunjukkan nilai capaian yang melebihi 100%. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan akses, kualitas, pemerataan pendidikan, serta penerapan kurikulum nasional dan muatan lokal telah berjalan dengan baik. Misalnya, capaian indeks pemerataan guru di tingkat anak usia dini dan sekolah dasar yang sangat tinggi menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendistribusikan tenaga pendidik secara merata.

Penyerapan anggaran secara keseluruhan juga relatif baik, dengan banyak indikator yang menunjukkan realisasi anggaran di atas 90%. Hal ini menandakan bahwa dana yang dialokasikan telah terserap dengan efektif untuk mendukung berbagai program pendidikan. Namun, ada beberapa indikator yang mengalami penyerapan anggaran yang cukup rendah, seperti administrasi kepegawaian perangkat daerah dan peningkatan kompetensi pendidik di sekolah dasar. Kondisi ini bisa mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program atau ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan di lapangan.

Dari segi efisiensi, sebagian besar program menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan nilai yang rendah menandakan penggunaan anggaran yang hemat dan hasil kinerja yang optimal. Misalnya, efisiensi tinggi terlihat pada pengelolaan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah serta administrasi satuan pendidikan. Namun, ada beberapa aspek yang mencatat efisiensi rendah, khususnya di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi guru di tingkat sekolah dasar. Selain itu, efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan juga relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sarana dan prasarana masih cukup besar

dibandingkan hasil yang dicapai.

## **A. 8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

### **1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan**

Keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama tidak terlepas dari berbagai Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan perluasan layanan dan pemerataan satuan PAUD pada wilayah prioritas.
- b. Mengoptimalkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan baik untuk PAUD, SD dan SMP serta dukungan pembiayaan daerah.
- c. Melaksanakan pemantauan dalam proses pendataan anak usia 5–6 tahun berbasis by name by address untuk memastikan seluruh sasaran terlayani.
- d. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan usia dini.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun secara terintegrasi.
- f. Membentuk dan mengendalikan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan Program Indonesia Pintar dan Bantuan Biaya Personil bagi peserta didik kurang mampu.
- h. Mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sarana prasarana, dan pemenuhan standar layanan minimal.
- i. Menerapkan sistem monitoring kehadiran dan deteksi dini risiko putus sekolah
- j. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- k. Mengembangkan program “Tuntas Banjar” bagi remaja putus sekolah.

## 2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dilaksanakan melalui penguatan pemenuhan standar layanan dasar pendidikan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, dengan didukung beberapa program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh satuan pendidikan memenuhi komponen SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengarahkan rehabilitasi ruang kelas rusak dan pemenuhan sarana belajar sesuai standar teknis.
- c. Memastikan ketersediaan sanitasi layak, air bersih, dan fasilitas pendukung pembelajaran.
- d. Melakukan pemantau terhadap pemetaan kebutuhan guru sesuai rasio dan kualifikasi akademik.
- e. Mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.
- f. Melaksanakan evaluasi capaian SPM secara triwulanan melalui rapat manajemen kinerja.
- g. Mengintegrasikan target SPM dalam Perjanjian Kinerja hingga level bidang dan satuan pendidikan.
- h. Melakukan supervisi manajerial dan akademik secara berjenjang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.

## 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan di tunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Memastikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) berbasis sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Mengkoordinir penyelarasan SKP pejabat struktural dan fungsional dengan target SAKIP serta rencana aksi prioritas.

- c. Mengintegrasikan dokumen Renja, PK, dan anggaran untuk memastikan konsistensi perencanaan kinerja dan keuangan.
  - d. Menekankan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang, mulai dari eselon III hingga pelaksana, menggunakan sistem E-Monev Simondalev.
  - e. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja rutin secara triwulanan untuk menilai kemajuan capaian indikator dan menyelesaikan hambatan.
  - f. Memastikan seluruh data kinerja diinput secara tepat waktu, lengkap, dan berbasis bukti pendukung.
  - g. Mereviu laporan kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan rekomendasi perbaikan, reward, dan punishment.
4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan dengan didukung program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan, SOP, dan regulasi internal untuk seluruh unit dan pegawai Dinas Pendidikan.
  - b. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan kinerja internal secara berkala melalui sistem E-Monev Simondalev.
  - c. Melakukan evaluasi triwulanan dan tahunan terhadap kepatuhan administrasi, keuangan, dan pelaksanaan program.
  - d. Mendorong budaya kinerja dan kepatuhan di seluruh jajaran melalui komunikasi dan monitoring berkelanjutan.
  - e. Menindaklanjuti temuan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan dan penyusunan rencana aksi internal.
  - f. Mengadakan supervisi rutin ke setiap unit kerja untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai regulasi.
5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan ditunjang

oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan proses penyusunan dan penginputan RKA Perubahan Tahun 2025
- b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan Evaluasi pengisian data SPM dinas Pendidikan triwulan 4 Tahun 2025
- d. Melakukan Evaluasi terkait data-data dalam penyusunan laporan kinerja, laporan realisasi fisik dan keuangan serta SPM dinas pendidikan triwulan 4.
- e. Menggunakan sistem E-Monev dan E-Sakip Simondalev untuk monitoring, evaluasi, dan integrasi data perencanaan, anggaran, dan kinerja.

6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP dengan indikator Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan Forum SKPD Tahun 2025
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan Forum SKPD Tahun 2025
- c. Menyusun laporan manajemen resiko

7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran gaji bulan Januari sampa Desember untuk PNS dan PPPK;
- b. Menyusun laporan capaian persentase administrasi keuangan
- c. Menindaklanjuti hasil audit baik internal maupun eksternal
- d. Mengelola dokumen transaksi keuangan (SPJ, bukti pembayaran dan kuitansi) sesuai dengan standar dan peraturan

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai

dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan ditunjang kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan lengkap seluruh barang milik daerah yang berada di kantor Dinas Pendidikan dan unit-unit pelaksana teknis (sekolah-sekolah negeri) di Kabupaten Banjar.
  - b. Membentuk tim inventarisasi yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan dan sekolah untuk memastikan pendataan yang akurat.
  - c. Menyediakan akses data secara transparan kepada pengelola anggaran dan pengawas internal.
  - d. Menyusun laporan hasil audit dan merekomendasikan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan ditunjang oleh kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendampingan Kenaikan Pangkat
  - b. Melakukan tahapan pengumpulan data peserta yang sedang melakukan kenaikan pangkat
  - c. Melengkapai berkas-berkas usul kenaikan pangkat
  - d. Mempersiapkan data kepesertaan Bimtek
  - e. Melakukan negosiasi dengan pihak ke tiga .untuk kerja sama dalam melaksanakan kegiatan BIMTEK
10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas ditunjang oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dan pengarsipan dokumen berdasarkan kebutuhan dan tanggal dokumen
- b. Melakukan Survey Penyedia
- c. Melakukan Survey Harga Barang
- d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kelengkapan spj
- e. melakukan proses negosiasi harga barang

11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas ditunjang oleh kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan dan pembayaran tagihan rutin Dinas Pendidikan seperti tagihan listrik dan air
- b. Melakukan pembayaran gaji, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

12. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan ditunjang oleh kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan survey Barang
- b. Melakukan Survey Harga dan pemesanan barang
- c. Mempersiapkan data dukung untuk pemesanan barang

13. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan ditunjang oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran tagihan BBM kendaraan dinas
- b. Melakukan pembayaran tagihan pemeliharaan peralatan kantor
- c. Melakukan pengecekan dan perbaikan peralatan kantor seperti AC dan komputer
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sesuai jadwal, meliputi pemeriksaan, perbaikan kecil, pembersihan, dan pengujian fungsi barang.
- e. Menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pemeliharaan barang, termasuk status barang, jenis pemeliharaan, dan hasil tindakan yang dilakukan.

#### 14. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan dengan indikator Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)-Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ditunjang kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan menyeluruh anak usia sekolah yang belum terdaftar di sekolah formal maupun nonformal/kesetaraan di Kabupaten Banjar.
- b. Menyelenggarakan kampanye aktif tentang pentingnya pendidikan melalui media lokal, media sosial, dan kegiatan komunitas.
- c. Mengedukasi masyarakat tentang jalur pendidikan alternatif seperti paket A, B, C dan pendidikan informal/kesetaraan.
- d. Memperkuat kapasitas lembaga nonformal melalui pelatihan guru, penyediaan modul pembelajaran, dan peningkatan sarana prasarana.
- e. Memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi anak dari keluarga kurang mampu.
- f. Menyusun laporan capaian persentase penurunan ATS dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

#### 15. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Apresiasi Guru PAUD dan Literasi Numerasi Guru PAUD
- b. Pendataan dan verifikasi data PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- c. Melaksanakan Rapat terkait ketersediaan PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.
- d. Melakukan penyusunan laporan hasil rapat terkait penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan nonformal/kesetaraan

#### 16. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B dan Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh kepala PAUD, lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan, dan staf terkait mengenai standar akreditasi minimal B.
- b. Memberikan bimbingan teknis bagi lembaga PAUD dan nonformal/kesetaraan untuk menyusun dokumen administrasi, laporan kurikulum, dan dokumen pendukung akreditasi.
- c. Melakukan monitoring rutin di setiap satuan pendidikan untuk mengevaluasi kesiapan dokumen dan proses akreditasi.
- d. Menyusun laporan capaian akreditasi setiap PAUD dan lembaga nonformal/kesetaraan, termasuk yang sudah memenuhi minimal B dan yang perlu tindak lanjut.

#### 17. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Silabus Satuan Pendidikan

- b. Mengadakan workshop praktik pembelajaran yang memadukan standar nasional dengan konten lokal, termasuk budaya, kearifan lokal, dan potensi daerah.
- c. Melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD dan pendidik nonformal dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum.
- d. Melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan kurikulum di setiap PAUD dan lembaga nonformal/kesetaraan.
- e. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar kurikulum nasional dan muatan lokal serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- f. Mengadakan lomba atau kegiatan edukatif yang menekankan penerapan muatan lokal untuk mendorong kreativitas peserta didik.

#### 18. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan survey dan Monev ke sekolah penerima bantuan
- b. Melakukan Pendampingan ke Satuan Pendidikan Nonformal dalam penatausahaan BOSP
- c. Melaksanakan Kegiatan rapat TIM BOSP PAUD dan Sosialisasi Akreditasi Satuan PAUD
- d. Melakukan Koordinasi dengan Bunda PAUD untuk pelaksanaan Rapat Pokja Bunda PAUD
- e. Melakukan Koordinasi dengan BAN PDM untuk pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD
- f. Melakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD

#### 19. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ditunjang oleh

kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan peserta didik tidak mampu
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik tidak mampu

#### 20. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Lomba-lomba rangkaian hari pendidikan nasional tingkat kabupaten banjar
- b. Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD untuk pelaksanaan kegiatan aktivitas anak usia dini
- c. Melaksanakan Karnaval Anak Usia Dini dalam rangka hari pendidikan nasional tingkat kabupaten banjar
- d. Melaksanakan Kegiatan Festival Kreatifitas Anak Usia Dini

#### 21. Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendampingan kepada satuan Pendidikan dalam penyusunan silabus
- b. Mengadakan workshop dan bimbingan teknis untuk guru PAUD agar memahami kurikulum muatan lokal dan metode pengajarannya.
- c. Menyediakan media pembelajaran kreatif seperti buku cerita, permainan edukatif, lagu, dan seni tradisional untuk mendukung kurikulum muatan lokal.
- d. Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan kurikulum diterapkan sesuai rancangan dan kebutuhan anak.

- e. Melibatkan pengawas pendidikan, guru, orang tua, dan komunitas untuk memberikan masukan perbaikan.

## 22. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan beberapa aktivitas sebagai beriku:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi terkait prosedur administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan pemerintah dan ketentuan akuntabilitas daerah.
- b. Memberikan panduan teknis berupa format laporan administrasi dan keuangan yang sesuai standar.
- c. Melakukan monitoring rutin terhadap laporan administrasi dan keuangan setiap lembaga nonformal/kesetaraan.

## 23. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan Data ATS kepada Operator Kecamatan dan Satuan Pendidikan
- b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data yang akurat.
- c. Menyediakan beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik tidak mampu.
- d. Memberikan pendampingan teknis kepada lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan agar mampu mengelola pendaftaran, pembelajaran, dan administrasi anak tidak mampu secara efektif.
- e. Membentuk forum koordinasi di tingkat desa/kecamatan untuk memantau anak yang belum bersekolah dan mendukung pendaftaran ke lembaga nonformal/kesetaraan.

#### 24. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan dan Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang Bina PAUD dan PNF terkait dengan kegiatan rapat
- b. Melakukan pendataan seluruh lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan dan pondok pesantren yang potensial menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
- c. Menyebarkan informasi melalui media lokal, desa, dan komunitas agar masyarakat lebih aware terhadap layanan pendidikan nonformal.
- d. Memberikan pelatihan bagi pengelola lembaga nonformal dan pondok pesantren tentang manajemen pendidikan kesetaraan, kurikulum, dan administrasi.
- e. Memastikan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan memiliki kurikulum formal yang terintegrasi dengan muatan lokal.

#### 25. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan, Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan, Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan, Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan workshop dan sosialisasi bagi kepala sekolah, guru, dan staf tentang pentingnya keamanan, toleransi, dan inklusivitas dalam pendidikan.
- b. Membentuk tim keamanan internal di setiap sekolah nonformal/kesetaraan untuk mengawasi kegiatan belajar dan mengidentifikasi potensi risiko.
- c. Menyediakan sarana yang ramah anak dan inklusif, misalnya ruang belajar yang dapat diakses semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.

26. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan calon peserta kegiatan peningkatan kompetensi
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk guru PAUD
- c. Memberikan pendampingan langsung di PAUD untuk memastikan transfer pengetahuan dan penerapan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan.
- d. Melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk menilai peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

27. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendataan dan verifikasi data PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- b. Melaksanakan Rapat terkait ketersediaan PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.
- c. Menyusun laporan hasil rapat terkait penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan nonformal/kesetaraan

28. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4 ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendataan dan verifikasi data PTK di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Melaksanakan Rapat terkait tindak lanjut untuk peningkatan kualifikasi PTK PAUD.

## 29. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun data distribusi tenaga kependidikan yang membutuhkan penempatan atau rotasi.
- b. Melakukan pendataan jumlah PAUD di seluruh Kabupaten Banjar beserta jumlah tenaga kependidikan yang ada.
- c. Menetapkan penempatan tenaga kependidikan di PAUD berdasarkan kebutuhan, potensi wilayah, dan ketersediaan SDM.
- d. Memberikan pelatihan manajemen sekolah, supervisi pendidikan, dan monitoring kualitas pembelajaran PAUD.
- e. Melakukan pemantauan rutin rasio kepala sekolah dan pengawas terhadap satuan PAUD di seluruh kabupaten.

## 30. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan dengan indikator Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan untuk pendataan dan verifikasi siswa tidak sekolah
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak bank penyedia jasa untuk penyaluran dana bantuan siswa tidak mampu
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, dan komunitas tentang pentingnya pendidikan dasar dan dampak positif bersekolah.

## 31. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan seluruh SD di Kabupaten Banjar berdasarkan status

akreditasi terakhir.

- b. Mengidentifikasi sekolah yang belum terakreditasi atau masih berada di bawah peringkat B.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen kurikulum, administrasi pembelajaran, manajemen sekolah, dan laporan keuangan sesuai standar akreditasi.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana yang menjadi komponen penilaian akreditasi.
- e. Melakukan monitoring rutin terhadap perkembangan kesiapan akreditasi sekolah.

### 32. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Peserta Didik dengan indikator Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar, Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar, dan Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis hasil asesmen literasi, numerasi, dan survei karakter peserta didik di seluruh SD.
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru tentang strategi pembelajaran aktif, diferensiasi pembelajaran, dan asesmen formatif.
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan nilai literasi, numerasi, dan karakter peserta didik.

### 33. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan untuk data guru-guru yang memiliki potensi dalam penyusunan kurikulum
- b. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru yang mempunyai potensi besar dalam penyusunan kurikulum
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru SD mengenai

kebijakan kurikulum nasional yang berlaku serta penguatan muatan lokal Kabupaten Banjar

- d. Mengadakan pelatihan bagi guru terkait implementasi kurikulum nasional, pembelajaran berdiferensiasi, dan integrasi muatan lokal dalam proses belajar.

#### 34. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik dan Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan untuk data kebutuhan kepala sekolah dan guru sesuai wilayah binaan masing-masing
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak BKPSDM terkait pemenuhan dan pemerataan guru melalui mutasi ataupun promosi
- c. Melakukan pemutakhiran data jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, sertifikasi, dan sebaran guru pada seluruh SD.
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

#### 35. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada kepala sekolah dan bendahara SD terkait peraturan pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan RKAS, laporan realisasi anggaran, pembukuan, serta pelaporan aset sekolah.
- c. Melakukan evaluasi triwulanan terhadap ketepatan waktu dan kelengkapan laporan administrasi dan keuangan SD.

#### 36. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar dengan indikator Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi potensi permasalahan seperti perundungan (bullying), intoleransi, diskriminasi, atau kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan sekolah ramah anak dan anti kekerasan kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- c. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
- d. Memberikan pelatihan kepada guru tentang manajemen kelas yang aman dan inklusif.
- e. Memastikan ketersediaan sarana pendukung keamanan seperti pagar, pencahayaan, dan fasilitas sanitasi yang layak.

#### 37. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dengan indikator Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan di tunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi potensi budaya, bahasa daerah, kearifan lokal, lingkungan, ekonomi kreatif, dan potensi unggulan daerah yang relevan untuk dijadikan muatan lokal.
- b. Membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, dan praktisi lokal.
- c. Melaksanakan forum diskusi atau uji publik untuk mendapatkan masukan terhadap draft kurikulum muatan lokal.
- d. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru terkait strategi pembelajaran dan penilaian muatan lokal.
- e. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kurikulum muatan lokal di sekolah.

#### 38. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar di tunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan calon dan peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa/kelurahan, dan dinas sosial.
- b. Mengusulkan dan menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu.
- c. Melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak.
- d. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan anak.

#### 39. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik dan Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Juknis Pelaksanaan Lomba Calistung Tingkat Sekolah Dasar
- b. Melakukan pemilihan dan penetapan Panitia Lomba Calistung dan Penetapan Juri/tim penilai lomba calistung
- c. Melaksanakan kegiatan Lomba Calistung pada tingkat Kabupaten
- d. Melaksanakan persiapan Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kabupaten
- e. Melaksanakan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kabupaten
- f. Melaksanakan Lomba Karakter Islami
- g. Melaksanakan Kegiatan Lomba O2SN
- h. Melaksanakan Kegiatan Lomba FTBI

#### 40. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah

Dasar dengan indikator Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Kisi-Kisi Soal dan Penulisan Naskah Soal
- b. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Proktor Dalam Pelaksanaan ANBK
- c. Melaksanakan Kegiatan Bimtek kapasitas Guru Kelas Awal Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (MPLS)
- d. Melaksanakan Peran PMM/Platform Rumah Belajar Guru Dalam Implentasi Kurikulum Merdeka
- e. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD
- f. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi 1
- g. Melakukan Pengadaan Map Ijazah Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kab. Banjar
- h. Melakukan Pengadaan Serfikat Ijazah Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kab. Banjar

#### 41. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru jenjang SD
- b. Membuat SK penerima insentif inklusi, daerah khusus dan guru honor SD
- c. Menyiapkan rencana penyaluran insentif di bulan Juni dan rapat penyediaan pendidik di bulan mei
- d. Melakukan filter daftar penerima insentif non ASN yang sudah lulus PPPK

- e. Melaksanakan kegiatan Diklat Pendampingan PPG dan Diklat Pendampingan PPG PJOK SD
- f. Melakukan persiapan untuk melakukan money tunjangan sertifikasi guru
- g. Melakukan persiapan kelengkapan administrasi untuk kegiatan diklat guru inklusi yang dilaksanakan di bulan oktober
- h. Melakukan persiapan kegiatan diklat pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru sd melalui hari belajar guru
- i. Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan pelatihan bakal calon kepala sekolah jenjang sekolah dasar

#### 42. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing satuan Pendidikan
- b. Menyiapkan surat edaran pembaharuan data guru di sekolah masing-masing satuan pendidikan setelah masuknya PPPK
- c. Menyiapkan bahan rapat perhitungan kepala sekolah dasar
- d. Membuat rekapitulasi usulan mutasi guru triwulan I baik lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar maupun yang ingin keluar dari Kabupaten Banjar
- e. Melakukan update data unit kerja baru PNS yang telah terbit SK Mutasi

#### 43. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah terkait data guru yang sudah memiliki ijazah S1
- b. Membuat rekapitulasi data guru yang sudah S1 dan belum S1
- c. Melakukan monitoring perkembangan studi lanjut guru yang sedang menempuh pendidikan S1/D4.
- d. Melakukan penataan distribusi guru berdasarkan kualifikasi akademik agar sekolah memiliki komposisi pendidik yang sesuai standar.

#### 44. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan dengan indikator Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan kepala sekolah untuk verifikasi dan validasi data siswa tidak mampu
- b. Koordinasi dengan pihak bank penyalur dalam proses pembuatan rekening dan penyaluran dana bantuan
- c. Melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia SMP melalui koordinasi dengan desa/kelurahan, sekolah, dan instansi terkait.
- d. Mengoptimalkan peran kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat dalam mengajak kembali anak yang putus sekolah.
- e. Berkoordinasi dengan dinas sosial, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk penanganan anak dari keluarga rentan.

#### 45. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi internal dan lintas sektor (pengawas, kepala sekolah) untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan akreditasi sekolah
- b. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembinaan akreditasi di tingkat sekolah
- c. Menyelenggarakan sosialisasi persyaratan dan prosedur akreditasi bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan SMP.
- d. Menyelenggarakan pelatihan bagi kepala sekolah dan staf terkait manajemen mutu sekolah, administrasi, dan pelaporan kinerja.
- e. Melakukan kunjungan supervisi ke SMP untuk memastikan kesiapan akreditasi.

#### 46. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Peserta Didik dengan indikator Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dan Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan guru tentang strategi pembelajaran literasi, numerasi, dan penguatan karakter siswa.
- b. Mengidentifikasi siswa yang memiliki kelemahan atau ketertinggalan dalam literasi, numerasi, maupun pengembangan karakter.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung literasi, numerasi, dan pembentukan karakter.
- d. Mengajak orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses belajar dan pembentukan karakter siswa di rumah dan komunitas.

#### 47. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas untuk memastikan keselarasan pelaksanaan kurikulum nasional dan lokal.

- b. Mendorong dan membimbing satuan pendidikan dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP).
- c. Menyelenggarakan sosialisasi terkait kurikulum nasional dan muatan lokal kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan SMP.
- d. Melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal di sekolah.
- e. Mengkoordinasikan integrasi muatan lokal dengan kurikulum nasional sehingga tidak tumpang tindih dan mendukung pencapaian kompetensi dasar.

#### 48. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik dan Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi lintas bidang (kepegawaian, kurikulum, pengawas sekolah) untuk merancang redistribusi guru berbasis kebutuhan dan pemetaan wilayah.
- b. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen PTK, termasuk pengembangan karier, penilaian kinerja, dan beban kerja guru.
- c. Menginisiasi program pelatihan, Bimtek, atau komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kualitas kompetensi PTK sesuai bidangnya.

#### 49. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendampingan dengan satuan pendidikan terhadap pengelolaan anggaran
- b. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen PTK, termasuk pengembangan karier, penilaian kinerja, dan beban kerja guru.
- c. Membuat SK Panitia, Surat Undangan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan

pengelolaan dana BOS jenjang SMP

- d. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kegiatan pendampingan pengelolaan dana BOS jenjang SMP di bulan Februari
- e. Melaksanakan Kegiatan pendampingan pengelolaan dana BOS jenjang SMP

#### 50. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar dengan indikator Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi risiko keamanan di lingkungan sekolah, seperti kebakaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan siswa.
- b. Memastikan akses pendidikan bagi semua siswa tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dari keluarga rentan.
- c. Melakukan survei rutin terhadap persepsi siswa, guru, dan orang tua mengenai iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas.
- d. Mendorong guru, tenaga kependidikan, dan orang tua berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, toleran, dan inklusif.
- e. Menyediakan forum komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk menindaklanjuti permasalahan lingkungan belajar.

#### 51. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi potensi budaya, kearifan lokal, lingkungan, dan kebutuhan kompetensi siswa yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum.
- b. Menyediakan pedoman dan modul ajar bagi guru yang mengajar muatan lokal.
- c. Menyelenggarakan pelatihan guru SMP dalam penyusunan dan implementasi

kurikulum muatan lokal.

- d. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penerapan kurikulum muatan lokal di SMP.

#### 52. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi data peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Dapodik, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan usulan sekolah.
- b. Membantu sekolah dalam menyusun laporan penggunaan dana bantuan dan pelaporan jumlah siswa penerima sesuai ketentuan.

#### 53. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik, Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik dan Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan lomba internal dan eksternal untuk menumbuhkan prestasi akademik dan non-akademik.
- b. Melatih guru dalam strategi pembelajaran literasi, numerasi, dan pembinaan prestasi siswa.
- c. Melakukan pemantauan rutin capaian literasi, numerasi, dan prestasi siswa.
- d. Mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar dan prestasi siswa.

#### 54. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

dengan Nilai Karakter Baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman pendidikan karakter berbasis kurikulum nasional dan muatan lokal untuk SMP.
- b. Menyelenggarakan pelatihan guru terkait metode pembelajaran karakter dan strategi pembiasaan nilai karakter di kelas.
- c. Melakukan pemantauan capaian pendidikan karakter di seluruh SMP secara berkala melalui observasi, laporan guru, dan survei siswa.
- d. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan karakter.

#### 55. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan konten digital untuk Pendidikan, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru SMP
- b. Membuat SK dan Surat Edaran untuk penerima Insentif bagi Guru Non ASN, Guru Inklusi dan Guru Non ASN di Daerah Khusus
- c. Pelaksanaan Rapat Penyediaan PTK SMP
- d. Melakukan persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pendalaman Materi, Kepsek, dan Guru dekolah non penerima Boskin
- e. Melakukan persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Jenjang SMP
- f. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Kurikulum (SI-MANJUR) Jenjang SMP berjalan dengan lancar

- g. Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan Pemanfaatan Aktivitas Komunitas Belajar Antar Sekolah Jenjang SMP
- h. Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pengembangan Pedagogik, Profesional dan Kompetensi Jenjang SMP

56. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru SMP
- b. Menyiapkan surat edaran pembaharuan data guru di sekolah masing-masing satuan pendidikan setelah masuknya PPPK
- c. Melaksanakan Rapat pemetaan PTK SMP
- d. Membuat rekapitulasi usulan mutasi guru triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV
- e. Membuat ANJAB ABK Kebutuhan guru untuk keperluan penerbitan usul mutasi guru

57. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Sasaran kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman dan standar sarana-prasarana pendidikan sesuai SNP untuk semua jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, Nonformal/Kesetaraan).

- b. Melakukan pendataan lengkap sarana dan prasarana di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Banjar.
- c. Menentukan prioritas perbaikan, pengadaan, dan pemeliharaan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah.
- d. Mengadakan sarana-prasarana sesuai standar SNP melalui mekanisme lelang, pengadaan langsung, atau program pemerintah lainnya.
- e. Melakukan monitoring berkala terhadap ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana di sekolah.

#### 58. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan survei dan inventarisasi sarana dan prasarana SD di seluruh Kabupaten Banjar.
- b. Membuat peta kondisi sarana-prasarana: lengkap dan baik, kurang lengkap, rusak ringan, rusak berat.
- c. Menentukan prioritas perbaikan atau pengadaan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah.
- d. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana SD berbasis data pendataan.
- e. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai SNP, misal: meja-kursi, papan tulis, laboratorium mini, alat peraga, buku pelajaran, ruang belajar digital.
- f. Menyusun laporan persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana lengkap dan baik.

#### 59. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki prasarana

dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan survei dan inventarisasi sarana-prasarana di seluruh PAUD Kabupaten Banjar.
- b. Membuat peta kondisi sarana-prasarana: lengkap dan baik, kurang lengkap, rusak ringan, rusak berat.
- c. Menentukan prioritas perbaikan atau pengadaan berdasarkan kebutuhan nyata tiap PAUD.
- d. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana PAUD berdasarkan hasil pendataan.
- e. Menyelaraskan rencana dengan anggaran daerah, BOS PAUD, dan sumber pembiayaan lain.
- f. Melaksanakan pengadaan sarana-prasarana sesuai SNP, misal: alat peraga edukatif, meja-kursi, mainan kreatif, rak buku, dan fasilitas belajar interaktif.
- g. Memberikan pelatihan kepada guru PAUD dan tenaga kependidikan mengenai manajemen sarana-prasarana dan laporan administrasi.

#### 60. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan rutin ke beberapa lembaga Nonformal/Kesetaraan untuk mengecek kondisi sarana dan prasarana.
- b. Memperbarui data inventaris sarana dan prasarana setiap hari melalui laporan sekolah atau pengawas.
- c. Menyusun daftar prioritas perbaikan, pengadaan, atau pemeliharaan
- d. Mencatat temuan kerusakan atau kekurangan sarana/prasarana untuk tindak lanjut.

- e. Melaksanakan pengadaan sarana-prasarana sesuai SNP
61. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengunjungi SMP secara bergiliran untuk mengecek kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan fasilitas IT.
- b. Memperbarui data inventaris sarana-prasarana di setiap SMP melalui laporan guru atau pengawas sekolah.
- c. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana SMP berdasarkan hasil pendataan.
- d. Menyusun peta kondisi sarpras per SMP, termasuk sarana-prasarana yang rusak, kurang lengkap, atau memerlukan penggantian.
- e. Menyusun rencana pengadaan sarpras sesuai prioritas kebutuhan dan anggaran.

#### **A. 9 Rekomendasi dan Tindak lanjut**

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Banjar atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 74.23 atau predikat Sangat Baik (BB). Maka direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan SKP perubahan menyesuaikan dengan dokumen perencanaan perubahan;
2. Melakukan evaluasi keselarasan Perjanjian Kinerja dengan IKU;
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berjenjang dari level eselon III sampai dengan pelaksana;
4. Pimpinan dan seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam melakukan pengukuran kinerja dan memastikan capaian kinerja diukur berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev;
5. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang;
6. Menyajikan informasi data kinerja (perolehan data dari dasar perhitungan/formulasi

yang valid, sumber data yang valid, dapat ditelusuri sumber datanya dan dapat diverifikasi) terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dan IKU;

7. Melakukan revidi berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
8. Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara selaras dengan Perjanjian kinerja dan sesuai dengan Definisi Operasional IKU pada seluruh sasaran kinerja dan menyajikan data secara konsisten dan valid pada semua informasi yang harus disajikan;
9. Melakukan evaluasi capaian kinerja pada laporan kinerja sesuai dengan sasaran, indikator dan target pada perjanjian kinerja;
10. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan;
11. Melakukan Evaluasi Internal yang dilakukan melalui secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti Keselarasan Antar Indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, kekurangan penyajian informasi dalam LKJIP, konsistensi dan validitas data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyesuaian SKP Perubahan yang diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan Perubahan Tahun 2025, yaitu Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.
2. Telah dilaksanakan evaluasi keselarasan Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui rapat evaluasi kinerja.
3. Telah dilakukan pemantauan rencana aksi secara berkala serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berjenjang dari Eselon III sampai dengan Eselon IV melalui aplikasi E-Monev Simondalev dan SKP bagi pelaksana.
4. Pengukuran kinerja pimpinan dan seluruh pegawai dilakukan melalui input realisasi kinerja pada aplikasi Simondalev disertai upload dokumen pendukung sebagai dasar perhitungan capaian.
5. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan dan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
6. Penyajian informasi data kinerja telah menggunakan sumber data yang valid dan

- terverifikasi, antara lain Rapor Pendidikan dan Dapodik.
7. Setiap laporan kinerja telah direviu oleh pejabat yang berwenang dengan bukti paraf sebagai bentuk pengendalian internal.
  8. Laporan kinerja telah disusun dan disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
  9. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan PK Murni, PK Perubahan, Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, serta LKjIP Tahun 2025.
  10. Telah dilaksanakan rapat Tim Evaluasi AKIP Internal yang dibuktikan dengan undangan, notulen, dan daftar hadir.
  11. Hasil evaluasi internal telah dituangkan dalam LKjIP Tahun 2025 dan dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.

## B. Realisasi Anggaran

### B. 1 Realisasi Jenis Belanja

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar setelah perubahan tahun 2025 sebesar 719.575.440.008,- dengan realisasi keuangan sebesar 669.049.941.917,04,- (92,98%). Realisasi jenis belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	641.268.150.944,-	601.575.409.863,-	93,81
	a. Belanja Pegawai	515.713.700.647,-	489.110.313.884,-	94,84
	b. Belanja Barang dan Jasa	97.387.560.297,-	85.339876.683,-	87,62
	c. Belanja Lainnya	28.166.890.000,-	27.125.219.296,-	96,30
2	Belanja Modal	78.307.289.064,-	67.474.531.754,04,-	86,17
	a. Belanja Modal Tanah	1.684.250.000,-	860.427.330,-	51,09
	b. Belanja Modal Peralatan dan	28.193.610.685,-	20.269.207.482,-	71,89

Mesin			
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.288.509.279,-	41.582.597.586,04	96,06
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.140.919.100,-	4.762.299.356,-	92,64

Capaian belanja operasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar 93,81% yang terdiri dari belanja pegawai 94,84%, belanja barang dan jasa 87,62 dan belanja lainnya 96,30%. Sedangkan belanja modal 86,17% yang terdiri dari belanja modal tanah 51,09%, belanja modal peralatan dan mesin 71,89, belanja modal gedung dan bangunan 96,06 dan belanja modal aset tetap lainnya 92,64%.

## B. 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 13 kegiatan, dan 134 sub kegiatan. Program terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2025 berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>530.155.630.297</b>	<b>495.152.124.386</b>	<b>93,40</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.225.600</b>	<b>48.235.558</b>	<b>96,04</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.530.700	14.459.698	99,51
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.621.000	5.617.405	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.200.000	5.196.126	99,93
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.578.000	6.578.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.350.100	6.345.194	99,92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.824.800	7.941.935	80,84
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.121.000	2.097.200	98,88
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>516.204.145.697</b>	<b>489.583.130.768</b>	<b>94,84</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	515.615.700.697	489.021.413.884	94,84
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	554.171.000	527.777.484	95,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.570.000	15.438.845	99,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.704.000	18.500.555	98,91
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>289.105.000</b>	<b>288.652.954</b>	<b>99,84</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.105.000	39.052.954	99,87
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	249.600.000	99,84
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.017.898.600</b>	<b>1.742.310.810</b>	<b>86,34</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.561.000	63.347.700	91,07
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.648.000	14.399.999	98,31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.939.500	83.588.800	90,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.573.600	88.096.113	99,46
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	694.652.500	479.385.920	69,01
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.058.524.000	1.013.492.278	95,75
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>334.219.000</b>	<b>325.397.820</b>	<b>97,36</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.219.000	325.397.820	97,36
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.294.219.000</b>	<b>2.438.138.164</b>	<b>23,68</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.617.000	328.632.636	83,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.902.602.000	2.109.505.528	21,30
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>965.817.400</b>	<b>726.258.312</b>	<b>75,20</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.750.000	39.542.127	92,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.884.000	224.276.185	48,77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.550.000	64.305.000	99,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398.633.400	398.135.000	99,87
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>189.317.073.761</b>	<b>173.826.421.190</b>	<b>91,82</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>97.615.144.034</b>	<b>88.266.694.416</b>	<b>90,42</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.358.950.000	860.427.330	63,32
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	951.560.000	848.613.250	89,18
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.276.471.667	1.161.633.000	91,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.643.044.900	2.628.729.000	99,46
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	414.530.000	413.650.000	99,79
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	471.550.000	468.951.350	99,45
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	305.980.000	304.950.000	99,66
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	161.925.000	161.375.000	99,66
	Pengadaan Mebel Sekolah	417.735.000	416.368.183	99,67
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.497.753.125	10.204.389.801	65,84

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	952.536.000	726.193.741	76,24
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.295.800.000	468.398.364	36,15
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.432.498.000	833.913.923	58,21
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	191.809.400	135.888.413	70,85
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.887.024.867	40.544.551.940	99,16
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	213.958.000	193.965.983	90,66
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi & Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	42.275.000	41.902.213	99,12
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17.880.000	17.739.345	99,21
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	169.758.300	163.158.048	96,11
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.556.000	7.496.349	99,21
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	27.270.000	26.349.317	96,62
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.684.500	55.796.831	98,43
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	181.993.000	178.749.890	98,22
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.257.830.000	2.140.308.200	94,79
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	913.775.000	909.570.000	99,54
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	220.944.000	209.812.366	94,96
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	812.420.400	786.866.079	96,85
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18.599.256.875	17.778.387.136	95,59

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	3.999.000.000	3.784.500.000	94,64
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.835.375.000	1.794.059.364	97,75
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>37.503.766.577</b>	<b>34.963.508.647</b>	<b>93,23</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13.210.800	3.916.454	29,65
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	599.286.000	509.257.000	84,98
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	198.122.000	197.871.000	99,87
	Pembangunan Perpustakaan sekolah	428.875.000	425.711.000	99,26
	Pembangunan Laboratorium	325.449.000	271.884.000	83,54
	Pembangunan Fasilitas Parkir	896.386.667	866.395.000	96,65
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	711.260.000	707.300.000	99,44
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.702.483.667	4.661.091.000	99,12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	336.350.000	310.880.000	92,43
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	239.825.500	199.933.000	83,37
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	539.488.333	530.602.000	98,35
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.137.455.000	1.133.412.000	99,64
	Pengadaan Mebel Sekolah	516.245.000	512.425.035	99,26
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	149.859.000	147.195.053	98,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	375.000.000	349.500.000	93,20
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	774.056.100	764.663.456	98,79
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	147.113.400	96.231.900	65,41
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	1.261.488.000	1.248.155.230	98,94
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	281.276.000	274.107.436	97,45
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.879.798.810	15.873.396.544	99,96

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	89.925.500	89.475.500	99,50
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	37.548.000	37.547.503	100,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	34.277.200	34.277.111	100,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	23.412.600	23.240.513	99,26
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.617.500	76.681.202	98,79
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	36.599.000	36.318.575	99,23
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.505.000	34.505.000	100,00
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.820.500	30.020.435	97,40
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	459.279.000	456.509.941	99,40
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	604.946.000	588.640.000	97,30
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	45.499.000	45.338.981	99,65
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	977.475.000	943.332.648	96,51
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	348.925.000	347.283.045	99,53
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	273.000.000	272.485.000	99,81
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.916.909.000	2.863.926.085	58,25
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>33.521.851.736</b>	<b>30.499.208.150</b>	<b>90,98</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.121.857.520	1.948.014.000	91,81
	Pengadaan Mebel PAUD	325.371.000	322.461.405	99,11
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	594.195.000	197.076.800	33,17
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	480.000.000	480.000.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.594.603.000	6.194.541.931	93,93
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	437.383.200	411.689.973	94,13
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.353.000	209.240.470	92,03
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.836.680.000	7.997.794.890	90,51
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	106.573.000	98.684.194	92,60
	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	35.640.000	34.570.000	97,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.153.000	9.773.000	87,63
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.800.000	55.632.370	85,85
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	757.168.500	652.304.032	86,15
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.095.942.900	1.745.491.000	83,28
	Penyediaan infrastruktur TIK	1.403.000.000	971.814.000	69,27
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	344.048.000	331.218.000	96,27
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.492.405.000	1.322.795.000	88,64
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	107.775.000	107.180.166	99,45
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	524.392.116	523.780.000	99,88
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.832.568.000	3.817.108.374	99,60
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.093.127.000	2.036.019.545	97,27
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.035.816.500	1.032.019.000	99,63
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>20.676.311.414</b>	<b>20.097.009.977</b>	<b>97,20</b>
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.600.000	3.600.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	49.997.000	49.850.372	99,71
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.195.280.000	11.166.170.000	99,74
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26.750.500	26.590.500	99,40
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang pendidikan	29.140.000	26.071.995	89,47
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.900.000	20.960.000	95,71
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	485.951.400	356.778.234	73,42
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.119.500	71.769.500	85,32
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.750.000	39.150.000	91,58
	Penyediaan infrastruktur TIK	277.271.250	506.250	0,18
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	97.300.000	97.161.635	99,86
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	460.840.600	459.985.000	99,81
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.776.146	837.594.000	89,32
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	577.528.468	573.536.000	99,31
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.872.661.000	4.856.442.893	99,67
	Pengadaan Mebel Sekolah	800.800.000	800.097.324	99,91
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik Nonformal / Kesetaraan	401.350.000	400.190.429	99,71
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	311.295.550	310.555.845	99,76
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>36.296.000</b>	<b>36.295.313</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	36.296.000	36.295.313	100,00
4	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>66.440.000</b>	<b>35.101.028</b>	<b>52,83</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	33.860.000	21.026.444	62,10
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	32.580.000	14.074.584	43,20
Jumlah		<b>719.575.440.008</b>	<b>669.049.941.917</b>	<b>92,98</b>

### B. 3 Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2025 berdasarkan sasaran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	86,5	63,71	73,65	719.575.440.008	669.049.941.917	92,98
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,45	94,13	98,62			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	58,74	66,03	112,41			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	86,67	86,55	99,86			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100	96,38	96,38			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100	94,31	94,31			
		Angka Partisipasi Murni (APM)	63,02	65,23	103,51			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Pendidikan Anak Usia Dini						
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	91,91	90,05	97,98			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,37	63,16	84,93			
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	81,26	N/A	N/A			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	74,23	95,17			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	89,43	93,13	104,14	530.155.630.247	495.152.124.386	93,4
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	100	50.225.600	48.235.558	96,04
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100	100	100			
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	516.204.145.647	489.583.130.768	94,84
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100	100	100			
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	13.901.259.000	5.520.758.060	39,71

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	100	100			
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	100	100			
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	100	100	100			
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100	100	100			
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)-Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,65	1,65	100	36.769.681.100	35.084.696.436	95,42
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0,53	0,69	130,19			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	39,09	39,09	100			
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	73,11	72,16	98,7			
		Persentase Satuan Pendidikan Non	78,57	78,57	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B						
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100			
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	11,78	7,64	64,86			
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	72,43	69,43	95,86	12.565.701.500	11.529.675.501	91,76
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	69,2	68,2	98,55			
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	1	1	100			
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Ke	100	100	100	16.618.542.400	16.439.501.127	98,92

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	setaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan						
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,58	4,58	100			
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	59	59	100			
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	7	7	100			
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	73,42	73,42	100			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	60,5	60,5	100			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	57,42	57,42	100			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	68,28	68,28	100			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	65,27	65,27	100			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	57,53	57,53	100			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah	68,57	68,57	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Atas Kesetaraan						
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	67,17	67,17	100			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	58,03	58,03	100			
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	40,22	40,22	100			
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	98,45	98,45	100			
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	66,04	66,04	100	7.585.437.200	7.115.519.808	93,81
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	01:01,1	01:01,1	102,74			
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	01:10,2	01:16,0	63,57			
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	7,11	7,12	100,14	50.337.198.067	48.058.440.008	95,47

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	78,28	78,28	100	41.318.251.867	40.951.113.479	99,11
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	64,18	56,6	88,19			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	56,93	48,79	85,7			
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	59,96	58,46	97,5			
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	62,15	62,15	100			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	0,74	0,87	117,52			
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	100			
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	77,79	73,11	93,98			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	72,4	65,24	90,11			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	61,96	57,52	92,8			
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang	2	3	150			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sekolah Dasar	ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan						
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	59,92	28,89	49,03			
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	64,18	64,61	100,67	5.781.836.400	5.315.299.165	91,93
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	59,93	60,58	106,41			
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	27,27	15	55			
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	79,62	75,33	94,61			
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	20.10	20.10	100			
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	01:01,0	01:01,0	100	3.237.109.800	1.792.027.364	55,36
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	01:11,3	01:11,3	100			
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	0,69	0,6	86,96			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	95,02	95,02	100			
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	5,27	5,27	100			
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	88,16	85,53	97,02			
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	74,32	83,31	112,1	19.652.801.610	19.514.357.140	99,30
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	66,28	77,67	117,18			
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	58,07	58,07	100			
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	62,08	62,08	100			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	0,84	0,88	104,76			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	100			
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	74,93	73,43	98	16.432.333.310	16.416.295.005	99,90
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	72,2	71,2	98,61			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	63,41	61	96,2			
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	1	2	200			
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	38,9	38,9	100			
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	74,32	83,31	112,1	1.642.612.300	1.604.950.508	97,71
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	66,28	77,67	117,18			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	14,14	14,14	100			
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	69,51	56,97	81,96			
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	51,53	51,53	100			
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	01:01,0	01:01,0	100	1.577.856.000	1.493.111.627	94,63
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	01:07,6	01:07,6	100			
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	0,86	0,86	100			
57	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	78,32	70,68	90,25	82.748.344.983	71.238.055.947	86,09
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran	67,3	67,3	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)					
58	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	60,37	60,37	100	47.297.545.966	40.227.300.027	85,05
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	41,16	41,16	100			
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	76,99	90	116,9	13.621.089.036	11.987.739.745	88,01
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	80,59	80,59	100			
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	100	100	100	3.914.159.014	3.529.476.855	90,17
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	96,05	96,05	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	75,94	75,94	100	17.915.550.967	15.493.539.320	86,48
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	51,39	51,39	100			

Secara umum, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan terkendali. Dari total pagu anggaran sebesar Rp719.575.440.008 terealisasi Rp669.049.941.917 atau sebesar 92,98 persen. Tingkat serapan ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan optimal dengan deviasi anggaran yang relatif kecil. Realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja telah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, sekaligus menggambarkan kemampuan pengendalian belanja yang baik.

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi anggaran yang berada di atas 90 persen mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan selaras. Tingginya serapan anggaran ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dalam memastikan bahwa alokasi dana dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun sebesar 73,65% (realisasi 63,71% dari target 86,5%) masih berada pada kategori sedang sehingga memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan partisipasi PAUD. Sebaliknya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun mencapai 98,62% (realisasi 94,13% dari target 95,45%) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 kesetaraan mencapai 112,41% (realisasi 66,03% dari target 58,74%), keduanya berkategori sangat tinggi, bahkan untuk kesetaraan melampaui target yang ditetapkan.

Indikator Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (target 86,67%), Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (target 100%), Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (target 100%), Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (target 63,02%), Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (target 91,91%), dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (target 74,37%), belum dapat dievaluasi karena realisasi belum tersedia akibat Rapor Pendidikan belum dirilis.

Demikian pula pada sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dengan indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal dengan target 81,26 belum memiliki data realisasi di karenakan Rapor Pendidikan belum rilis.

Pada sasaran akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Nilai SAKIP mencapai 95,17% (realisasi 74,23 dari target 78,00) dengan kategori sangat tinggi. Secara umum, kinerja menunjukkan hasil sangat baik pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 kesetaraan, dan SAKIP, namun masih perlu peningkatan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai 92,98 persen dari total pagu yang ditetapkan. Tingkat serapan anggaran yang berada di atas 90 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan adanya pengendalian belanja yang baik serta komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan sinergi yang baik antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, di mana output kegiatan dapat direalisasikan dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan relatif efisien.

## B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Memperkuat intervensi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini melalui perluasan layanan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi dukungan lintas sektor.
2. Meningkatkan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP guna mendorong kenaikan Angka Partisipasi Murni dan menekan angka putus sekolah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan agar mutu layanan semakin merata.
5. Memperkuat budaya kinerja melalui evaluasi internal berkelanjutan serta penerapan reward dan punishment yang objektif dan terukur.
6. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada tahun mendatang dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST., MS  
Pembina TK I / IV b  
NIP. 19800712 200501 2 013



*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.*



## LAMPIRAN

### 1. Pohon Kinerja dan Cascading

[https://drive.google.com/drive/folders/1djfQgtOFYTJuRxhIps2H00hA9a92z\\_xl?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1djfQgtOFYTJuRxhIps2H00hA9a92z_xl?usp=drive_link)

### 2. Perjanjian Kinerja PD

[https://drive.google.com/drive/folders/1F2aV2cDr-KfBtoRUvawM7laao3NOzJLK?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1F2aV2cDr-KfBtoRUvawM7laao3NOzJLK?usp=drive_link)

### 3. SK IKU

[https://drive.google.com/drive/folders/1rKqHQJREVqSdfIPPP5\\_XKCP8XmSf6K6A?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1rKqHQJREVqSdfIPPP5_XKCP8XmSf6K6A?usp=drive_link)